

LAPORAN TAHUNAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin Nya Laporan Tahunan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 ini telah tersusun. Buku Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian data dan informasi pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.



Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan rencana kegiatan lima tahunan 2020-2024. Prestasi yang diperoleh pada tahun ini merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur yang ada di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok untuk bersama mewujudkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tentunya selain ada prestasi yang diraih selama kurun waktu tersebut, masih ada hambatan yang belum sempat terselesaikan pada tahun ini dan akan diperbaiki dan ditingkatkan di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Laporan Tahunan ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga buku Laporan Tahunan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Priok, Februari 2025
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok,



Heri Saputra, S.K.M., M. Kes
NIP 196905041992031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	8
BAB 1.....	11
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN.....	11
1.1 HAMBATAN TAHUN LALU	11
1.2 KELEMBAGAAN	12
1.3 SUMBER DAYA	13
BAB II.....	20
TUJUAN DAN SASARAN KERJA	20
2.1 DASAR HUKUM	20
2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.....	21
BAB III.....	24
STRATEGI PELAKSANAAN	24
3.1 STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN.....	24
3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN	27
3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	28
BAB IV.....	31
HASIL KERJA	31
4.1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1.1 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	31
4.1.2 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	56
4.1.3 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN.....	78
4.1.4 PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS	109
4.1.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS.....	136
4.1.6 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KETATAUSAHAAN/DUKUNGAN MANAJEMEN	151
4.2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).....	159
4.3. PENCAPAIAN KINERJA.....	160

4.4.	REFORMASI BIROKRASI.....	161
4.5.	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	163
BAB V.....		166
KESIMPULAN DAN SARAN.....		166
5.1.	KESIMPULAN.....	166
5.2.	SARAN-SARAN.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan.....	14
Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	15
Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana yang dimiliki.....	16
Tabel 1. 4 Perjalanan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024	17
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok	22
Tabel 3. 1 Strategi Pelaksanaan Tujuan.....	24
Tabel 4. 1 Hasil kegiatan Konsultasi Teknis Program Wilker ke Induk	32
Tabel 4. 2 Hasil kegiatan Konsultasi Teknis Program Induk ke Pusat	34
Tabel 4. 3 Kegiatan Emergency Call Wilayah Pelabuhan.....	45
Tabel 4. 4 Capaian Kinerja Kegiatan Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantina Tahun 2024	55
Tabel 4. 5 Pengawasan Lalu Lintas Komoditi Omkaba Ekspor Impor	60
Tabel 4. 6 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan Penanganan Emergency Call Tahun 2024.....	69
Tabel 4. 7 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan Safety Boarding Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok Tahun 2024	71
Tabel 4. 8 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan Advance Sea Survival dan Keselamatan di Lepas Pantai	72
Tabel 4. 9 Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.....	75
Tabel 4. 10 Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	76
Tabel 4. 11 Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang.....	78
Tabel 4. 12 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan.	107
Tabel 4. 13 Tabel Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan	108
Tabel 4. 14 Tabel Penerimaan PNPB Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan.	108
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Pemeriksaan Laboratorium Klinik.....	134
Tabel 4. 16 Hasil Pencapaian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024	160

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Penghargaan Pelabuhan Sehat.....	163
Gambar 4. 2 Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	164
Gambar 4. 3 Penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok.....	165

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	13
Grafik 4. 1 Data Penyakit di puskesmas Tanjung Priok Tahun 2024	47
Grafik 4. 2 Data Penyakit di puskesmas Cilincing Tahun 2024.....	48
Grafik 4. 3 Distribusi Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024	56
Grafik 4. 4 Distribusi Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024	57
Grafik 4. 5 Distribusi Keberangkatan Kapal tujuan Dalam Negeri.....	58
Grafik 4. 6 Distribusi Keberangkatan Kapal tujuan Pelabuhan Luar Negeri.....	59
Grafik 4. 7 Distribusi Penerbitan COP	62
Grafik 4. 8 Distribusi Perbandingan Penerbitan COP	63
Grafik 4. 9 Distribusi Penerbitan PHQC.....	63
Grafik 4. 10 Distribusi Perbandingan Penerbitan PHQC.....	64
Grafik 4. 11 Distribusi Penerbitan SSCEC.....	64
Grafik 4. 12 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCEC.....	65
Grafik 4. 13 Distribusi Penerbitan SSCC	65
Grafik 4. 14 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCC	66
Grafik 4. 15 Distribusi Penerbitan Health Certificate.....	66
Grafik 4. 16 Distribusi Perbandingan Penerbitan Health Certificate.....	67
Grafik 4. 17 Distribusi Penerbitan Buku Kesehatan Kapal.....	67
Grafik 4. 18 Distribusi Perbandingan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal.....	68
Grafik 4. 19 Distribusi Hasil Pengawasan & Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal	79
Grafik 4. 20 Distribusi Hasil Pengukuran Kualitas Udara	81
Grafik 4. 21 Distribusi Hasil Pengawasan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Badan Air	83
Grafik 4. 22 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Penyediaan Air Minum	85
Grafik 4. 23 Distribusi Hasil Pemeriksaan Pengujian Kualitas Fisik Air Minum	86
Grafik 4. 24 Distribusi Hasil Pemeriksaan Kimia Air Minum.....	87
Grafik 4. 25 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum	88
Grafik 4. 26 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan	90
Grafik 4. 27 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Sampel Makanan	91
Grafik 4. 28 Distribusi Hasil Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2).....	92

Grafik 4. 29 Distribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Gedung Bangunan dan Tempat Fasilitas Umum (TFU).....	94
Grafik 4. 30 Distribusi Jumlah Tikus Tertangkap pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES	95
Grafik 4. 31 Distribusi Jumlah Index Pinjal	96
Grafik 4. 32 Distribusi Jumlah Bangunan Diperiksa Pada Kegiatan Survei Vektor DBD	97
Grafik 4. 33 Distribusi Jumlah Container di Periksa Pada Kegiatan Layanan Survei Vektor DBD	98
Grafik 4. 34 Distribusi Container Indeks Jentik Vektor Penyakit Demam Berdarah (DBD)	99
Grafik 4. 35 Distribusi House Index (HI) Jentik Vektor Penyakit DBD.....	99
Grafik 4. 36 Distribusi Indeks Populasi Lalat Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Lalat	101
Grafik 4. 37 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Lalat Pasca Tindakan Pengendalian	102
Grafik 4. 38 Distribusi Indeks Populasi Kecoa Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Kecoa.....	103
Grafik 4. 39 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Kecoak Pasca Tindakan Pengendalian	104
Grafik 4. 40 Distribusi Penerbitan ICV (International Certificate of Vaccination).....	121
Grafik 4. 41 Distribusi pemeriksaan ICV Awak Kapal	122
Grafik 4. 42 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik Selain Penumpang.....	123
Grafik 4. 43 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kasus Penyakit	123
Grafik 4. 44 Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Dalam Negeri	124
Grafik 4. 45 Distribusi Pengawasan Penumpang Datang Dalam Dan Luar Negeri.....	125
Grafik 4. 46 Distribusi Pengawasan Penumpang Berangkat Dalam Dan Luar Negeri	126
Grafik 4. 47 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah	127
Grafik 4. 48 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit	127
Grafik 4. 49 Distribusi Capaian Skrining HIV/AIDS Berdasarkan Penemuan Kasus Positif	128
Grafik 4. 50 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS Berdasarkan Tempat Pelaksanaan	129
Grafik 4. 51 Distribusi Layanan Skrining Terduga TB	129
Grafik 4. 52 Distribusi Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat	130
Grafik 4. 53 Distribusi Pelayanan Rujukan	130
Grafik 4. 54 Distribusi Penerbitan ICV	131
Grafik 4. 55 Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever	131
Grafik 4. 56 Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis Meningococcus	132
Grafik 4. 57 Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza	132
Grafik 4. 58 Distribusi Pemakaian Vaksin Thypoid	133
Grafik 4. 59 Distirbusi Penerbitan SKPK/KIR.....	133
Grafik 4. 60 Pemeriksaan Skrining HIV	135

Grafik 4. 61 Distribusi Penerbitan Sertifikat P3K.....	135
Grafik 4. 62 Penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok Tahun Anggaran 2024	160

BAB 1

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

1.1 HAMBATAN TAHUN LALU

1. Proses pengumpulan data kurang maksimal diakibatkan aplikasi SE sudah tidak berfungsi dengan baik;
2. Jaringan Internet yang terkadang tidak stabil sehingga proses melakukan entri data di aplikasi pengumpulan data terhambat;
3. Beberapa petugas pelayanan dokumen yang baru selaku petugas pengumpulan data tidak melaksanakan tugas secara maksimal karena tidak mendapat pelatihan yang cukup;
4. Beberapa alat pengolah data berupa laptop dan PC di Tim Kerja 1 sering bermasalah karena pengadaan yang cukup lama;
5. Tidak memiliki mobil dinas untuk dipakai dalam melaksanakan tugas tim sehingga sulit untuk melaksanakan tugas dengan cepat;
6. Masih ditemukan adanya faktor risiko di alat angkut karena masih rendahnya kesadaran dari awak kapal dalam menjaga kesehatan kapal dari faktor risiko yang mungkin terbawa;
7. Proses pemeriksaan kapal dengan status karantina terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang memadai/ *safety* bagi petugas apalagi saat cuaca tidak kondusif, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan tertib administrasi dipelayanan dokumen kesehatan kapal belum maksimal, sehingga terjadi selisih antara data sinkarkes dengan PNBP;
9. Adanya perbedaan waktu pembayaran PNBP dapat berpengaruh pada laporan PNBP sehingga tidak sesuai dengan pengeluaran dokumen;
10. Kemampuan Agen Pelayaran yang tidak dapat membuat pembayaran billing sehingga terjadi kesalahan berupa: kekurangan, kelebihan dan kesalahan pembayaran;
11. Alat pengolah data berupa laptop dan PC perlu di perbaharui;
12. Jaringan internet dan server tidak stabil;
13. Permohonan izin RS/ Klinik pada pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV yang meningkat drastis karena tidak adanya aturan UU maupun PERDIRJEN dalam hal pembatasan Jumlah izin RS/Klinik;
14. Kurangnya anggaran akibat banyaknya permohonan baru dan perpanjangan izin RS/ Klinik;

15. Pemberian ICV yang terbatas harus dibagi rata ke RS/Klinik pelaksana vaksinasi internasional yang semakin meningkat drastis.

1.2 KELEMBAGAAN

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) berubah menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dengan tugas pokok dan fungsi yang masih sama yaitu cegah tangkal masuknya penyakit di pintu masuk Negara. Sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
3. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
4. Loka Kekarantinaan Kesehatan

Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja, untuk itu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok Nomor HK.02.03/C.IX.5/877/2024 tentang Tim Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul

kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

B. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
- b. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
- c. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- e. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring Surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
- f. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan haji dan perpindahan penduduk.
- g. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan Surveilans kesehatan pelabuhan.

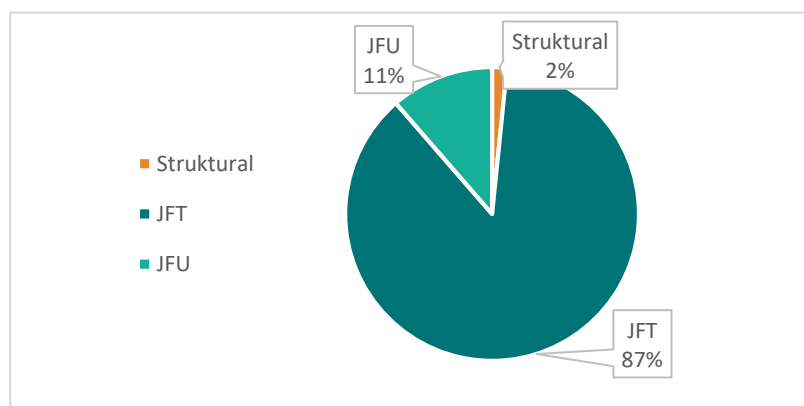
1.3 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Karantina Kesehatan Tanjung Priok berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang.

- a. Menurut Jabatan

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan



Dari grafik 1.1 terlihat bahwa jenis jabatan pegawai yang paling banyak adalah Jabatan Struktural 2 orang (2 %), Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 14 orang (11 %), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 107 orang (87 %).

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama (JFT)	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JF)	1
5	Arsiparis / Pratanata Kearsipan (JFU)	1
6	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	1
7	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
8	Arsiparis Terampil (JFT)	2
9	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian (JFU)	2
10	Asisten Perawat (JFU)	1
11	Dokter Ahli Madya (JFT)	4
12	Dokter Ahli Muda (JFT)	8
13	Dokter Ahli Pertama (JFT)	2
14	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	2
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	4
17	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	1
18	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	4
19	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	1
20	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	7
23	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
24	Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1
25	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	4
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya (JFT)	1
27	Pengelola Instalasi Air dan Listrik (JFU)	1
28	Pengemudi (JFU)	1
29	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	3
30	Perawat Mahir (JFT)	8
31	Perawat Penyelia (JFT)	9
32	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	2
33	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
34	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1
35	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1
36	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1
37	Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1
38	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	1

39	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1
40	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1
41	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	3
42	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	4
43	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	7
44	Sanitarian Mahir (JFT)	5
45	Sanitarian Penyelia (JFT)	1
46	Sanitarian Terampil (JFT)	1
Total		123

b. Menurut Jabatan

Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Menengah Pertama	1
2	Sekolah Menengah Atas	1
3	SPK	2
5	Akademi Kesehatan Lingkungan	1
6	D.III Keperawatan	18
7	D.III Farmasi	3
8	D.III Kesehatan Lingkungan	13
9	D.III Analisis Kesehatan	2
10	D.III Teknik Radiologi	1
11	D. III Kebidanan	1
12	D.III Teknik Komputer Teknik Elektro	1
13	D.III Akuntansi	3
14	D.IV Kesehatan Lingkungan	1
15	S.1 Kedokteran Umum	9
16	S.1 Keperawatan	1
17	S.1 Farmasi	2
18	S.1 Kesehatan Masyarakat	32
19	S.1 Entomolog	1
20	S.1 Ekonomi	2
21	S.1 Akuntansi	2
22	S.1 Teknik Informatika	1
23	Apoteker	1
24	S.2 Kesmas/Kesling	22
25	S.2 MSi	1
26	Magister/Master	1
TOTAL		123

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana yang dimiliki

No	Nama Sarpras	Luas (m ²) / Unit	Status Gedung	Status Tanah
1	Kantor Induk			
	Gedung A	2.450	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
	Gedung B	579, 80	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
	Gedung C	627	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
	Pos Satpam	32	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
2	Wilayah Kerja			
	Sunda Kelapa	385 + 42 = 427	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
	Marunda	385	Kemenkes RI	KBN Marunda
	Muara Baru	96,46	Kemenkes RI	Kemenkes RI
	Muara Angke	22, 50	Pemda DKI UP3 Muara Angke	Pemda DKI
	Kali Baru	41	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
3	Tanah untuk Pendidikan dan Pelatihan	15.639	-	Kemenkes RI
4	Tanah Bangunan Rumah Dinas	732	Kemenkes RI	Kemenkes RI
5	Gedung dan Bangunan Rumah Dinas	152	Kemenkes RI	Kemenkes RI
6	Kendaraan Operasional	total 31 unit sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 30 unit		
	Mobil Ambulance	12 unit Sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 11 unit		
	Kapal Angkut Serbaguna (ambulance air)	0 unit, sudah di hibahkan ke sesditjen P2P yang selanjutnya dikirim ke pemda Biak Nufor		

7	Perangkat Pengolah Data (PC, Laptop, Printer)	282 it		
---	---	--------	--	--

C. Dana

Anggaran pada DIPA awal Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 yang berasal dari APBN sebesar Rp 34.393.359.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 30.513.759.000,- dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.879.600.000,-.

Selama tahun anggaran 2024 terdapat beberapa kali Revisi DIPA, yang dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4 Perjalanan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
1	24 November 2023	Rp. 33.608.830.000	DIPA Awal	-
2	18 Januari 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi POK 1	• Pergeseran anggaran antar RO dan subkomponen untuk pemeliharaan server dan LAN • Pergeseran anggaran pada kegiatan Layanan Manajemen SDM
3	15 Februari 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi DIPA 1	Revisi Halaman 3 DIPA
4	26 Maret 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi POK 2	• Pergeseran anggaran untuk kebutuhan Tim Kerja • Pergeseran anggaran untuk kebutuhan gaji 13 dan 14 • Pergeseran Anggaran untuk Lembur terminal penumpang dan situs
5	17 April 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi DIPA 2	Revisi Halaman 3 DIPA
6	13 Mei 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi POK 3	• Pergeseran anggaran untuk kebutuhan koordinasi

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
				• Penambahan subkomponen pada RO Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara /PLBD
7	27 Mei 2024	Rp. 33.608.830.000	Revisi DIPA 3	Revisi Halaman 3 DIPA
8	04 Juli 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 4	Revisi Penambahan Gaji dan Tukin
9	10 Juli 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 5	Revisi Halaman 3 DIPA
10	07 Agustus 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi POK 4	Revisi Pergeseran anggaran untuk pemenuhan pagu minus
11	18 September 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi POK 5	• Revisi Pergeseran anggaran untuk pemenuhan pagu minus • Pergeseran anggaran 002
12	10 Oktober 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 6	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA
13	31 Oktober 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi POK 6	• Revisi Lembur PPPK • Revisi Pergeseran anggaran koordinasi untuk pemenuhan pagu minus
14	20 November 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 7	Revisi efisiensi perjadiin (Blokir A)
15	02 Desember 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 8	Revisi Penambahan Volume dan Revisi Hal III DIPA
16	10 Desember 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 9	Revisi Pemutakhiran POK dalam rangka pemenuhan PAGU minus
17	27 Desember 2024	Rp. 34.393.359.000	Revisi DIPA 10	Revisi Pemutakhiran POK dalam rangka pemenuhan PAGU minus

Realisasi anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 33.520.385.189,- atau sebesar 97,46 % dari pagu anggaran sebesar Rp 34.393.359.000,-. Realisasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 29.667.314.140,- (97,23%) dari total anggaran Rp 30.513.759.000,- sedangkan realisasi anggaran bersumber PNBK sebesar Rp 3.853.071.049,- (99,32%) dari total anggaran

Rp 3.879.600.000,-. Keseluruhan sisa anggaran BBKK Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp 846.444.860,- atau 2,46 % dari keseluruhan anggaran.

Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi penerimaan yang bersumber dari Rupiah Murni mengalami penurunan sebanyak 1,33% sedangkan untuk realisasi penerimaan yang bersumber dari PNBP mengalami peningkatan sebanyak 0,44%. Realisasi anggaran BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,33 % bila dibandingkan tahun 2023.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

2.1 DASAR HUKUM

1. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. PP No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
8. PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
9. PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024;
13. Kepmenkes No. 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;
14. Kepmenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
16. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
18. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangannya;

19. Permenkes No.2052 / Menkes / Per/ X / 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
20. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat;
21. Permenkes No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara, Sehat;
22. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
23. Permenkes No 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
24. Permenkes No. 40 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal
25. Permenkes No. 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
26. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
27. Permenkes No 10 Tahun 2023 Organisasi Tentang Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
28. Permenkes No. 2 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014
29. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 Tentang SOTK Kemenkes
30. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
31. *International Health Regulation* (IHR) Tahun 2005
32. Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2020-2024
33. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2.1 Tujuan

Mewujudkan Pelabuhan Sehat melalui upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui :

1. Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik
3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
5. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

6. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
7. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
8. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P

2.2.2 Sasaran

Sasaran strategis dari penyelenggaraan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu gerbang Negara di BBKK Tanjung Priok yaitu : Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara sebesar 100%", dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 0,92 pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 98,5% pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 1 pada akhir tahun 2024;
- d. Nilai kinerja anggaran yaitu 85 pada akhir tahun 2024;
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu 93,5 pada akhir tahun 2024;
- f. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 82,5 pada akhir tahun 2024;
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 82,5% pada akhir tahun 2024.
- h. Persentase Realisasi Anggaran yaitu 96% pada akhir tahun 2024.

2.2.3 Indikator

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
				2024
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0,92
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98,5%

		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,5
		6	Kinerja implementasi WBK satker	82,5
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82,5%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	96%

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

3.1 STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN

Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Strategi Pelaksanaan Tujuan

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1.	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	a) Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran; b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, misalnya PT. Pelni, Bea Cukai, Balai Besar Karantina Pertanian, PT. Pelindo, dan KSOP; c) Melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas kesehatan lingkungan dengan kegiatan inspeksi sanitasi alat angkut, tempat-tempat umum, dan pemeriksaan kualitas air bersih/minum, kualitas makanan, serta pencemaran lingkungan; d) Menerbitkan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lingkungan kepada lintas sektor. e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kegiatan secara berkala melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. f) Meningkatkan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah kerja. g) Meningkatkan kewaspadaan dini melalui pengamatan pada website WHO terhadap wilayah/negara terjangkit KKMD/PHEIC. h) Melakukan pemeriksaan sesuai SOP Pengawasan Kapal dalam Karantina. i) Meningkatkan pengetahuan petugas tentang cara pemeriksaan Kapal dalam Karantina. j) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan target dan realisasi kinerja secara berkala melalui laporan rutin yang berisi tentang saran dan rekomendasi perbaikannya. k) Memberikan pelatihan khusus kepada petugas mengenai deteksi dini penyakit dan prosedur penanganan risiko kesehatan. l) Mengimplementasikan sistem digital untuk pelaporan dan pencatatan inspeksi alat angkut. m) Mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk mengintegrasikan data deteksi risiko secara real-time antara pelabuhan/bandara dan PLBDN. n) Melibatkan pengguna jasa (penumpang, operator alat angkut, dan pelaku usaha) dalam upaya deteksi risiko melalui kampanye dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target kegiatan juga berkontribusi pada keberhasilan dalam pengendalian faktor risiko; c. Melakukan pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan terkait kesehatan lingkungan di area pelabuhan/ kepada seluruh lintas sektor terkait, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Beacukai, Imigrasi, Badan Pengelola Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran; e. Pencegahan dan penanggulangan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu di pintu masuk negara dan wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan; f. Melakukan penguatan jejaring kerja dan kemitraan; g. Menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan lingkungan kepada lintas sektor dan saran tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan; h. Meningkatkan peran operator pelabuhan dalam menciptakan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan mencegah risiko penularan penyakit; i. Pemeriksaan higiene sanitasi alat angkut dan pengawasan tindakan sanitasi alat angkut seperti disinfeksi, disinfeksi, fumigasi maupun dekontaminasi; j. Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum, gedung, bangunan dan perusahaan di pelabuhan dan bandar udara, serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi sanitasi tempat-tempat umum; k. Inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di pelabuhan dan bandar udara serta saran-saran perbaikan dari kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis; l. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan; m. Melakukan penyuluhan Kesehatan kepada awak kapal untuk menghilangkan faktor risiko kesehatan yang mungkin ada
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk penanggulangan kasus PHEIC b. Melakukan pengumpulan, analisa data, diseminasi hasil surveilans c. Penyediaan bahan dan peralatan yang memadai dan sarana prasarana yang memadai d. Melakukan penyelidikan epidemiologi kasus terskrining/suspek, e. Melakukan penanganan kasus suspek sesuai dengan SOP f. Menyampaikan rekomendasi hasil kegiatan pengendalian vektor dan sanitasi lingkungan kepada operator pelabuhan/bandar g. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, misal : syahbandar, otoritas pelabuhan, otoritas bandara, pengelola pelabuhan, pengelola bandara, imigrasi, bea cukai, balai besar karantina pertanian, balai besar karantina ikan, maskapai, agen pelayaran, puskesmas/rumahsakit/klinik sekitar pelabuhan/ bandara, rumah sakit rujukan Covid 19, dll.

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
4.	Nilai kinerja anggaran	a. Melakukan Rekonsiliasi data, melakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pengisian emonev DJA. Pemantauan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan, sehingga meminimalisir adanya gap antara rencana penarikan dana/ rencana pelaksanaan kegiatan dengan realisasinya. b. Koordinasi Tim kerja yang ada di BBKK Tanjung Priok dengan penanggungjawab keuangan dalam proses pencairan anggaran berjalan dengan baik sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	a. Telah Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan. b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; c. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dilakukan revolving dalam jangka waktu satu bulan sekali dengan syarat sudah mencapai 50%; d. Tidak adanya keterlambatan penginputan ADK Kontrak di Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); e. Tidak ada kesalahan/pengembalian SPM: operator melakukan pengecekan terhadap redaktur, nomer rekening penerima, akun yang digunakan sebelum melakukan penginputan SPM; f. Menetapkan metode perhitungan capaian <i>output</i> untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk <i>output</i> teknis yang memiliki; g. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian <i>output</i> dengan penyerapan anggaran; h. Melakukan pengisian data capaian <i>output</i> bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir); i. Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi; j. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian <i>output</i>.
6.	Kinerja implementasi WBK satker	a. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas; b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala c. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan <i>pre assessment</i>; d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat; e. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
7.	Persentase ASN yang	a. Penugaskan pegawai yang belum mengikuti pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
	ditingkatkan kompetensinya	b. Menyediakan alokasi anggaran untuk mengikuti pelatihan melalui DIPA BBKK Tanjung Priok; c. Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN di lingkungan BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi pendidikan maupun kompetensi jabatan melalui program tugas belajar dan mengikuti pelatihan jabatan fungsional.
8.	Persentase Realisasi Anggaran	a. Menyusun perencanaan anggaran lebih baik lagi; b. Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD yang ditetapkan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun non teknis; e. Melakukan revisi internal dan pemutakhiran data ke Kanwil DJPBn.

3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN

- Proses pengawasan dalam rangka melaksanakan kegiatan surveilans Epidemiologi terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang cukup serta memadai
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait surveilans epidemiologi belum maksimal, sehingga terjadi selisih data akibat kurang disiplinnya petugas dalam tertib administrasi diantaranya masih ada petugas yang tidak entri data lengkap di aplikasi SE
- Pengetahuan petugas masih kurang dalam hal ini pegawai baru yang ditugaskan melaksanakan kegiatan pelayanan sehingga petugas hanya melaksanakan kegiatan yang ditugaskan atas sepengetahuan pribadi saja.
- Pelaksanaan kegiatan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan yang masih belum dipahami sepenuhnya.
- Masih ditemukan adanya faktor risiko di alat angkut karena masih rendahnya kesadaran dari awak kapal dalam menjaga kesehatan kapal dari faktor risiko yang mungkin terbawa
- Proses pemeriksaan kapal dengan status karantina terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang memadai/ *safety* bagi petugas apalagi saat cuaca tidak kondusif, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus.
- Kemampuan Agen Pelayanan yang berbeda-beda dalam pembuatan dan pembayaran billing sehingga rentan terjadi kesalahan berupa: kekurangan, kelebihan dan kesalahan pembayaran sehingga berpengaruh pada laporan PNB

- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan tertib administrasi dipelayanan dokumen kesehatan kapal belum maksimal, karena kurang disiplinnya petugas dalam tertib administrasi
- i. Aplikasi Surveilans Epidemiologi (SE) yang sudah lama dan tidak ada *maintanance* sehingga tidak bisa digunakan untuk *update* data kapal yang baru
- j. Alat pengolah data berupa laptop dan PC di Tim Kerja 2 yang sering bermasalah karena pengadaan yang cukup lama
- k. Permohonan izin RS/ Klinik pada pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV yang meningkat drastis karena tidak adanya aturan UU maupun PERDIRJEN dalam hal pembatasan Jumlah izin RS/Klinik
- l. Pemberian ICV yang terbatas harus dibagi rata ke RS/Klinik pelaksana vaksinasi internasional yang semakin meningkat drastis

3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

1. Membuat Program digitalisasi data tercetus dari Tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran untuk diaplikasikan kedalam penyajian data bekerjasama dengan Tim IT Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan membuat aplikasi bank data dengan sebutan SABATA Surveilans
2. Meningkatkan advokasi peraturan kekarantinaan Kesehatan kepada perusahaan pelayaran, awak kapal dan kapal yang singgah di pelabuhan
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja lintas sektor khususnya di bidang Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan
4. Meningkatkan pelaksanaan respon cepat terhadap masalah-masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan PHEIC dan melakukan penanganan penanganan di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok
5. Monitoring dan evaluasi pengumpulan data yang dilaksanakan secara rutin kepada seluruh petugas pelayanan
6. Monitoring dan evaluasi pengumpulan data yang dilaksanakan secara rutin kepada seluruh penanggungjawab data surveilans di setiap tim kerja dan wilayah kerja
7. *Briefing* pagi oleh perwira jaga kepada seluruh petugas sebelum melaksanakan kegiatan pelayanan
8. Mengembangkan sumber daya manusia antara lain dengan melaksanakan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi dan penindakan Pelanggaran Kekarantinaan

9. Memperkuat surveilans dan epidemiologi dan aplikasi teknologi dengan melaksanakan deteksi dini dan penanganan kasus, Sistem Kewaspadaan Dini KLB, surveilans epidemiologi serta pengembangan sistem informasi
10. Penyediaan jaringan internet yang memadai dan perbaikan jaringan secara berkala
11. Pengadaan barang untuk alat pengolahan data
12. Meningkatkan advokasi peraturan kekarantinaan Kesehatan kepada awak kapal dan kapal yang singgah di pelabuhan
13. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja lintas sektor khususnya di bidang keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan
14. Meningkatkan pelaksanaan respon cepat terhadap masalah-masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan PHEIC di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok
15. Sosialisasi dan evaluasi antara Balai Besar Karantina Kesehatan Tanjung Priok dengan Perusahaan Pelayaran secara rutin
16. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin kepada seluruh petugas pelayanan dokumen kesehatan kapal
17. *Briefing* pagi oleh perwira jaga kepada seluruh petugas sebelum melaksanakan kegiatan pelayanan dokumen kesehatan kapal
18. Mengembangkan sumber daya manusia antara lain dengan melaksanakan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
19. Memperkuat surveilans dan epidemiologi dan aplikasi teknologi dengan melaksanakan deteksi dini dan penanganan kasus, Sistem Kewaspadaan Dini KLB, surveilans epidemiologi serta pengembangan sistem informasi
20. Penyediaan jaringan internet yang memadai dan perbaikan jaringan secara berkala
21. Pengadaan barang untuk alat pengolahan data
22. Memaksimalkan informasi melalui media sosial dalam hal pendaftaran, manfaat dan sosialisasi
23. Mempermudah sistem pelayanan vaksinasi lebih efisien
24. Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV
25. Maintenance aplikasi SIMOLI untuk pelayanan verifikasi Rumah Sakit/ Klinik dalam hal vaksinasi internasional dan Penerbitan ICV
26. Mensosialisasikan E- ICV kepada pihak Rumah Sakit/ Klinik
27. Memetakan Rumah Sakit/ Klinik sesuai dengan wilayah
28. Memaksimalkan dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan verifikasi dan visitasi klinik/RS

BAB IV

HASIL KERJA

4.1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok, melalui berbagai Tim Kerja, berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan. Setiap Tim Kerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan BBKK Tanjung Priok, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara, serta penguatan zona integritas untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan karantina kesehatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi dalam sistem pengawasan dan pelayanan. Dengan sinergi antar Tim Kerja, BBKK Tanjung Priok berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan karantina yang prima, transparan, dan berdaya saing guna mendukung kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Tim Kerja terdiri dari :

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
6. Sub Bagian Administrasi Umum

4.1.1 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Dalam mendukung berjalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan pada tahun 2024 maka mendapatkan Pagu anggaran sebanyak Rp. 557.456.610,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah), terdiri dari sumber anggaran RM sebanyak Rp. 24.940.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan anggaran yang bersumber dari PNPB sebanyak Rp. 532.516.610,- (Lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus sepuluh rupiah). Anggaran yang

terealisasi pada tahun 2024 sebanyak Rp. 553.380.993,- (Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari sumber anggaran RM sebanyak Rp. 23.997.100,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan dari sumber anggaran PNPB sebanyak Rp. 529.403.893,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dengan Rincian kegiatan sebagai berikut:

B. Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Tahun 2024 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 142.303.000,- (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah) terdiri dari sumber anggaran RM sebanyak Rp. 8.390.000,- (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sumber anggaran PNPB Rp. 133.913.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), realisasi anggaran sebanyak Rp. 139.754.203,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah), terdiri dari realisasi RM Rp. 7.967.100,- (Tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan realisasi PNPB sebanyak Rp. 131.787.103,- (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Konsultasi Teknis Program Wilker ke Induk

Konsultasi Teknis Program Wilker ke Induk Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dari total pagu Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) sumber anggaran PNPB, realisasi anggaran tercapai 100% yang dialokasikan untuk kegiatan konsultasi teknis program wilker ke Induk sebanyak 30 orang . Kegiatan ini dilaksanakan 5 wilker sebanyak 3 kali masing masing wilker dan dilaksanakan oleh 2 orang.

Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil kegiatan Konsultasi Teknis Program Wilker ke Induk

No	Tanggal Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	09 Januari 2024	Wilker Muara Angke	Konsultasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan terkait keuangan dan anggaran di pelabuhan Muara Angke

2	13 Maret 2024		Konsultasi hasil kegiatan layanan survei faktor risiko TB di wilayah Muara Angke
3	20 JUNI 2024		Konsultasi tentang pengisian variabel data surveilans di tim Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan
4	05 februari 2024	Wilker Marunda	Konsultasi tentang program penyehatan air di wilker marunda
5	13 maret 2024		Konsultasi tentang Pengawasan faktor risiko kesehatan orang khususnya pelayanan pengendalian penyakit tuberkulosis di wilker Marunda
6	2 April 2024		Konsultasi tentang pengawasan faktor risiko lingkungan dan meminta arahan tentang program di wilker Marunda
7	09 Januari 2024	Wilker Muara Baru	Konsultasi tentang program kerja dan kebutuhan pegawai di Wilker Muara Baru
8	24 April 2024		Konsultasi untuk pengarahan program kerja layanan survei faktor penyakit TB di Wilker Muara Baru
9	12 Juli 2024		Konsultasi tentang rencana pelayanan kesehatan dan pelayanan donor darah dalam rangka HUT pelabuhan Nizam Zachman
10	12 Februari 2024	Wilker Kalibaru	Konsultasi tentang rencana kegiatan screening TB paru yang akan dilaksanakan bulan Maret 2024
11	11 Juli 2024		Konsultasi tentang pelabuhan sehat dan pengelolaan PNB
12	24 Oktober 2024		Konsultasi tentang hasil pelaksanaan deteksi dini TB Paru di wilker Kalibaru dan rencana penarikan anggaran dari bulan Oktober- Desember 2024
13	07 Februari 2024	Wilker Sunda Kelapa	Konsultasi tentang anggaran rencana kebutuhan serta sarana dan prasarana di Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa
14	08 Mei 2024		Konsultasi tentang desiminasi informasi pelaksanaan Pengawasan Penumpang di Situasi Khusus Idul Fitri 1445 H di Dermaga Pantai Marina Ancol
15	16 Oktober 2024		Konsultasi terkait kepegawaian di Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol

Output dari pertemuan ini adalah dokumen laporan kegiatan dan desiminasi informasi antara wilker dan induk. *Outcome* kegiatan ini menguatkan jejaring komunikasi dan

informasi yang baik antara Kantor Induk Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan wilkernya serta *impactnya* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok berjalan dengan baik.

2) Konsultasi Teknis Program Induk Ke Pusat

Konsultasi Teknis Program Induk Ke Pusat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dari total pagu Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) sumber anggaran PNPB, realisasi anggaran tercapai 100% yang dialokasikan untuk kegiatan konsultasi teknis program Induk ke pusat sebanyak 30 orang . Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 kali masing masing dan setiap tim dilaksanakan oleh 3 orang.

Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil kegiatan Konsultasi Teknis Program Induk ke Pusat

No	Tanggal Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	29 Januari 2024	Aah Nurliah, S.Si, Apt, M.K.K.K Indah Septiyanti Nur Aini, AMF Anderson Panjaitan, S.Ak	Konsultasi penilaian KKE untuk desk SAKIP di bulan Maret 2024
2	19 April 2024	Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid Fredrik Lona Djara, SKM Teti Herawati, SKM	Konsultasi ke biro hukum dan organisasi Kementerian Kesehatan dalam rangka meminta pendampingan narasumber dalam pertemuan PPNS yang akan dilaksanakan
3	25 Juli 2024	Junita Manik, SKM, M. Kes Setiana, SKM Junita Manjasari M, SKM	Konsultasi tentang komponen penilaian penyelenggaraan pelabuhan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dalam rangka persiapan penilaian verifikasi lapangan
4	09 Juli 2024	Rustama Sihite, SKM Teti Herawati, SKM Elisabeth BF Simanjuntak, SKM	Konsultasi mengenai pelaporan SKDR serta cara penggunaan aplikasi SKDR
5	11 September 2024	dr. Theresia Hermin SW Enizarti, SKM, MKM Fatma Zahara Yulia Darutantri, SKM	Konsultasi Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) dan evaluasi terkait kegiatan Kekarantinaan di Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok

6	16 Oktober 2024	Agus Sudarman, SKM, MKM dr. Theresia Hermin SW	Konsultasi dan penjelasan tentang proses bisnis BBKK Tanjung Priok ke Pimpinan Itjen
7	23 oktober 2024	Dra. Atik Yuliharti, M.Kes M. Fajar Subechi, SKM, MKM Yoga Sasmaya Wahyudi	Konsultasi tentang inovasi chatboot dan call center terintegrasi kepada sesditjen P2P bapak Yudhi Pramono, MARS.
8	06 Desember 2024	Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid Teti Herawati, SKM Atim, SKM	Konsultasi tentang pelaporan SKDR pada situasi khusus ke Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan
9	12 Desember 2024	dr. Juli ML. Siahaan, M.K.M. Sri Wahyudi, A.Md.Kep. Sanny Manalu	Konsultasi tentang penggunaan E-ICV di BBKK dan Fasyankes Binaan BBKK

Output dari pertemuan ini adalah dokumen laporan kegiatan dan desiminasi informasi antara Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan Kementerian Kesehatan selaku induk. *Outcome* kegiatan ini menguatkan jejaring komunikasi dan informasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dapat berjalan dengan baik.

3) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan

Implementasi SSM pengangkut merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja system logistik nasional, memperbaiki iklim, investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Transportasi merupakan backbone dari perbaikan kinerja logistik yang terus digencarkan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem Logistik Nasional. Demi menjamin kelancaran Implementasi SSM pengangkut, seluruh instansi terkait akan menyediakan layanan helpdesk baik secara fisik maupun online untuk layanan pengaduan dari pengguna jasa terkait permasalahan dalam penerapan SSM pengangkut setiap wilayah. Dengan demikian Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Sosialisasi, evaluasi dan simulasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

a) Sosialisasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan

Penataan ekosistem nasional di Pelabuhan melalui system single billing merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan yang lebih terintegrasi di Pelabuhan, konsep single billing mengacu pada penggabungan berbagai layanan dan biaya yang terkait dengan kegiatan di Pelabuhan menjadi satu tagihan tunggal yang dikeluarkan kepada pengguna atau pelanggan. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi terkait pembuatan single billing kepada pegawai BBKK Tanjung Priok dan Stake Holder yang ada di Wilayah BBKK Tanjung Priok. Kegiatan sosialisasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam rangka penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan dilaksanakan di Wilker Sunda Kelapa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan peserta sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari BBKK Tanjung Priok, Stake holder dan dari Kementerian Keuangan, narasumber yang dihadirkan 1 orang dari Lembaga Nasional Single Window. Anggaran yang digunakan bersumber dari PNBK dengan Pagua anggaran sebanyak Rp. 11.120.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah), realisasi anggaran yang tercapai pada kegiatan ini yaitu sebanyak Rp. 11.036.500,- (Sebelas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

b) Evaluasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan

Kegiatan evaluasi SSM single billing dan interkoneksi dalam rangka penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan evaluasi PNBK pada layanan dokumen kekarantinaan kesehatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, output dari kegiatan tersebut adalah laporan proyeksi PNBK setiap bulan ke Biro keuangan Kemenkeu dilakukan tepat waktu dan persisi, laporan proyeksi dan laporan semester Biro Keuangan dilakukan tepat waktu dan persisi, kepatuhan penyampaian laporan Kementerian/Satker, Sosialisasi penggunaan Qris pembayaran PNBK akan ditindaklanjuti, ketentuan jatuh tempo piutang PNBK oleh Satker, Pelaporan PNBK tidak dilakukan secara manual. Kegiatan evaluasi PNBK pada layanan dokumen kekarantinaan kesehatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dilaksanakan di Wilker Sunda Kelapa diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Direktorat P2P Kemenkes 2 (dua) orang dan dari BBKK Tanjung Priok sebanyak 23 orang peserta, Narasumber dihadirkan dari Direktorat PNBK Kementerian

Keuangan, kegiatan evaluasi SSM single billing dan interkoneksi dalam rangka penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan ini dianggarkan dari sumber anggaran PNBPN dengan Pagu anggaran Rp. 7.755.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran 100% yaitu Rp. 7.755.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

c) Simulasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan

Kementerian Kesehatan saat ini telah membuat 6 (enam) pilar transformasi Kesehatan Dimana salah satu pilar transformasi Kesehatan tersebut adalah transformasi teknologi Kesehatan. Guna mendukung pilar tersebut maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan penerbitan dokumen kekarantinaan Kesehatan kapal secara digital pada aplikasi SINKARKES dan pelaksanaan SSM *Single Billing*. Berkaitan dengan hal tersebut maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan kegiatan simulasi SSM Single Billing dan Interkoneksi dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan pada tanggal 30 April 2024 di Hotel Grand Dafam Ancol Jakarta dengan peserta kegiatan sebanyak 58 orang peserta yang terdiri dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan *Stake holder* di wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok serta 2 orang Narasumber dari Lembaga Nasional Single Window dan Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan tersebut dianggarkan dari sumber PNBPN dengan Pagu anggaran sebanyak Rp. 38.770.000,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran 100% yaitu Rp. 38.770.000,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

d) Kegiatan koordinasi Surveilans Epidemiologi

Program digitalisasi data tercetus dari Tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran untuk diaplikasikan kedalam penyajian data bekerjasama dengan Tim IT Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan membuat aplikasi bank data dengan sebutan SABATA dimana SABATA akan diintegrasikan kedalam olahan data dalam bentuk lookerstudio dan juga google site, agar lebih memudahkan dalam pembacaan data dan penyajian data yang cerdas terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok. Kegiatan pertemuan koordinasi surveilans epidemiologi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 dengan

peserta pertemuan sebanyak 54 orang peserta yang berasal dari KSOP Utama Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara serta pegawai Balai Besar Kekarantina Kesehatan Tanjung Priok, kegiatan pertemuan ini dianggarkan dari sumber anggaran PNBK sebanyak Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) dan Pagu sumber anggaran RM sebanyak Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), anggaran tersebut terealisasi 100%.

e) Perjalanan Jawa Barat – Banten

1. Mengikuti kegiatan Desk Penyusunan Petunjuk Perencanaan Program P2P TA 2025, kegiatan penyusunan RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan KLB dan Wabah dan Melaksanakan Desk, Penelitian dan Review RKA-K/L pagu anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2025. Anggaran yang digunakan bersumber dari PNBK dengan Pagu anggaran sebanyak Rp. 22.528.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 22.499.900 (Dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Mengikuti kegiatan Desk Penyusunan Petunjuk Perencanaan Program P2P TA 2025 di Hotel THE 101 Suryakencana, Bogor sebanyak 2 (dua) orang pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2024. Anggaran kegiatan yang terealisasi sebanyak Rp. 4.649.300,- (Empat juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Penyusunan RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan KLB dan Wabah di Ruang Rapat BKK Kelas I Bandung tanggal 10 s.d. 12 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 2.861.100,- (Dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah)
- Melaksanakan Desk, Penelitian dan Review RKA-K/L pagu anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 24 s.d 26 Juli 2024, di Hotel Horison Ultima Bekasi sebanyak 3 (tiga) orang. Realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 6.463.800,- (Enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

- Melaksanakan kegiatan Desk, Penelitian dan Review RKA-K/L pagu anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 7 s.d 10 Oktober 2024, di Hotel Horison Ultima Bekasi sebanyak 3 (tiga) orang. Realisasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.525.700,- (Delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
2. Mengikuti pertemuan penyusunan penyesuaian peta proses bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menjadi peta proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Mengikuti pertandingan bulu tangkis dalam rangka memperingati HUT ke – 101 Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kegiatan koordinasi terkait Webinar Nasional Travel Health dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 dan Penyusunan Logical Framework Bidang Kekarantinaan Kesehatan, kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran RM dengan Pagu anggaran sebanyak Rp. 5.460.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 5.417.100,- (Lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Mengikuti pertemuan penyusunan penyesuaian peta proses bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menjadi peta proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (BKK) di Ruang Rapat Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sebanyak Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - Mengikuti pertandingan bulu tangkis dalam rangka memperingati HUT ke – 101 Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat tanggal 23 – 25 September 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sebanyak Rp. 2.301.600,- (Dua juta tiga ratus seribu enam ratus rupiah)
 - Kegiatan koordinasi terkait Webinar Nasional Travel Health dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sebanyak Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Penyusunan Logical Framework Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Ruang Rapat BBKK Soekarno Hatta, Area Perkantoran bandara Soekarno Hatta, sebanyak 3 (tiga) orang pada tanggal 29 Oktober 2024. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp.1.429.500,- (Satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

f) Perjalanan Selain Jawa Barat – Banten

1. Kegiatan Orientasi Pengambilan Keputusan Berbasis Data Bagi Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta pada tanggal 04 s.d 06 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Anggaran yang digunakan bersumber dari PNPB dengan pagu anggaran sebanyak Rp. 5.744.600,- (Lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan anggaran yang terealisasi mencapai 100% yaitu sebanyak Rp. 5.744.600,- (Lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
2. Mengikuti kegiatan penyusunan rencana kontigensi penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat Pelabuhan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Pangkal pinang sebanyak 2 (dua) orang pada tgl 18 s.d. 20 Nopember 2024. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNPB sebanyak Rp. 9.820.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 9.766.299,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
3. Kegiatan Koordinasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam rangka digitalisasi data kekarantinaan kesehatan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2024 di BBKK Denpasar, Bali sebanyak 2 (dua) orang menggunakan anggaran sebanyak Rp. 12.501.110,- (Dua belas juta lima ratus satu ribu seratus sepuluh rupiah), serta kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Program P2P Tahun 2024 (RAKONTEK) pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) orang menggunakan anggaran sebanyak Rp. 8.119.094,- (Delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh empat rupiah). Dari 2 (dua) kegiatan tersebut menggunakan anggaran dari sumber anggaran PNPB dengan Pagu anggaran sebanyak Rp. 20.622.000,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan total terealisasi kegiatan tersebut sebanyak Rp. 20.620.000,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Kegiatan konsultasi pra uji kompetensi dan uji kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan standar kinerja pegawai

sesuai jabatan fungsional yang diduduki. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) orang peserta uji kompetensi yang akan naik jenjang ke jabatan fungsional Dokter Ahli Muda dan jabatan fungsional Epidemiolog Ahli Madya. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut dari sumber anggaran PNBPNP sebanyak Rp. 3.488.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebanyak Rp. 3.485.700,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

g) Perjalanan Dalam Kota > 8 Jam

1. Kegiatan Desk, Penelitian dan Reviu Rka-K/L Pagu Anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Gedung Record Center, Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 19 Juli 2024. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBPNP sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
2. Kegiatan Desk, Penelitian dan Reviu Rka-K/L Pagu Anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Gedung Record Center, Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat, 1 (satu) orang sebanyak 3 (tiga) kali dari tanggal 21 Juli 2024, tanggal 02 Oktober 2024 dan pada tanggal 04 Oktober 2024. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari RM sebanyak Rp. 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%

h) Perjalanan dalam Kota

1. Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada Tanggal 16 April 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBPNP sebanyak Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
2. Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengenai persiapan kegiatan reviu dokumen rencana kontijensi di lingkungan Balai Besar Kekekarantina Kesehatan di Direktorat Surveilans dan Kekekarantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan pada tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBPNP sebanyak Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
3. Mengikuti penilaian Mansoskul yang merupakan salah satu materi yang dibahas dalam pelatihan untuk mengembangkan kompetensi manajerial dengan menggunakan *Computer Assisted Tes*, 28 Agustus 2024 Sebanyak 1 Orang.

Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBP sebanyak Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%

4. Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Wilayah Kerja Muara Baru, Sunda Kelapa dan Muara Angke terkait penggunaan aplikasi SABATA Surveilans pada tanggal 04 Desember 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBP sebanyak Rp. 1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
 5. Koordinasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit di Wilker Kali Baru dan Marunda terkait penggunaan aplikasi SABATA surveilans di wilayah kerja pelabuhan laut Marunda pada tanggal 10 Desember 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNBP sebanyak Rp. 680.000,- (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
 6. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut penyelidikan epidemiologi mengenai penyakit leptospirosis di Wilayah Muara Baru pada tanggal 4 Desember 2024 sebanyak 3 orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari RM sebanyak Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
 7. Koordinasi dengan Wilker Sunda Kelapa mengenai pelaporan SKDR pada Situasi khusus NATARU Tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 2 orang. Koordinasi dengan Wilker Sunda Kelapa mengenai pelaporan SKDR pada Situasi khusus NATARU Tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari RM sebanyak Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%
 8. koordinasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam rangka upacara tabur bunga hari kesehatan nasional (HKN) ke 60 di TPU sandiego Hills karawang tgl 5 Nopember 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari RM sebanyak Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%.
- i) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Kegiatan Pelatihan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional (P3VI) di Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2024 sebanyak 2 orang. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari RM sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi 100%.

C. Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut

Kegiatan Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut di Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Tahun 2024 dengan Pagu anggaran Rp. 86.617.610,- (Delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) terdiri dari sumber anggaran RM sebanyak Rp. 16.550.000,- (Enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sumber anggaran PNBK Rp. 70.067.610,- (Tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), total realisasi anggaran sebanyak Rp. 85.141.610,- (Delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan realisasi sumber anggaran RM Rp. 16.010.000,- (Enam belas juta sepuluh ribu rupiah) dan sumber anggaran PNBK Rp. 69.131.610,- (Enam puluh Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM

a) Perjalanan Dinas Luar Jawa

Melaksanakan perjalanan Dinas ke Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam rangka Terlaksananya kegiatan pengembangan digitalisasi data kekarantinaan kesehatan terkait Penyelidikan Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon pada situasi KLB/wabah/KKM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) orang staf Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2024 dengan menggunakan anggaran sebanyak Rp. 12.189.610,- (Dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari total pagu Rp. 12.189.610,- (Dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) sumber anggaran PNBK, realisasi anggaran tercapai 100%. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah sebagai berikut

- Mengetahui sistem digitalisasi SKDR dan PE di BBKK Denpasar
- Diketahui gambaran tentang hambatan, kendala dan tantangan dalam pengembangan sistem informasi digitalisasi di BBKK Denpasar
- Diperolehnya langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan digitalisasi sistem informasi di BBKK Tanjung Priok di tahun mendatang.

b) Perjalanan Dinas Jawa Barat – Banten

Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dengan 2 (dua) orang staf melaksanakan perjalanan dinas ke Balai

Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2024, anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 1.760.000,- dari Pagu anggaran sebanyak Rp. 1.760.000,- bersumber dari PNBPN anggaran terealisasi 100%. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta yaitu :

- Membuat global framework secara terperinci masing-masing perwakilan dari BBKK/BKK membuat group untuk mengidentifikasi frame work sesuai arahan dari ditjen P2P
- Masing-masing group yang terdiri dari tim kerja 1 yaitu Tim Kerja Surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan, tim kerja 2 yaitu Faktor Risiko Pengawasan Alat Angkut dan Barang, Tim Kerja 3 Pengawasan Faktor risiko Kesehatan Lingkungan dan Tim Kerja 4 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan orang, Kegawatdaruratan dan situasi khusus
- Setelah membuat global Frame work hasil dari diskusi group tersebut dipaparkan untuk dibahas dan didiskusikan Bersama -sama.

c) Perjalanan Dinas Dalam Kota

Anggaran perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan untuk kegiatan *Emergency Call*, konsolidasi data ke Puskesmas dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM, Penyelidikan kasus leptospirosis, menghadiri Hari Kesehatan Nasional Festival inovasi Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 dan Bimbingan teknis ke Wilker Muara Angke dalam rangka rekonsiliasi data Natal dan Tahun Baru kedalam aplikasi SABATA Surveilans. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Pagu anggaran Rp. 7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bersumber dari PNBPN. Kegiatan *Emergency Call* dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 7 kali namun penyerapan anggaran *Emergency Call* hanya sebanyak 3 kali karena 4 kegiatan lainnya dilaksanakan di jam kerja atau jam piket lembur dan dilaksanakan oleh petugas piket lembur. Kegiatan *Emergency Call* yang diserap anggarannya yaitu pada tanggal 9 Januari 2024 melakukan Penyelidikan Epidemiologi pada situasi KLB/Wabah/ KKM dan pelayanan Kesehatan terhadap awak kapal MV. Apollo Twin ABK MV. Apolo Twin, pada tanggal 22 Januari 2024 Penyelidikan Epidemiologi pada situasi KLB/ Wabah/ KKM dan pelayanan Kesehatan terhadap KM. Meratus Sampit dan pada tanggal 15 Februari 2024 Penyelidikan Epidemiologi pada situasi KLB/

Wabah/ KKM dan evakuasi terhadap awak kapal MV. Diamond Indah yang meninggal dunia. Keteranganannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 3 Kegiatan Emergency Call Wilayah Pelabuhan

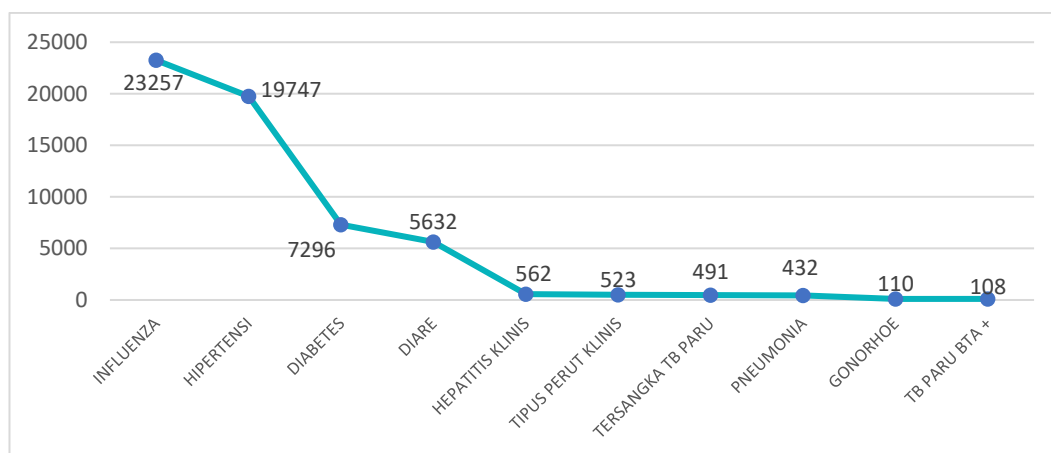
No.	Tanggal	Kegiatan	Petugas	Kronologis
1.	9 Januari 2024	Evakuasi Kecelakaan Kerja ABK MV.Apolo Twin	1. dr.Juli Maretha L.S, MKM 2. Fredrik Lona Djara, SKM 3. dr. Hestilin K.S 4. Tesar Priatma Anas	- Posisi kapal berada di zona karantina (Luar dam) sejauh 7 mill - Datang dari Port Kelang, jumlah crew kapal sebanyak 20 orang - Salah satu awak kapal mengalami kecelakaan kerja - Diagnosa: Trauma Capitis - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC - Penanganan : Rujuk ke RS PMC Jakarta Utara untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut
2.	22 Januari 2024	Evakuasi orang tenggelam di perairan laut Tanjung Priok KM. Meratus Sampit	1. Dwie Meiningwati 2. M.Zahri 3. Sri Wahyudi 4. Fredrik Lona Djara,SKM 5. Yulia Darutantri, SKM 6. Jumadi	- Posisi kapal berada di laut, kapal MV. Meratus Sampit menemukan orang tenggelam di perairan Tanjung Priok pada saat melakukan perjalanan dari Pelabuhan Banjarmasin ke Pelabuhan Tanjung Priok - Diagnosis: Pasca <i>Hipotermi</i> , <i>Vulnus Excoriasi</i> di leher kanan - Penanganan: Rujuk ke RSUD Koja Jakarta Utara untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC
3.	15 Februari 2024	Evakuasi ABK MV.Diamond Indah meninggal dunia	1. dr.Dwie Meiningwati 2. Fredrik Lona Djara, SKM dan 3. Yulia Darutantri, SKM 4. Uli Rohati Siregar, SKM. MKM	- Posisi kapal di laut dalam perjalanan dari Pelabuhan Yeosu, Korea Selatan menuju perairan Tanjung Priok - Crew MV. Diamond yang meninggal dunia pada Tanggal 07 Februari 2024 pukul 20.00 - Diagnosis : infark Miokard - Penanganan: Jenazah dibawa ke rumah duka RS.Cipto Mangunkusumo Jakarta - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC

			5. Jumadi 6. Idrus	
4.	13 Juni 2024	Evakuasi Penumpang Meninggal di Kapal Srikandi Line	1. M. Jamil 2. Fardhy Nur 3. Wahid 3. Hendra	- Penumpang meninggal di kapal KM. Srikandi Line - Penumpang tiba tiba tidak sadarkan diri, almarhum tidak mempunyai riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung ataupun riwayat penyakit menular. - Petugas BBKK Tanjung Priok menerbitkan surat izin angkut jenazah yang kemudian di bawa menggunakan mobil jenazah yang sudah disediakan agen pelayaran KM. Srikandi Line - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC
5.	15 Agustus 2024	Evakuasi Jenazah MT. ES JEWEL	1. Yoga Sasmaya 2. Agi Gunawan 3. Riri Saifudin	- Kapten kapal Ne Mon Latt usia 54 Tahun, Laki – laki, warganegara Myanmar meninggal setelah makan malam pada tanggal 15 Agustus 2024 kurang lebih pukul 19.30 setelah muntah dan susah nafas - Tanggal 16 Agustus 2024 pukul 02.30 <i>Local Time</i> korban ditemukan sudah tidak bernyawa - Diagnosa : <i>infark Miokard</i> - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC
6.	18 Agustus 2024	Evakuasi Jenazah Nahkoda Kapal KM. Tidar	1. Fredrik Lona Djara	- Posisi kapal berada di laut saat kapal dalam pelayaran dari pelabuhan Kijang menuju Tanjung Priok tgl 17 Agustus 2024 jam 19.45 WIB Petugas Kesehatan Kapal KM. Tidar, Pada jam 19.45 petugas medis Di PA untuk menghubungi anjungan, saat menghubungi anjungan petugas medis kapal diarahkan ke kamar nahkoda karna beliau tidur tidak bangun bangun - Pada jam 19.47 WIB petugas kesehatan kapal mendatangi kamar cabin nahkoda No.8000 saat di cek respon nahkoda tetap diam dan setelah itu dilakukan pemeriksaan, setelah petugas medis kapal melakukan pemeriksaan maka menyatakan

				nahkoda atas nama Capt. Charles Roriwo telah meninggal dihadapan Pelayan Nahkoda, ditandai dengan henti nafas, tensi darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, pupil mata melebar tidak ada respon terhadap reflek cahaya - Jenazah di bawa ke RSCM untuk di otopsi, dicurigai serangan jantung, karena almarhum operasi bypass jantung Tahun 2006 dan aktif mengkonsumsi obat - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC
7.	7 Desember 2024	Evakuasi jenazah MV. Express Argentina	1. Fredrik Lona Djara 2. Agi Wibisono 3. Agung Setiadi	- Posisi : LD - Nama alm. Sergei Matveev, usia 39 Thn (L) - Kewarganegaraan : Rusia - Sebab kematian : <i>Cardiac Arrest</i> - Tidak terdeteksi penyakit PHEIC

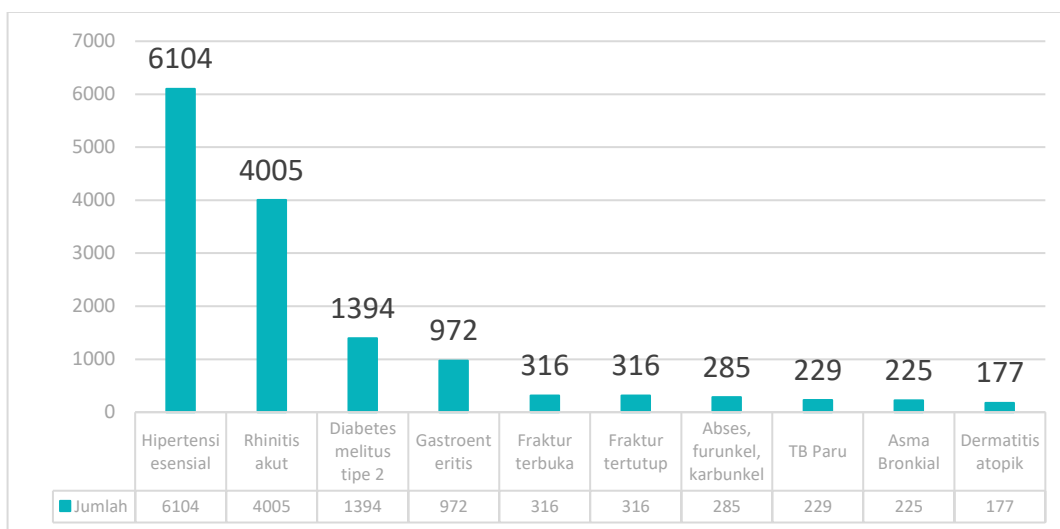
- Melaksanakan konsolidasi data ke Puskesmas Tanjung Priok dan Puskesmas Cilincing terkait data penyakit yang mengakibatkan Kejadian Luar Biasa dalam rangka mengantisipasi kejadian KLB di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dilaksanakan oleh staf Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan sebanyak 16 kali dan masing-masing Puskesmas dilaksanakan oleh 2 orang staf Tim Kerja I. *Output* kegiatan ini adalah laporan data penyakit (ICD 10) berupa hasil olahan data yang disajikan dalam bentuk 10 besar penyakit berupa grafik dan analisis yaitu sebagai berikut:

Grafik 4. 1 Data Penyakit di puskesmas Tanjung Priok Tahun 2024



Grafik 1.3 adalah grafik data penyakit di puskesmas Tanjung Priok selama tahun 2024, dari data ini Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mengetahui penyakit yang ada di sekitar pelabuhan Tanjung Priok dan memantau perkembangannya per bulan. Selain puskesmas Tanjung Priok Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan juga melakukan konsolidasi ke puskesmas Cilincing dan didapatkan data sebagai berikut :

Grafik 4. 2 Data Penyakit di puskesmas Cilincing Tahun 2024



Data penyakit ini tentu sangat berguna sebagai informasi yang penting dalam melaksanakan tupoksi Balai Besar Kekarantinaan kesehatan di pelabuhan Tanjung Priok

- Menindaklanjuti rekomendasi yang telah dibuat oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari terkait pengendalian faktor risiko penyakit Leptospirosis pada Kapal Ikan KM. Bintang Sampurna B. yang berlokasi di Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 15 Nopember 2024 yang dilaksanakan oleh 2 orang staf Tim Kerja I dengan tujuan sebagai berikut:
 - Melaksanakan tindakan penyehatan Kapal Ikan KM. Bintang Sampurna B.
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap seluruh ABK Kapal ikan KM. Bintang Sampurna B
 - Mencegah terjadinya kejadian Leptospirosis lebih lanjut di kalangan awak kapal dan lingkungan Pelabuhan lainnya khususnya Pelabuhan Samudera Muara Baru.

- Menghadiri Hari Kesehatan Nasional Festival inovasi Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 pada bulan Nopember 2024 dilaksanakan oleh 10 staf Tim Kerja I dengan tujuan menghadiri kegiatan tersebut adalah supaya Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dapat mengikuti Langkah-langkah inovasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sehingga Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dapat melaksanakan kegiatan yang optimal dan melaksanakan pelayanan terhadap Masyarakat secara prima.
- Melaksanakan bimbingan teknis ke Wilker Muara Angke dalam rangka rekonsiliasi data Natal dan Tahun Baru kedalam aplikasi SABATA Surveilans pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 staf Tim Kerja I dengan tujuan Wilker Muara angke dapat melakukan input data pengawasan dan pelayanan kesehatan pada situasi khusus Natal dan Tahun Baru kedalam aplikasi SABATA surveilans sehingga dapat terlaksananya respon cepat jika ada penyakit yang mengakibatkan KLB/ Wabah/ KKM.

2) Table Top Exercise Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan “*Table Top Exercise* Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” terkait penyakit leptospirosis di Pelabuhan Muara Baru bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon semua pihak terkait dalam menangani masalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah pelabuhan Muara Baru serta untuk memperkuat koordinasi antara lintas sektor terkait. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak untuk mampu melakukan tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam menghadapi potensi terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru pada tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 2024 dengan 2 (dua) orang Narasumber dan peserta sebanyak 48 peserta diantaranya Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ketua Tim Kerja Kejarantinaan Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes RI, Direktur Utama PT. Perikanan Indonesia, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Kapolsek Pelabuhan Muara Baru, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pelabuhan Muara Baru, Koordinator Pemadam Kebakaran Muara Baru, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru, Kepala BKIPM Wilker Muara Baru, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara, Kepala Puskesmas Penjaringan Jakarta Utara, Direktur Utama RS

Atmajaya Jakarta Utara dan Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok. Pagu anggaran kegiatan tersebut sebanyak Rp. 23.153.000,- (Dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari RM dan PNBK dengan rincian RM Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan PNBK sebanyak Rp. 22.543.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang bersumber dari RM tercapai 100% yaitu Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi yang bersumber dari PNBK tercapai 99 % yaitu sebanyak Rp. 22.365.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

c). *Reviu Dokumen Rencana Kontijensi*

Untuk kesiapsiagaan adanya PHEIC di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol maka perlu adanya penyusunan dokumen Rencana Kontijensi. Pada dokumen ini, yang dimaksud review dokumen adalah mengacu pada proses penyusunan, pembuatan atau revisi dari Dokumen Resmi. Tinjauan dokumen (*document review*) merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Sehingga dokumen rencana kontijensi yang sudah ada dapat sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu adanya masukan dari para stake holder untuk perbaikan dokumen tersebut melalui sebuah pertemuan review dokumen rencana kontijensi di pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol dengan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya penguatan koordinasi antar stake holder yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol.
- Terlaksananya dukungan cegah tangkal penyakit dari instansi terkait / stake holder yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol.
- Terlaksananya kesepahaman dalam cegah tangkal penyakit dari instansi yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol.

Kegiatan *Reviu Dokumen Rencana Kontijensi* dilaksanakan di Wilker Sunda Kelapa dengan jumlah peserta 47 orang yang berasal dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, Tim Kerja Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes RI, PAEI, dan instansi terkait/*stake holder* seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, RSPI Sulianti Saroso, RS Atma Jaya, Kantor Pos Pengawasan Bea Cukai Wilker Pelabuhan Sunda Kelapa , Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Puskesmas Pademangan, Polsek Pelabuhan Sunda Kelapa, PT.

Pelindo Regional 2 Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Perusahaan Pelayaran yang beroperasi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari RM dan PNBPN dengan Pagu anggaran RM sebanyak Rp. 15.940.000,- (Lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Pagu anggaran PNBPN sebanyak Rp. 6.150.000,- (Enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi dari sumber RM tercapai 96,61% yaitu sebanyak Rp. 15.400.000,- (Lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

d). Pengolahan Data Pemeriksaan Orang Barang dan Alat Angkut

Kegiatan Pengolahan Data Pemeriksaan Orang Barang dan Alat Angkut yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait Pengolahan Data Pemeriksaan Orang, Barang, dan Alat Angkut di Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Tanjung Priok dalam rangka menunjang pelaksanaan digitalisasi data Kekeparantinaan Kesehatan melalui aplikasi SABATA Surveilans. Kegiatan ini dilaksanakan di Wilker Marunda pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 Nopember dengan peserta sebanyak 43 peserta yang seluruhnya merupakan pegawai dari Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan Narasumber 1 orang dari Universitas Indonesia. Anggaran Kegiatan Pengolahan Data Pemeriksaan Orang Barang dan Alat Angkut ini bersumber dari PNBPN sebanyak Rp. 19.945.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), anggaran yang terealisasi tercapai 99,9% yaitu sebanyak Rp. 19.925.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal

Kegiatan Layanan Manajemen SDM Internal di Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeparantinaan Tahun 2024 dengan Pagu anggaran Rp. 328.536.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), anggaran tersebut bersumber dari anggaran PNBPN dengan realisasi sebanyak Rp. 328.485.180,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a). Seminar Nasional Penguatan sistem surveilans epidemiologi dan respon kekeparantinaan kesehatan di pintu masuk negara dalam rangka cegah tangkal penyakit Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka Kementerian Kesehatan telah membangun suatu sistem untuk penguatan surveilans kesehatan dalam rangka deteksi dini dan respon terhadap penyakit potensial KLB yaitu *Early Warning Alert and Response System* (EWARS) atau

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan dan pelaporan data sebagai upaya deteksi penyakit secara dini dan respon dengan cepat. Guna mendukung kebijakan tersebut, maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Sistem SKDR Penyakit KLB/Potensial Wabah Di Pintu Masuk Negara". Tujuan dari kegiatan Seminar Nasional Penguatan sistem surveilans epidemiologi dan respon kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dalam rangka cegah tangkal penyakit ini adalah untuk mengidentifikasi peran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok serta sektor lainnya yang terlibat dalam memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di pintu masuk negara, untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai konsep dan fungsi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam pelaporan penyakit potensial KLB / wabah di pintu masuk negara, meningkatkan kapasitas petugas dalam menggunakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam pelaporan penyakit potensial KLB/ wabah di pintu masuk negara dan untuk mendorong terciptanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan dan implementasi strategi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang efektif. Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 di Hotel Harris Kelapa Gading dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang peserta yang diantaranya dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Puskesmas Tanjung Priok serta dari Puskesmas Cilincing. Kegiatan Seminar Nasional Penguatan sistem surveilans epidemiologi dan respon kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dalam rangka cegah tangkal penyakit mengundang 3 orang narasumber yang terdiri dari Direktorat P2P Kementerian Kesehatan RI, FKM Universitas Indonesia dan dari Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Anggaran kegiatan ini bersumber dari PNBP sebanyak Rp. 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anggaran tersebut 100% terealisasi yaitu sebanyak Rp. 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b). *On The Job Training* Pengendalian KLB dan Wabah

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebagai penyedia layanan kesehatan di Pelabuhan Tanjung Priok memiliki kewajiban untuk selalu siap sedia ketika terjadi kasus kegawatdaruratan berpotensi kejadian luar biasa (KLB) / wabah di Wilayah Sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, baik yang berlokasi di darat ataupun di laut.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas dalam pengendalian kejadian kegawatdaruratan berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/ wabah maka dibutuhkan pelatihan/ simulasi secara berkala. Kegiatan *On The Job Training* Pengendalian KLB dan Wabah dilaksanakan di Hotel Kimaya Bandung pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 dengan peserta sebanyak 42 orang dari Balai Besar Kekekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan narasumber sebanyak 6 orang narasumber yang terdiri dari BBKK Tanjung Priok 3 orang narasumber, 2 orang Narasumber dari Universitas Indonesia dan 1 orang Narasumber dari Researcher at National Research and Innovation Agency (BRIN). Materi yang disampaikan yaitu tentang Pelayanan publik dan zona integritas di BBKK Tanjung Priok, Surveilans dan penyelidikan epidemiologi penyakit menular potensial KLB dan wabah, Management kasus penyakit menular potensial KLB dan KLB, Pengelolaan faktor risiko pengendalian lingkungan pada saat pra kejadian dan pasca wabah dan KLB, Komunikasi risiko serta kerjasama tim dalam penanggulangan penyakit menular potensial KLB dan wabah serta studi kasus. Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari PNPB dengan Pagu anggaran Rp. 197.400.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), realisasi anggaran 100% sebanyak Rp. 197.400.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

c). Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang epidemiologi dan karantina

1). Pertemuan Nasional Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Penyakit Menular di 38 Provinsi

Tujuan dari mengikuti Pertemuan Nasional Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Penyakit Menular di 38 Provinsi yaitu diketahui Gambaran capaian hasil pelaksanaan implementasi SKDR, diketahui Gambaran tentang hambatan, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, diperolehnya kesepakatan mengenai langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ditahun mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Harris Batam pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2024 yang diikuti oleh 4 orang pegawai Balai Besar Kekekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok. Pagu anggaran yang digunakan bersumber dari PNPB dengan Pagu anggaran sebanyak Rp. 27.480.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 27.465.480,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

2). Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN)

Mengikuti Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang epidemiologi dan karantina serta mengikuti pembahasan peran penting perkembangan ilmu epidemiologi dalam pengendalian penyakit. Hasil dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak melakukan surveilans pengawasan dipintu masuk dan Masyarakat, harus membuat laporan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah kedalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit menular yang meresahkan Masyarakat tersedia di link web WHO, sehingga dapat mengakses penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/ KLB, laporan penyakit mingguan dapat diakses di link emerging infeksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ini bermanfaat kepada seluruh tenaga Kesehatan dan Masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok sebanyak 10 orang pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2024 di Hotel Harris Ciumbuleuit Bandung yang dianggarkan dari sumber anggaran PNBPN sejumlah Rp. 38.451.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 38.414.700,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

d). *On The Job Training* digitalisasi data Surveilans Epidemiologi

Dalam rangka cegah tangkal penyakit maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok salah satunya adalah penguatan pengelolaan data surveilans epidemiologi di pintu masuk negara secara digitalisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pengumpulan dan pengolahan data pada sarana pelayanan kesehatan. Dengan demikian Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mengadakan kegiatan *On The Job Training* digitalisasi data Surveilans Epidemiologi pada tanggal 20 Desember 2024 di ruang rapat Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan peserta sejumlah 27 orang peserta yang terdiri dari BBKK Tanjung Priok, Puskesmas Tanjung Priok dan Puskesmas Cilincing. Anggaran kegiatan *On The Job Training* digitalisasi data Surveilans Epidemiologi bersumber dari PNBPN dengan Pagu anggaran Rp. 2.705.000 (Dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah), realisasi anggaran tercapai 100% yaitu Rp. 2.705.000 (Dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

E. Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2024 ini Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantina mendapatkan anggaran dengan pagu awal sebesar Rp560.521.000- (Lima ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp558.279.883,- (Lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sudah terserap 99,60% dari pagu anggaran. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp.2.241.117,- (Dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) atau 0,4% dari pagu anggaran.

Tabel 4. 4 Capaian Kinerja Kegiatan Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantina Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI
1	Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah	100%	100%
2	Penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara	100%	100%
3	Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan	12 Laporan	12 Laporan
4	Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit	12 Laporan	12 Laporan
5	Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantina Kesehatan	12 Laporan	12 Laporan
6	Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantina Kesehatan	12 Laporan	12 Laporan
7	Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantina kesehatan	12 Laporan	12 Laporan
8	Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantina kesehatan	12 Laporan	12 Laporan
9	Penyiapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran kekarantina kesehatan	12 Laporan	12 Laporan
10	Tercapainya jumlah jam pembelajaran	20 jpl	20 pl

4.1.2 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG

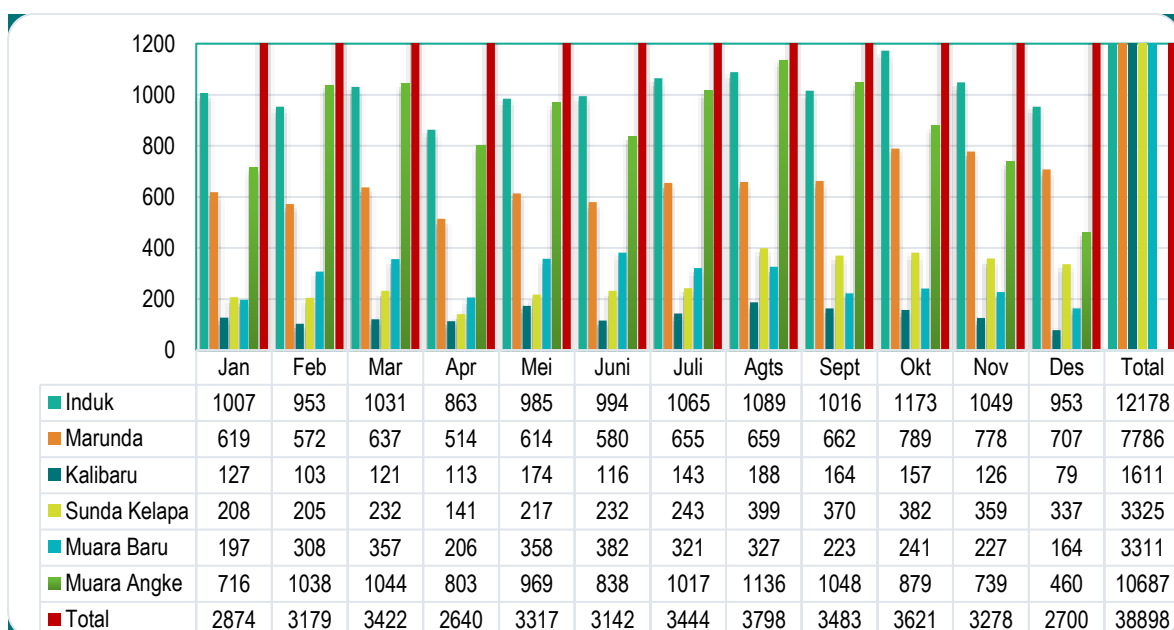
A. Pengawasan Kedatangan Kapal

Pengawasan kedatangan kapal yang dilakukan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terdiri dari pengawasan kapal dari dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas jaga/piket dengan membawa formulir pemeriksaan dan peralatan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal terdiri dari pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, awak kapal dan faktor risiko. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data dan informasi cakupan pengawasan kapal dari pelabuhan dalam negeri dan untuk pengawasan kapal dari luar negeri berupa dokumen *free pratique*. Hasil yang diharapkan adalah semua kedatangan kapal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diawasi kesehatannya. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan kapal dan muatannya selalu terawat dan terpelihara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan.

1. Pengawasan Kedatangan Kapal Dari Pelabuhan Dalam Negeri

Pengawasan kedatangan kapal dari dalam negeri terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 wilayah kerja yaitu Pelabuhan Muara Baru, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Muara Angke. Distribusi kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 4.1 di bawah ini.

Grafik 4. 3 Distribusi Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



Berdasarkan grafik 4.3 diatas diketahui jumlah kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 38.898 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 3.242 kapal. Kedatangan kapal dari dalam negeri terbanyak pada bulan Agustus yaitu sebanyak 3.798 kapal (9,76%).

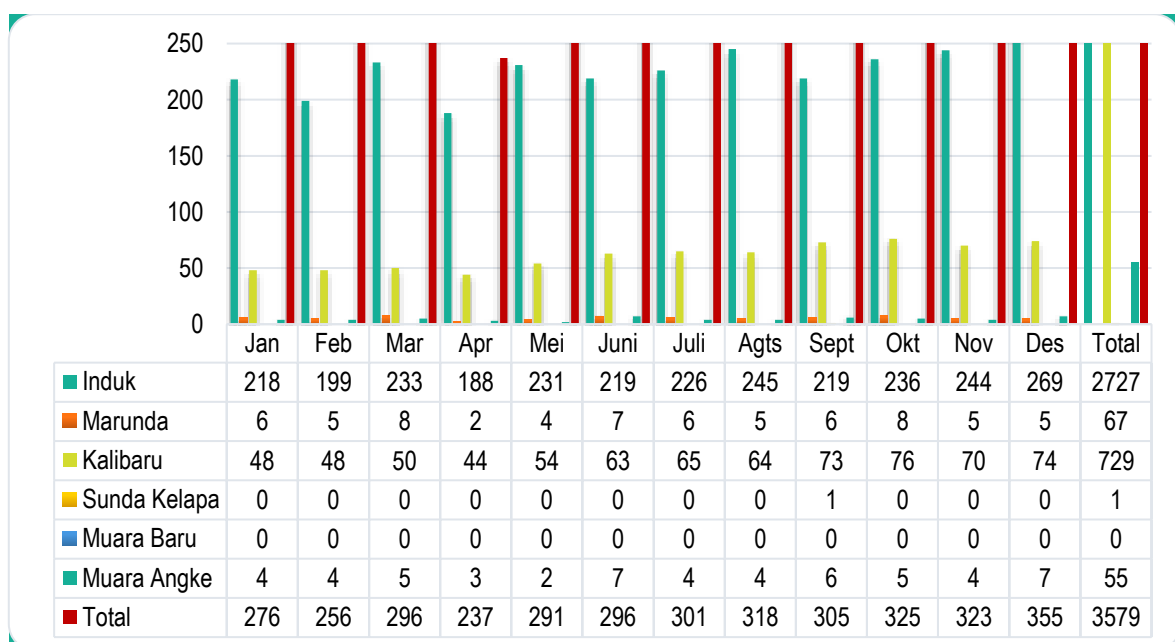
2. Pengawasan Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri

Pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri dimaksudkan sebagai upaya cegah tangkal penyakit yang datang dari luar negeri. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi penumpang dan lalu lintas ekspor/impor barang. Mobilitas masyarakat pelabuhan dan aktifitas ekonomi yang tinggi dan padat sangat potensial untuk terjadinya transmisi penyebaran penyakit menular potensial wabah. Ini berarti bahwa tantangan BBKK semakin besar dalam upaya mencegah masuknya penyakit-penyakit tersebut melalui pelabuhan sebagai pintu masuk negara. Di samping itu kita juga tetap waspada terhadap penyakit lain yang berpotensi wabah dari segi nasional dan regional.

Pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri pada tahun 2024 dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 wilayah kerja yaitu : Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Kali Baru, Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Muara Baru.

Untuk distribusi kedatangan kapal dari luar negeri dapat dilihat pada grafik 4.2 dibawah ini :

Grafik 4. 4 Distribusi Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024



Berdasarkan grafik 4.4 diatas diketahui jumlah kedatangan kapal dari luar negeri terjangkit di wilayah pengawasan BBKK Priok pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 3.579 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 298 kapal. Kedatangan kapal dari Pelabuhan luar negeri terjangkit terbanyak pada bulan Desember yaitu sebanyak 355 kapal (9,92%).

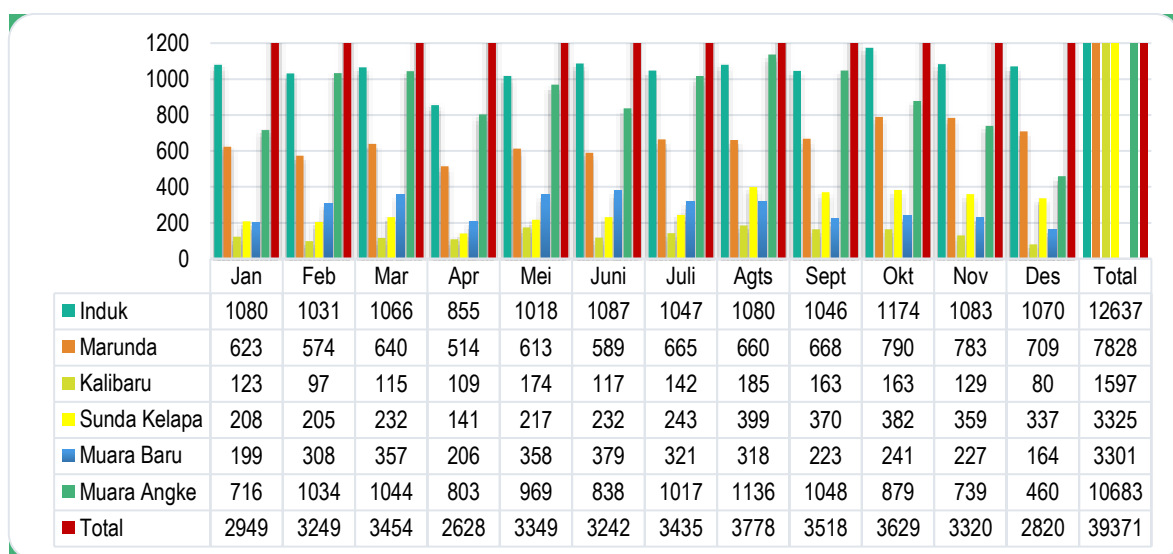
B. Pengawasan Keberangkatan Kapal

Pengawasan keberangkatan kapal yang dilakukan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terdiri dari pengawasan keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas jaga/piket dengan memeriksa dokumen kesehatan kapal dan kesehatan awak kapal. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data dan informasi cakupan pengawasan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri berupa dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC). Hasil yang diharapkan adalah semua keberangkatan kapal baik tujuan dalam negeri maupun tujuan luar negeri dapat diawasi kesehatannya. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan kapal dan muatannya selalu terawat dan terpelihara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan.

Data keberangkatan kapal tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

1. Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Dalam Negeri

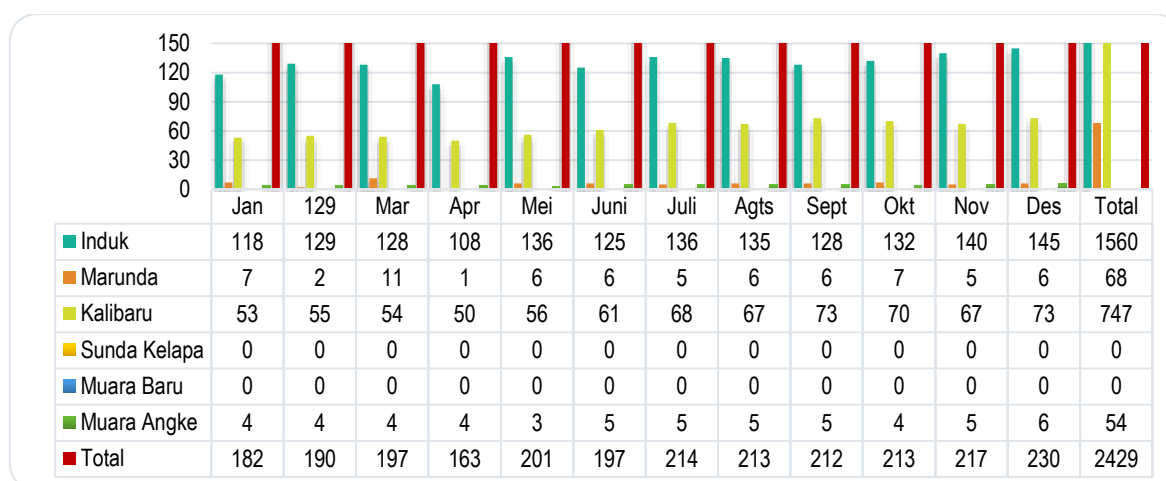
Grafik 4. 5 Distribusi Keberangkatan Kapal tujuan Dalam Negeri



Berdasarkan grafik 4.5 diatas diketahui jumlah keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 39.371 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 3.281 kapal. Keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri terbanyak yaitu pada bulan Agustus sebanyak 3.778 kapal (9,60%).

2. Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Luar Negeri

Grafik 4. 6 Distribusi Keberangkatan Kapal tujuan Pelabuhan Luar Negeri



Berdasarkan grafik 4.6 diatas diketahui jumlah keberangkatan kapal tujuan luar negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2.429 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 202 kapal. Keberangkatan kapal tujuan luar negeri terjangkit terbanyak pada bulan Desember yaitu sebanyak 230 kapal (9,47%).

C. Pemeriksaan Faktor Risiko Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)

Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp. 59.590.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pemeriksaan sampel makanan & minuman, obat-obatan, alat kesehatan dan kosmetika. *Output* dari kegiatan ini yaitu berupa penerbitan *Health Certificate* sebanyak 3.042 *certificate* dan hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 25 sampel pemeriksaan. *Outcomenya* yaitu terawasinya lalu lintas komoditi Omkaba ekspor-impor, sedangkan *benefitnya* adalah terlaksananya kegiatan pengawasan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok. *Impact* dari kegiatan ini adalah

meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan pelaksanaan pengawasan Omkaba tidak menjadi sarana penularan penyakit potensial wabah.

Penerbitan *Health Certificate* bersifat pasif berdasarkan permintaan. Negara tujuan yang meminta Health Certificate diantaranya : China, Africa, United Arab Emirate, Brunai Darusalam, Mesir, United State America, Iran, Pakistan, Korea Selatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada penerbitan *Health Certificate* diantaranya: pemeriksaan dokumen, fisik dan pengambilan sampel, pengiriman sampel ke laboratorium terakreditasi dan pengambilan hasil pemeriksaan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di wilayah Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Cilegon dan Bandung untuk uji laboratorium sampel komoditi OMKABA di lakukan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Daftar pengawasan lalu lintas komoditi omkaba ekspor-impor untuk hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Pengawasan Lalu Lintas Komoditi Omkaba Ekspor Impor

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPLE	NAMA PRODUK	HASIL
1	PT. Wahana Citra Nabati	Pulogadung, Jakarta	1 Februari 2024	RBD Palm Oil	Memenuhi syarat
2	PT. Nagindo International	Karawang, Jawa Barat	5 Februari 2024	Kecap Manis ABC	Memenuhi syarat
3	PT. Induk Kesejahteraan Nusantara	Jakarta	3 Mei 2024	Susu Bear Brand	Memenuhi syarat
4	PT. Triveni Exports	Tangerang	7 Mei 2024	Permen Fox's	Memenuhi syarat
5	PT. Berry Trada Multipersada	Cilincing, Jakarta Utara	13 Mei 2024	Jahe Segar	Memenuhi syarat
6	PT. Langit Bumi Lestari	Marunda, Jakarta Utara	16 Mei 2024	Tepung Sagu	Memenuhi syarat
7	PT. Agroloka Indo Varian	Cilincing, Jakarta Utara	28 Mei 2024	Tepung Tapioka	Memenuhi syarat
8	PT. Indo Cipta Cahaya	Cakung, Jakarta Timur	29 Mei 2024	Sardines Bella	Memenuhi syarat
9	PT. Palko Sari Eka	Daan Mogot, Jakarta	19 Juni 2024	RBD Coconut Oil	Memenuhi syarat
10	PT. Persatuone Komoditas Indonesia	Cakung, Jakarta Timur	25 Juni 2024	Cocoa Powder	Memenuhi syarat

11	PT. Saira Fazal	Bandung, Jawa Barat	27 Juni 2024	Cocoa Powder	Memenuhi syarat
12	CV. Semi Grosir Mart	Cakung, Jakarta	2 Juli 2024	Oreo Biskuit	Memenuhi syarat
13	PT. Lemonilo	Tangerang	4 Juli 2024	Brownies Crispy	Memenuhi syarat
14	PT. Kurnia Sakura Berkarya	Marunda, Jakarta Utara	16 Juli 2024	Santan Kara	Memenuhi syarat
15	PT. Tripper Nature	Cikarang, Bekasi	24 Juli 2024	Kayu Manis Bubuk	Memenuhi syarat
16	CV. Bina Makmur Sehati	Tangerang	13 Agustus 2024	Minyak Kelapa	Memenuhi syarat
17	CV. Sentosa Multi Jaya	Cirebon	14 Agustus 2024	Kemiri	Memenuhi syarat
18	PT Inni Pioneer Food Industry	Karawang, Jawa Barat	19 September 2024	Red Papaya Dice	Memenuhi syarat
19	PT. Kendo Agri Nusantara	Cileunyi	20 September 2024	Alkalized Cocoa Powder	Memenuhi syarat
20	PT. Bumi Tirta Pangan Kencana	Kota Tangerang	23 September 2024	Cocoa Powder	Memenuhi syarat
21	PT. Primajaya Agung Sentosa	Tangerang	24 September 2024	Susu Ultra Full Cream	Memenuhi syarat
22	PT. Brilian Zenco Agroindo	Bandung	4 Oktober 2024	Cocoa Powder	Memenuhi syarat
23	PT. Mahkota Anugerah Indonesia	Marunda, Jakarta Utara	11 Oktober 2024	Cocoa Powder	Memenuhi syarat
24	PT. Lancar Jaya Impex	Tangerang	11 November 2024	Susu Cimory Strawberry	Memenuhi syarat
25	PT. Karyana Nagri Nusantara	Bandung	15 November 2024	Biji Kopi	Memenuhi syarat

Realisasi Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Impor) Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 59.089.319,- (99,16%).

D. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal

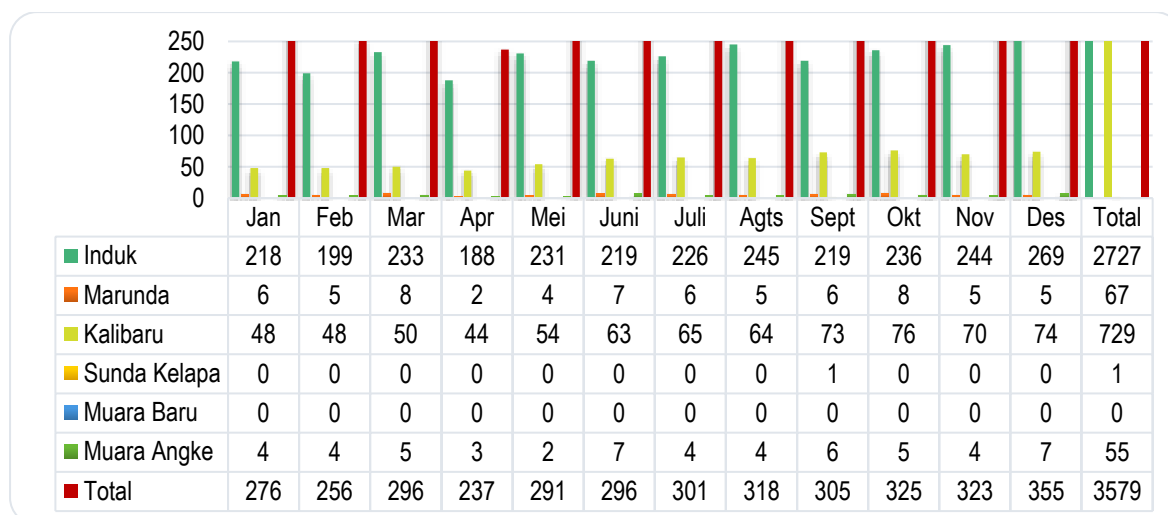
Penerbitan dokumen kesehatan merupakan salah satu Tupoksi Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang. Penerbitan dokumen kesehatan ini dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan penerbitan dokumen kesehatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah ditebitkannya sertifikat (Dokumen) yang mana kegiatan ini diharapkan semua kapal memiliki dokumen kesehatan, dan komoditi OMKABA dapat diterbitkan *Health Certificate* sehingga melalui

dokumen yang diterbitkan dapat terpantau kesehatannya. Dokumen kesehatan yang diterbitkan adalah *Certificate Of Pratique* (COP), *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC), buku kesehatan, P3K Kapal, SSCEC/SSCC.

Berikut ini adalah penerbitan dokumen kesehatan kapal yang sudah dikeluarkan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024:

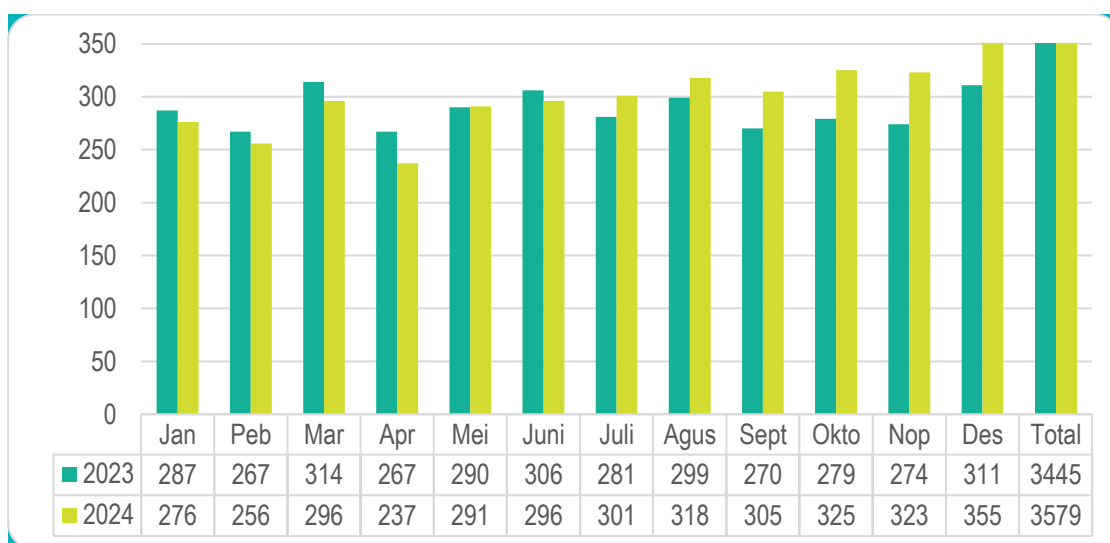
1. Penerbitan *Certificate Of Pratique*

Grafik 4. 7 Distribusi Penerbitan COP



Berdasarkan grafik 4.7 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *Certificate of Pratique* di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 3.579 dokumen dengan rata-rata perbulannya sebanyak 298 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak yaitu pada Bulan Desember yaitu sebanyak 355 dokumen (9,92%). Untuk penerbitan *certificate of free pratique* dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut Tahun 2024 sebanyak 3.568 dokumen sedangkan untuk penerbitan *restricted pratique* sebanyak 11 dokumen.

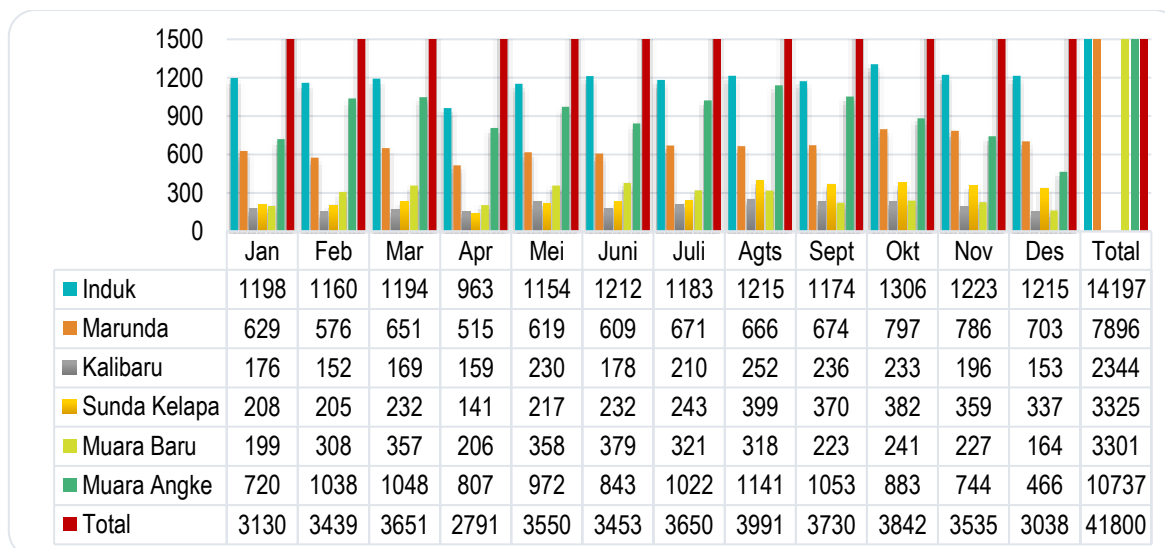
Grafik 4. 8 Distribusi Perbandingan Penerbitan COP



Berdasarkan grafik 4.8 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen *Certificate Of Pratique* (COP) pada Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan COP pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 134 dokumen (4%). Peningkatan ini seiring dengan membaiknya stabilitas perekonomian di Indonesia khususnya dibidang impor.

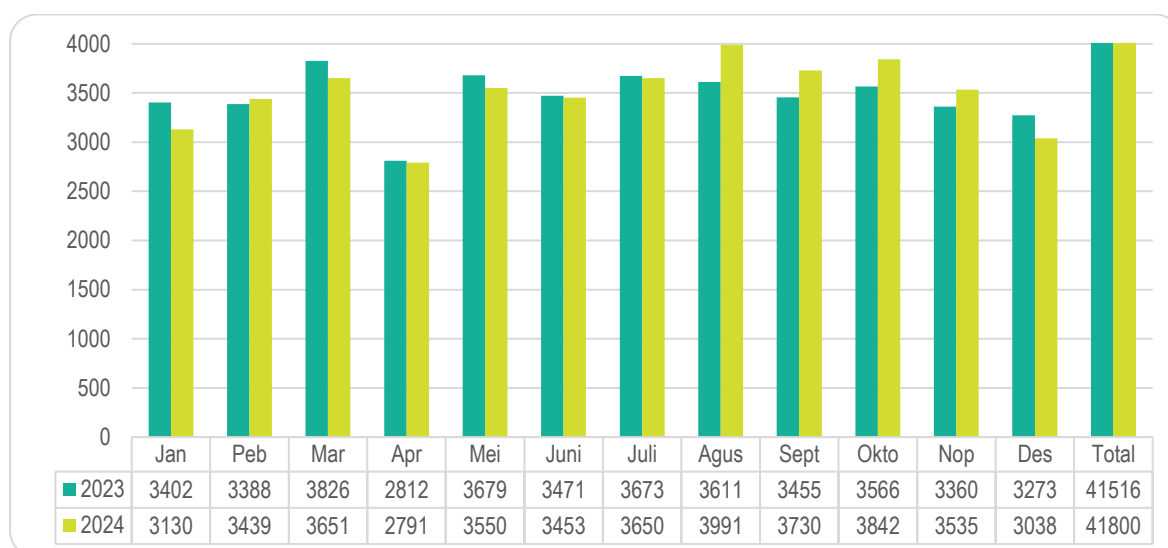
2. Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance*

Grafik 4. 9 Distribusi Penerbitan PHQC



Berdasarkan grafik 4.9 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 41.800 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 3.483 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak yaitu pada bulan Agustus yaitu sebanyak 3.991 dokumen (9,55%).

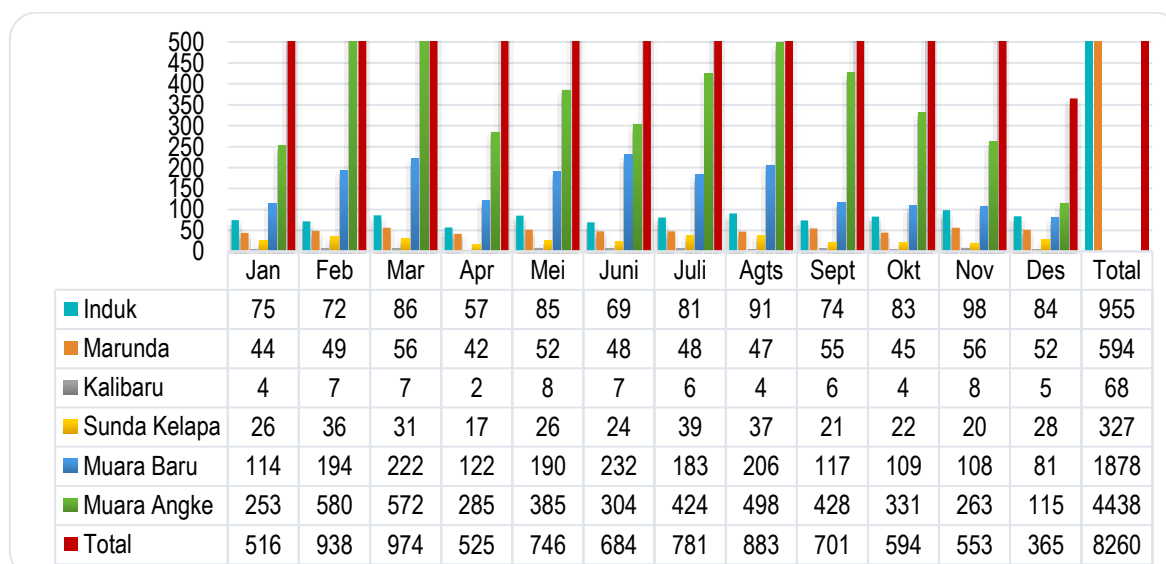
Grafik 4. 10 Distribusi Perbandingan Penerbitan PHQC



Berdasarkan grafik 4.10 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 284 dokumen (0,68%), Peningkatan ini seiring dengan membaiknya stabilitas perekonomian di Indonesia khususnya di Dalam Negeri maupun luar Negeri (Impor).

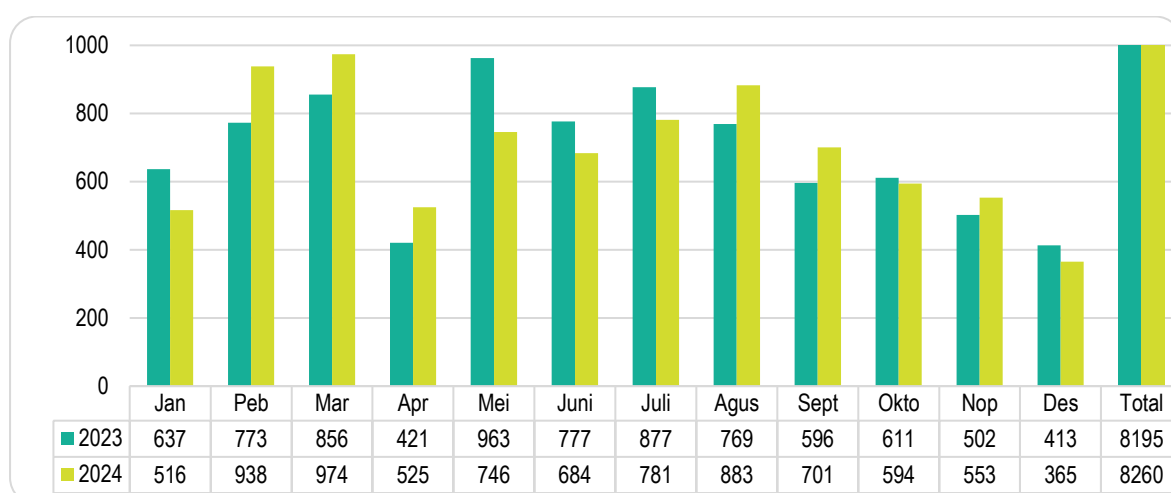
3. Penerbitan Sertifikat SSCEC

Grafik 4. 11 Distribusi Penerbitan SSCEC



Berdasarkan grafik 4.11 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen SSCEC di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 8.260 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 688 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 974 dokumen (11,79%).

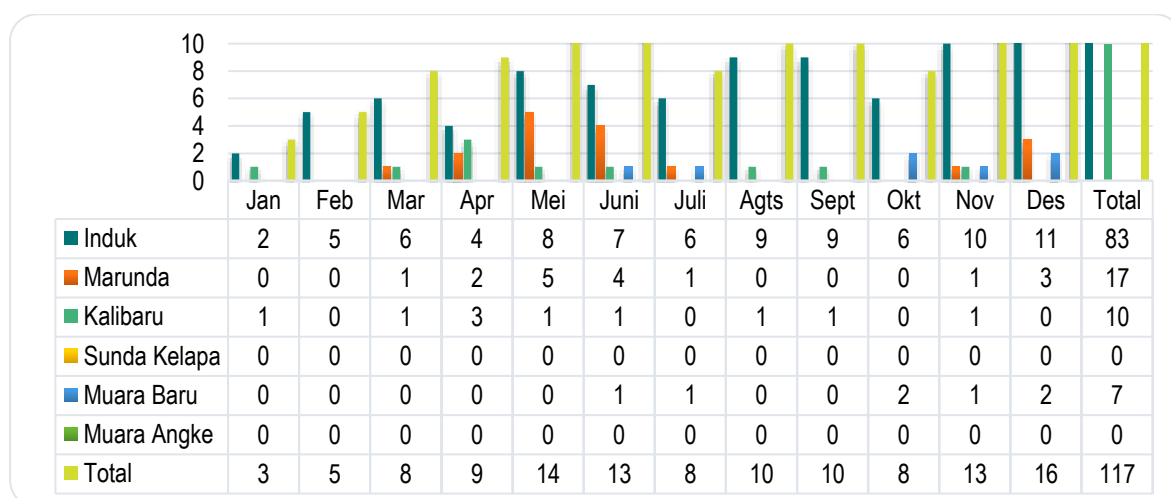
Grafik 4. 12 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCEC



Berdasarkan grafik 4.12 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat SSCEC pada Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan SSCEC pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 65 dokumen (0,79%).

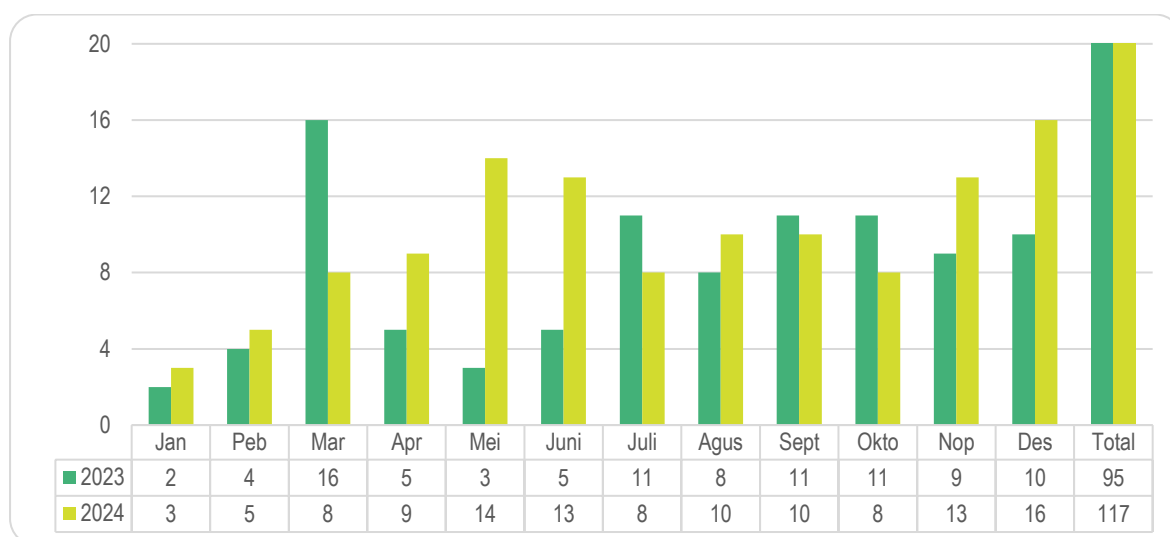
4. Penerbitan Sertifikat SSCC

Grafik 4. 13 Distribusi Penerbitan SSCC



Berdasarkan grafik 4.13 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen SSCC BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 117 dokumen dengan rata-rata perbulannya sebanyak 10 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 16 dokumen (13,68%). Jumlah penerbitan SSCC berdasarkan permohonan dari pengguna jasa sebanyak 106 dokumen dan temuan dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut sebanyak 11 dokumen.

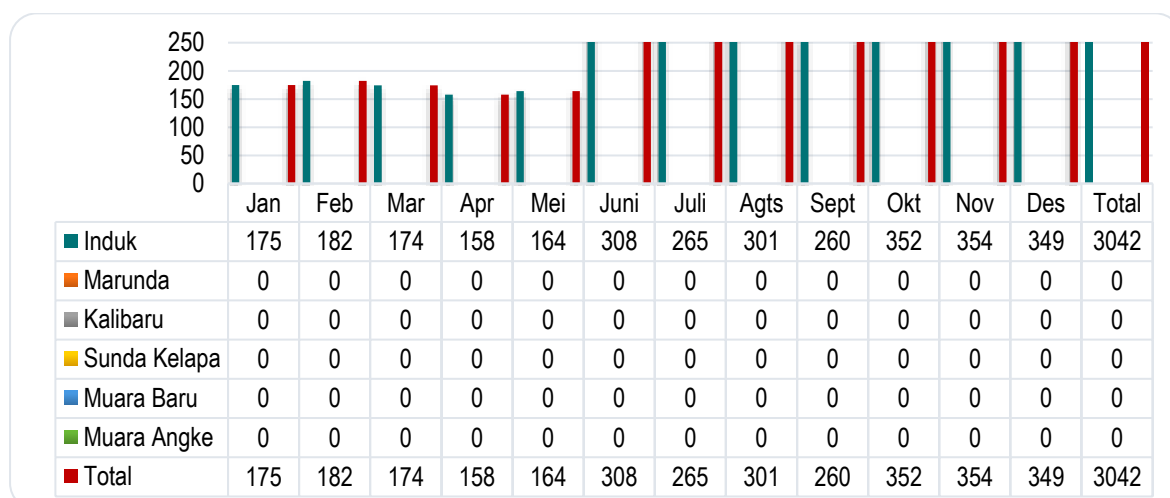
Grafik 4. 14 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCC



Berdasarkan grafik 4.14 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat SSCC pada Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan SSCC pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 22 dokumen (19%).

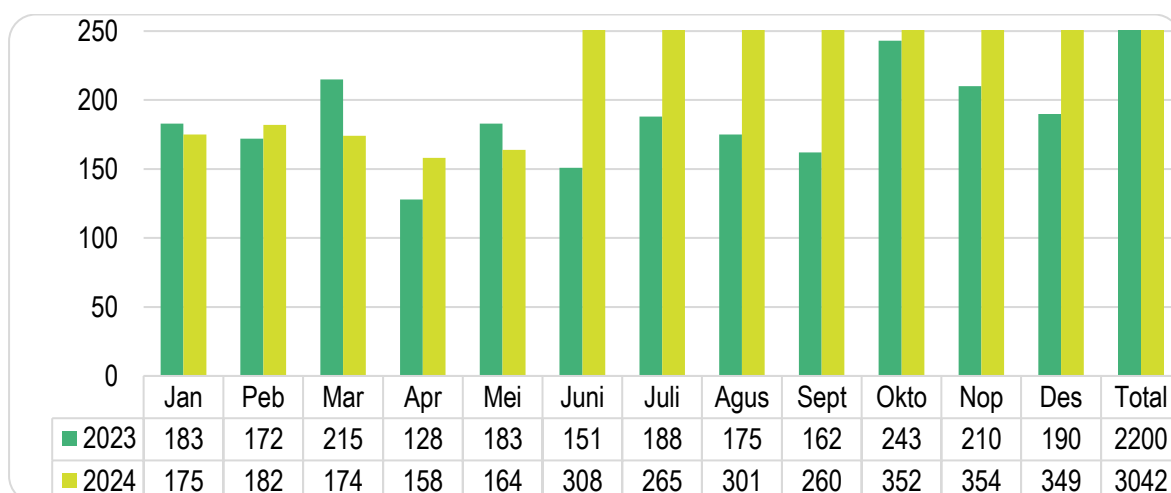
5. Penerbitan *Health Certificate*

Grafik 4. 15 Distribusi Penerbitan Health Certificate



Berdasarkan grafik 4.15 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *Health Certificate* BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 3.042 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 254 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 354 dokumen (11,64%).

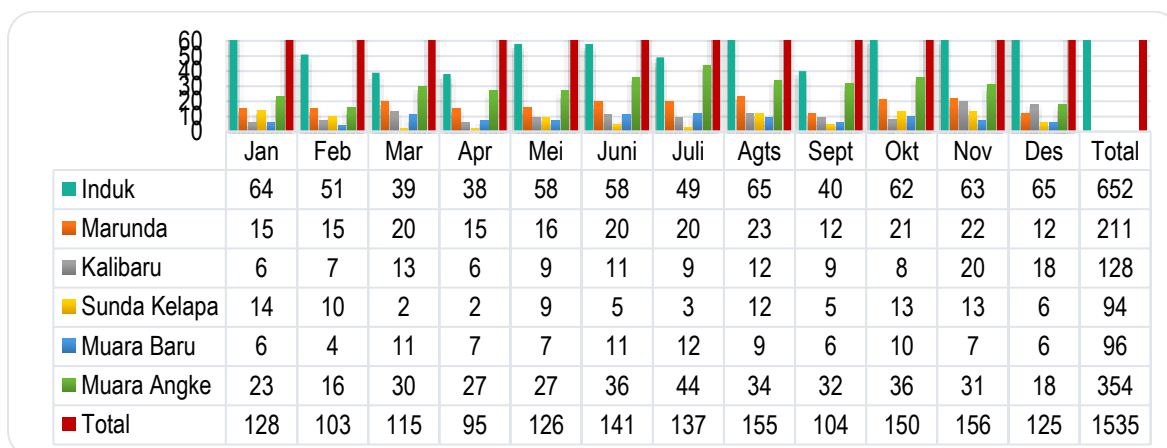
Grafik 4. 16 Distribusi Perbandingan Penerbitan Health Certificate



Berdasarkan grafik 4.16 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen *Health Certificate* Omkaba pada Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan *Health Certificate* pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 842 dokumen (28%). Penerbitan *Health Certificate* di Tahun 2024 meningkat karena bertambahnya jumlah perusahaan yang mengajukan *Health Certificate*.

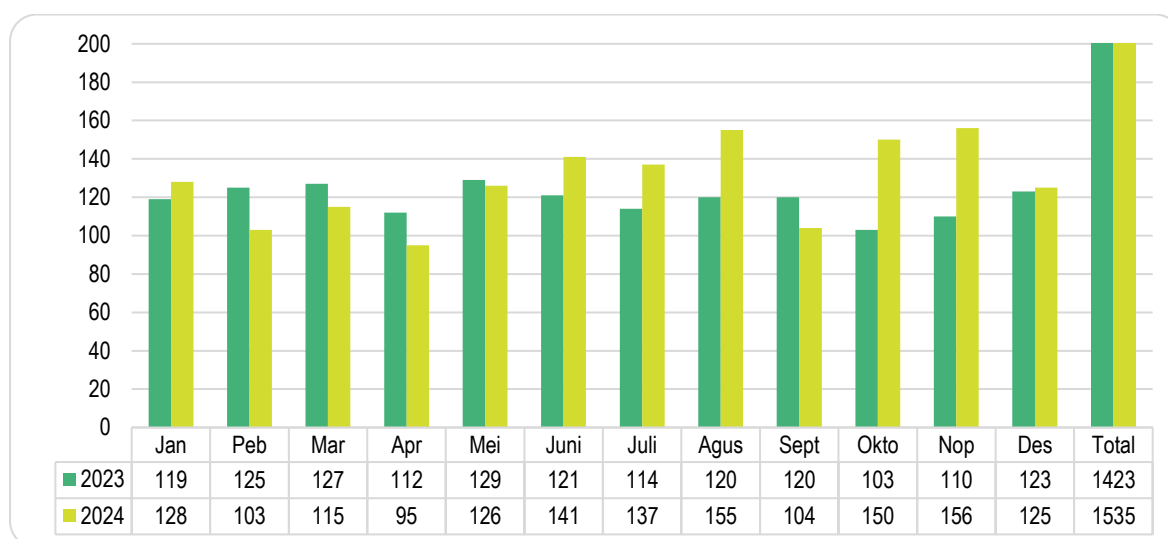
6. Penerbitan Buku Kesehatan

Grafik 4. 17 Distribusi Penerbitan Buku Kesehatan Kapal



Berdasarkan grafik 4.17 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen Buku Kesehatan Kapal di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 1.535 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 128 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 156 dokumen (10,16%).

Grafik 4. 18 Distribusi Perbandingan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal



Berdasarkan grafik 4.18 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat Buku Kesehatan Kapal pada Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penerbitan buku kesehatan kapal pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 112 dokumen (7%).

E. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG.

1. Pelatihan Penanganan *Emergency Call* di Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan

Pelatihan Penanganan *Emergency Call* di Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2024 merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Anggaran kegiatan Pelatihan ini sebesar Rp.120.750.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang yang berasal dari BBKK Tanjung Priok. Acara diselenggarakan pada tanggal 26 s.d 27 Februari 2024 di Hariston Hotel & Suites Penjaringan Jakarta Utara dengan pihak penyelenggara yaitu dari PT.Satria Jaya Mandiri.

Output dari Pelatihan Penanganan *Emergency Call* Bagi Petugas BBKK ini berupa sertifikat yang berlaku 3 Tahun dan Lisensi. *Outcomenya* adalah menambah pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan diri petugas dalam hal darurat di lepas pantai dengan penggunaan yang tepat dari peralatan darurat yang tersedia, dan kemampuan dalam memberikan bantuan serta untuk bertahan hidup di laut, *benefitnya* adalah agar petugas mampu melakukan keselamatan diri dan bertahan hidup apabila terdapat kejadian *emergency* (kecelakaan kapal) pada saat melaksanakan

pemeriksaan kapal dalam karantina maupun *offshore* atau bencana alam, *Impactnya* kegiatan kekarantinaan yang dilakukan di *offshore* maupun di tengah laut dapat dilaksanakan secara professional sesuai dengan Tupoksi BBKK.

Tabel 4. 6 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan Penanganan Emergency Call Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Brata Sugema, SKM, M.Si	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
2.	dr. Theresia Hermin S.W	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
3.	Enizarti, SKM, MKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
4.	Rustama Sihite, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
5.	Fredrik Lona Djara, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
6.	M. Fajar Subechi, SKM, MKM	Sanitarian Ahli Muda
7.	Robiur Rosyid, SKM, MKM	Sanitarian Ahli Muda
8.	Atim, SKM	Epidemiolog Kesehatan
9.	M. Jamil, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
10.	Syaflovida, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
11.	Dr. Hestilin Kartini Seilatu	Dokter
12.	Dr. Ricky Atrian	Dokter
13.	Dr. Dwie Meiningwati	Dokter
14.	Evi Maria, S.Farm	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
15.	Dwi Asih Suprihatin, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
16.	Asri Rahmatia	Sanitarian Mahir
17.	Elisabeth B.F. Simanjuntak, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
18.	Ita Yunita, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
19.	Yulia Darutantri, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
20.	Amri Pitayoni, SKM	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama
21.	M. Edi Hamdi, SKM	Sanitarian Ahli
22.	M. Fardhy Nur Wahid	Perawat Mahir
23.	Yoga Sasmaya	Epidemiolog Kesehatan Terampil
24.	Wahyu Kurniawan	Epidemiolog Kesehatan Terampil
25.	Hanafi Daulay	Perawat Terampil
26.	La Marwan	Perawat Terampil
27.	Yessy Mariana Gultom	Pramubakti

28	Mansur Rahman	Pramubakti
29	Rinsi Rutman	Crew Ambulance Kapal
30	Syamsul	Crew Ambulance Kapal
31	Arlent Pramudya Qodratullah	Crew Ambulance Kapal
32	Christomus Niaska Immanuel	Crew Ambulance Kapal
33	Jumadi	Pengemudi
34	Dziky Shifi Musanna	Pengemudi
35	Hendra Surachman	Pengemudi

Realisasi Pelatihan Penanganan *Emergency Call* di Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.120.750.000,- (100%), pelatihan sudah dilaksanakan seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.

2. Pelatihan *Safety Boarding* Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

Pelatihan *Safety Boarding* Bagi Petugas BBKK merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Anggaran kegiatan Pelatihan ini sebesar Rp.115.000.000- yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan diluar kantor dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok. Acara diselenggarakan pada tanggal, 5-6 Maret 2024 di Hotel POP Kelapa Gading Jakarta Utara dan untuk kegiatan praktek lapangan dilaksanakan Gelanggang Kolam Renang Bea Cukai Jakarta Pusat dengan pihak penyelenggara yaitu dari PT.Satria Jaya Mandiri.

Output dari kegiatan *Safety Boarding* Bagi Petugas BBKK ini berupa sertifikat yang berlaku 3 Tahun dan Lisensi. *Outcomenya* adalah menambah pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan diri petugas dalam hal darurat di lepas pantai dengan penggunaan yang tepat dari peralatan darurat yang tersedia, dan kemampuan dalam memberikan bantuan serta untuk bertahan hidup di laut, *benefitnya* adalah agar petugas mampu melakukan keselamatan diri dan bertahan hidup apabila terdapat kejadian *emergency* (kecelakaan kapal) pada saat melaksanakan pemeriksaan kapal dalam karantina maupun *offshore* atau bencana alam, *Impactnya* kegiatan kekarantinaan yang dilakukan di *offshore* maupun di tengah laut dapat dilaksanakan secara professional sesuai dengan Tupoksi.

Tabel 4. 7 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan Safety Boarding Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Brata Sugema, SKM, M.Si	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
2.	dr. Theresia Hermin S.W	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
3.	Enizarti, SKM, MKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
4.	Fredrik Lona Djara, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
5.	Indra Syofendi, SE, M. Kes	Pranata Keuangan APBN Penyelia
6.	Evi Maria, S.Farm	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
7.	M. Jamil, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
8.	M. Zahri, SKM, M. Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli
9.	dr. Imelda Noviana Paranna	Dokter Ahli Muda
10.	Dinsi Aprilius, SKM	Perawat / Pengelola Keperawatan
11.	Dwi Asih Suprihatin, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
12.	Elisabeth B.F. Simanjuntak	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
13.	Yulia Darutantri, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
14.	Debiyanto Wirasetya, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
15.	Agi Gunawan Wibisono	Sanitarian Mahir
16.	Holong J.M. Tanjung	Perawat Mahir
17.	Asri Rahmatia	Sanitarian Mahir
18.	Monica Rizky Yanuar S.	Sanitarian Ahli Pertama
19.	Dedi Sutardi, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
20.	Riri Saifudin	Perawat Mahir
21.	Erlan Nur Istiqomah	Perawat Mahir
22.	Fadian Desy Kristina Natalia	Entomolog Kesehatan Terampil
23.	Yoga Sasmaya	Epidemiolog Kesehatan Terampil
24.	Wahyu Kurniawan	Epidemiolog Kesehatan Terampil
25.	Gensian K.Y.P.Hangguman	Pramubakti

Realisasi Pelatihan *Safety Boarding* Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.115.000.000,- (100%), pelatihan sudah dilaksanakan seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.

3. Pelatihan *Advance Sea Survival* dan Keselamatan di Lepas Pantai Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

Pelatihan *Advance Sea Survival* Dan Keselamatan di Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Anggaran kegiatan Pelatihan ini sebesar Rp.125.850.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang yang berasal dari BBKK Tanjung Priok. Acara diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 8 Mei 2024 di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu dengan pihak penyelenggara yaitu dari PT.Satria Jaya Mandiri.

Output dari kegiatan *Advance Sea Survival* dan Keselamatan di Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK ini berupa sertifikat yang berlaku 3 Tahun dan Lisensi. *Outcomenya* adalah menambah pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan diri petugas dalam hal darurat di lepas pantai dengan penggunaan yang tepat dari peralatan darurat yang tersedia, dan kemampuan dalam memberikan bantuan serta untuk bertahan hidup di laut, *benefitnya* adalah agar petugas mampu melakukan keselamatan diri dan bertahan hidup apabila terdapat kejadian *emergency* (kecelakaan kapal) pada saat melaksanakan pemeriksaan kapal dalam karantina maupun *offshore* atau bencana alam, *Impactnya* kegiatan kekarantinaan yang dilakukan di *offshore* maupun di tengah laut dapat dilaksanakan secara professional sesuai dengan Tupoksi BBKK.

Tabel 4. 8 Daftar Nama-nama Peserta Pelatihan *Advance Sea Survival* dan Keselamatan di Lepas Pantai

No.	Nama	Instansi
1.	Enizarti, SKM, MKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
2.	dr. Thereseia Hermin S W	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
3.	dr. Dwie Meiningwati	Dokter Ahli Muda
4.	Robiur Rosyid, SKM, MKM	Sanitarian Ahli Muda
5.	Cahyono Edi Nugroho, SKM	Sanitarian Ahli Muda
6.	Dwi Asih Suprihatin, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
7.	Elisabeth Bintang F S, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
8.	Fatma Zahara	Epidemiolog Kesehatan Penyelia
9.	Mutakin Zainal Mustofa	Pengelola Barang Milik Negara

10.	Bayu Umboro, SKM	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama
11.	Amri Pitayoni, SKM	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama
12.	M. Edi Hamdi, SKM	Sanitarian Ahli
13.	Dery Nurrachman	Pranata Laboratorium Kesehatan
14.	Nia Anggraini	Perawat Mahir
15.	Wahyu Kurniawan	Epidemiolog Kesehatan Terampil

Realisasi Pelatihan *Advance Sea Survival* dan Keselamatan di Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK Tahun 2024 mencapai 100% berdasarkan DIPA BBKK Tanjung Priok realisasi anggaran untuk Pelatihan *Advance Sea Survival* yaitu sebesar Rp.125.850.000,- (100%), pelatihan sudah dilaksanakan seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.

4. Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara *Online*

Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara *Online* Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.111.183.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan barang di pelayanan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan barang yaitu tas *boarding* dan ATK untuk penerbitan dokumen kekarantinaan. *Outcomenya* adalah tersedianya sarana pendukung kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal. *Benefit* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal secara optimal sehingga pengguna jasa dapat terlayani dengan baik. *Impactnya* pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan DIPA KKP Kelas I Tanjung Priok realisasi anggaran untuk bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan kapal secara *online* Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.111.141.920,- (99,96%).

5. Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan

Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.94,100,000,- yang dialokasikan untuk pengadaan formulir cetakan di pelayanan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan barang formulir pemeriksaan kapal dalam karantina, formular pemeriksaan SSCEC/SSCC, lembar disposisi, formular *health certificate*. *Outcomenya* adalah tersedianya sarana

pendukung kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal. *Benefit* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal secara optimal sehingga pengguna jasa dapat terlayani dengan baik. *Impactnya* pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan DIPA BBKK Tanjung Priok realisasi anggaran untuk Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.94.020.885- (99,92%).

6. Pengadaan Bahan dan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan

Pengadaan Bahan dan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.357.115.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan APD dalam rangka pengawasan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini tersedianya alat pelindung diri bagi petugas berupa jas hujan, kaos kekarantinaan, *hygiene kit* bagi pelaku perjalanan, *wearpak* kekarantinaan, *handscoon*, *safety shoes*, *safety helmet*, rompi kekarantinaan, masker N95, jaket kakarantinaan, masker bedah, *life jacket*, kacamata *safety*, tabung gas CO2 *life jacket*. *Outcomenya* yaitu menurunkan risiko penularan penyakit pada petugas saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan kapal dalam karantina, *benefitnya* terawasinya semua kedatangan kapal dari dalam dan luar negeri dengan tidak adanya penularan penyakit PHEIC melalui kapal yang datang, *impactnya* kegiatan cegah tangkal penyakit Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan optimal.

Berdasarkan DIPA BBKK Tanjung Priok realisasi anggaran untuk Pengadaan Bahan dan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.357.098.200- (100%).

7. Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut

Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.2,550,000,- yang dialokasikan untuk kegiatan fumigasi dan desinseksi kapal.

Output dari kegiatan ini yaitu terbitnya SSCC sebanyak 83 kapal yang terdiri dari tindakan penyehatan kapal (Fumigasi kapal sebanyak 72 kapal dan desinseksi sebanyak 11 kapal). *Outcomenya* terselenggaranya pengawasan faktor risiko alat

angkutan, *benefitnya* terbebas dari penyebaran faktor risiko penyakit penyakit di alat angkutan, *impactnya* dengan terlaksananya tindakan penyehatan pada alat angkutan dapat mencegah penyebaran penyakit di alat angkutan dan masyarakat.

Berdasarkan DIPA BBKK Tanjung Priok realisasi anggaran untuk Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.2.550.000,- (100%).

8. Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Kegiatan Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.25.395.000,- yang dialokasikan untuk acara pertemuan diluar kantor. *Output* dari pertemuan ini adalah dokumen laporan kegiatan dan desiminasi informasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

No.	Tanggal	Lokasi	Nama Pelaksana	Kegiatan
1.	18 Januari 2024	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	1. dr. Theresia 2. Dwi Asih S. 3. Amri Pitayoni	Dalam Rangka Pengawasan dan Penerbitan <i>Health Certificate</i> (HC)
2.	24 - 25 Januari 2024	Bigland Hotel International & Convention Bogor	1. Evi Maria 2. Fredrik Lona Djara	Dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
3.	29 Januari s.d 2 Februari 2024	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	dr. Theresia	Dalam rangka penyusunan pedoman audit kinerja kekarantinaan kesehatan
4.	31 Januari - 1 Februari 2024	Aston Imperial Hotel & Conference Bekasi	Yoga Sasmaya	Dalam rangka Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-Wilayah Vertikal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 <i>Unaudted</i>
5.	20 s.d 23 Februari 2024	Hotel Herper Malioboro Yogyakarta	1. dr. Theresia 2. Evi Maria	Dalam rangka desk pembahasan dan penetapan usulan kegiatan dari anggaran program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2025
6.	27 Februari s.d 1 Maret 2024	Balai Pelatihan Kesehatan Hang Jebat	1. dr. Theresia 2. dr. Trio Toufik Edwin	Dalam rangka finalisasi pedoman audit kinerja kekarantinaan kesehatan

Outcome kegiatan ini menguatkan jejaring komunikasi dan informasi yang baik antar Kantor Kesehatan Pelabuhan, lintas sektor & lintas program, *benefitnya* adalah

meningkatnya jejaring komunikasi dan koordinasi, *impactnya* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Tanjung Priok berjalan dengan baik.

Realisasi anggaran Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Tahun 2024 sebesar Rp.25.367.482- (99,89%).

9. Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.67.049.000,- yang dialokasikan untuk acara pertemuan diluar kantor. *Output* dari pertemuan ini adalah dokumen laporan kegiatan dan desiminasi informasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No.	Tanggal	Lokasi	Nama Pelaksana	Kegiatan
1.	19 s.d 21 Juni 2024	Hotel The 101 Suryakencana Bogor	1. Agus Sudarman 2. Evi Maria 3. Cukup Sugianto	Dalam rangka pertemuan desk penyusunan petunjuk perencanaan program P2P Tahun Anggaran 2025
2.	23 Juli 2024	BBPK Ciloto	1. Agus Sudarman 2. M.Edi Hamdi	Dalam rangka menjadi narasumber diklat kekarantinaan kesehatan Tingkat Dasar Tahun 2024
3.	24 s.d 27 Juli 2024	Hotel Horison Ultima Bekasi	1. Agus Sudarman 2. Evi Maria 3. Cukup Sugianto	Dalam rangka pertemuan desk penelitian dan reviu RKA-KL pagu anggaran Ditjen P2P Tahun Anggaran 2025
4.	26 Agustus 2024	BBKK Soekarno Hatta	Agus Sudarman	Dalam rangka pertemuan penyusunan penyesuaian peta proses bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menjadi peta proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (BKK)
5.	26 Agustus 2024	Laboratorium CAT BKN Jakarta Timur	Enizarti	Melakukan Penilaian Kompetensi Mansoskul Menggunakan Metode Computer Assisted Competencies Test (CACT)
6.	23 s.d 25 September 2024	GOR Bandung	1. Agus Sudarman 2. Cukup Sugianto	Mengikuti lomba bulu tangkis dalam rangka HUT ke 101 Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung

			3. Wahyu Kurniawan	
7.	7 s.d 10 Oktober 2024	Hotel Horison Ultima Bekasi	1. Agus Sudarman 2. Evi Maria 3. Cukup Sugianto	Dalam rangka pertemuan desk penelitian dan reviu RKA-KL Alokasi anggaran Ditjen P2P Tahun Anggaran 2025
8.	14 s.d 16 Oktober 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	M. Edi Hamdi	Mengikuti konsultasi pra uji kompetensi dan uji kompetensi periode II Tahun 2024
9.	21 Oktober 2024	BBPK Ciloto	Agus Sudarman	Koordinasi terkait Webinar Nasional Travel Health Dalam Rangka HKN Ke-60
10.	28 s.d 30 Oktober 2024	BBKK Soekarno Hatta	1. Agus Sudarman 2. dr. Theresia	Dalam rangka Penyusunan Logical Framework Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025
11.	5 November 2024	TPU San Diego Hills Karawang	1. Fatma Zahara 2. Yulia Darutantri	Upacara Tabur Bunga Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 Tahun 2024
12.	7 November 2024	Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Selatan	1. Agus Sudarman 2. Evi Maria 3. dr. Dwie Meiningwati 4. M. Edi Hamdi 5. Yulia Darutantri	Mengikuti Pameran Hari Kesehatan Nasional Ke-60
13.	18 s.d 20 November 2024	Pelabuhan Manggar, BKK Kelas II Pangkal Pinang	Agus Sudarman	Menjadi Tim Narasumber Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) BKK Kelas II Pangkal Pinang

Outcome kegiatan ini menguatkan jejaring komunikasi dan informasi yang baik antar Kantor Kesehatan Pelabuhan, lintas sektor & lintas program, *benefitnya* adalah meningkatnya jejaring komunikasi dan koordinasi, *impactnya* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Tanjung Priok berjalan dengan baik.

Realisasi anggaran Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2024 sebesar Rp.67.018.840- (99,96%).

F. PENCAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024 ini Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang mendapatkan anggaran dengan pagu awal sebesar Rp.1.078.582.000,- (Satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran kegiatan Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tahun 2024 sebesar Rp.1.078.226.446,- (Satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau sudah terserap 99,97% dari pagu anggaran. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp.355.354,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau 0,03% dari pagu anggaran.

Tabel 4.7
Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan

Alat Angkut dan Barang

Tabel 4. 11 Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang

No.	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			Realisasi	Capaian %
1	Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina 2024	38.000	46.043	121,20
2	COP	2.904	3.599	123,93
3	PHQC	35.096	42.464	121,03
4	SSCC	107	107	100
5	Surat Bebas Karantina Kapal (<i>Restrict</i>)	11	11	100

4.1.3 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pencapaian Program Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan

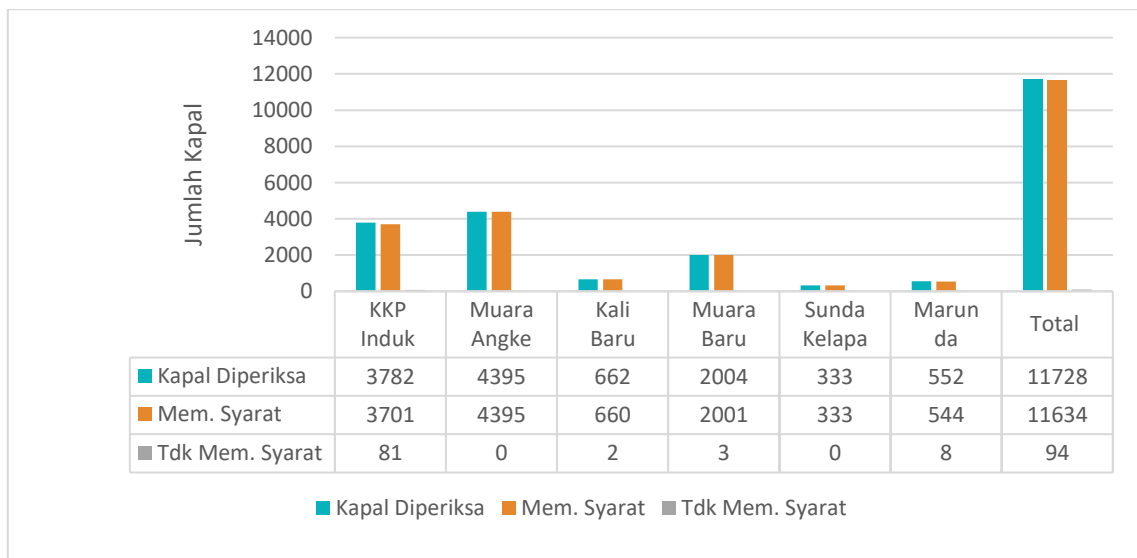
1. Pengawasan Higiene Sanitasi Kapal

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta IHR 2005, maka setiap kapal yang datang dari luar negeri (dalam karantina) harus dilakukan pemeriksaan higiene sanitasi kapal, yaitu untuk mengamati

faktor risiko yang terdapat dalam alat angkut yang dapat terbawa oleh media lingkungan dan vektor serta binatang pembawa penyakit.

Didalam Permenkes RI No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tim Kerja 3 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada pasal 6 yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan. Kegiatan pengawasan higiene dan sanitasi kapal (HSK) telah mengalokasikan anggaran yang dituangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp. 77.110.000,- untuk pengadaan bahan cetak formulir pemeriksaan higiene sanitasi kapal (HSK), dan peralatan yang digunakan dalam pengawasan higiene sanitasi kapal baik di Wilayah BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) berupa laporan hasil pengawasan, rekomendasi tindakan penyehatan kapal dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC dan SSCC. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pengawasan higiene sanitasi pada kapal baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, terbitnya dokumen SSCEC, SSCC, COP, dan PHQC (sesuai dengan PP No 64 tahun 2019) yang memberlakukan pemeriksaan higiene sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC serta menjadi sumber pemasukan terhadap PNPB di BBKK Tanjung Priok. Berikut hasil kegiatan pengawasan Higiene Sanitasi Kapal BBKK Tanjung Priok 2024.

Grafik 4. 19 Distribusi Hasil Pengawasan & Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal



Berdasarkan grafik 4.25 diperoleh informasi hasil pengawasan dan pemeriksaan higiene sanitasi alat angkut (kapal) di wilayah BBKK Tanjung Priok tahun 2024, yaitu jumlah kapal yang diawasi (diperiksa) sebanyak 11.728 kapal dengan hasil memenuhi

syarat sebanyak 11.634 kapal (99,20%) mengalami penurunan sebesar 0,40% dibanding tahun sebelumnya 2022. Kontribusi terbesar untuk kapal yang memenuhi syarat higiene sanitasi adalah Wilker Muara Angke dan Sunda Kelapa masing-masing 100%, dan terendah adalah Kantor induk Tanjung Priok sebesar 97,8% .

Peningkatan cakupan pemeriksaan ini dipengaruhi adanya pemberlakuan PP No 64 tahun 2019, yang mengharuskan pemeriksaan higiene sanitasi kapal pada penerbitan PHQC selain SSCEC dan COP. Kegiatan pengawasan higiene sanitasi kapal menyerap anggaran sebesar Rp. 92.116.810,- (99,03%) menurun sebesar 0,67%.

2. Pengawasan Pencemaran Udara, Air Limbah, dan Air Badan Air di Wilayah Pelabuhan

Berdasarkan Permenkes nomor 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 pada pasal 47 menjelaskan pengawasan diarahkan untuk mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan, terwujudnya lingkungan yang sehat dan kesiapsiagaan bencana. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilakukan terhadap salah satu penanggung jawab lingkungan permukiman.

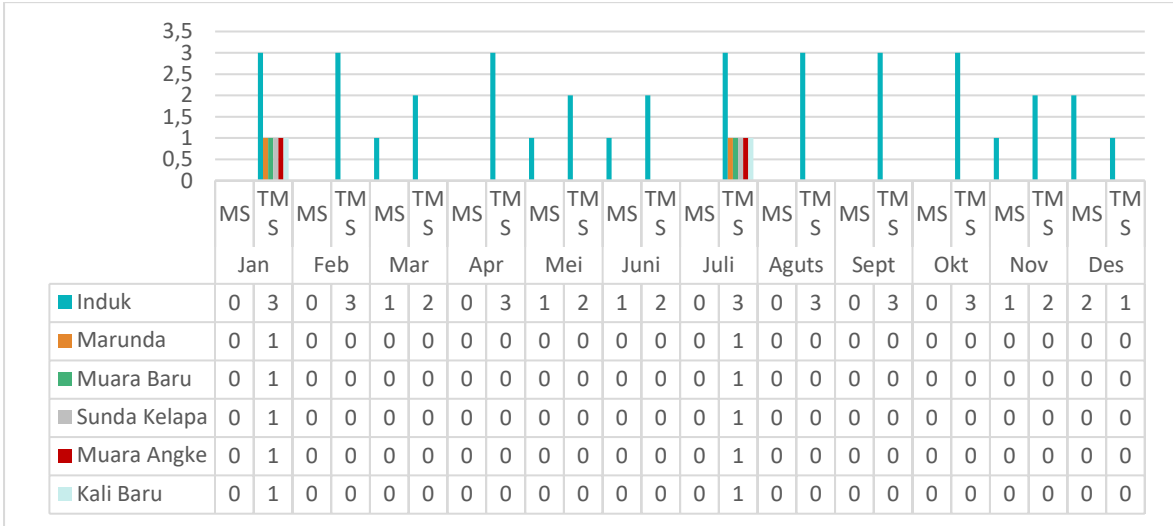
Pengawasan pencemaran udara, air limbah dan air badan air di pelabuhan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan II, melalui pemantauan dan evaluasi pemeriksaan kualitas media lingkungan yaitu antara lain pengukuran dan pengambilan sampel udara, sampel air limbah dan badan air untuk pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan fisik dan kimia sampel udara, limbah dan air permukaan/badan air. Selanjutnya hasil pengukuran dan pengujian sampel dilakukan analisa hasil serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada pengelola pelabuhan. Sebelum melakukan kegiatan pengawasan maka dilakukan pemetaan faktor risiko untuk menentukan titik lokasi pengukuran pengawasan pencemaran udara, air limbah, dan air badan air.

Kegiatan Pengawasan Pencemaran Udara, Air permukaan dan limbah di Pelabuhan telah mengalokasikan anggaran yang dituangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp. 68.610.000,- untuk biaya belanja bahan, pemeriksaan sampel dan belanja perjalanan dinas dalam kota transport petugas dalam pengiriman sampel. Output dari kegiatan ini adalah mengendalikan faktor risiko

lingkungan di wilayah BBKK Tanjung Priok dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan Pencemaran Udara

Grafik 4. 20 Distribusi Hasil Pengukuran Kualitas Udara



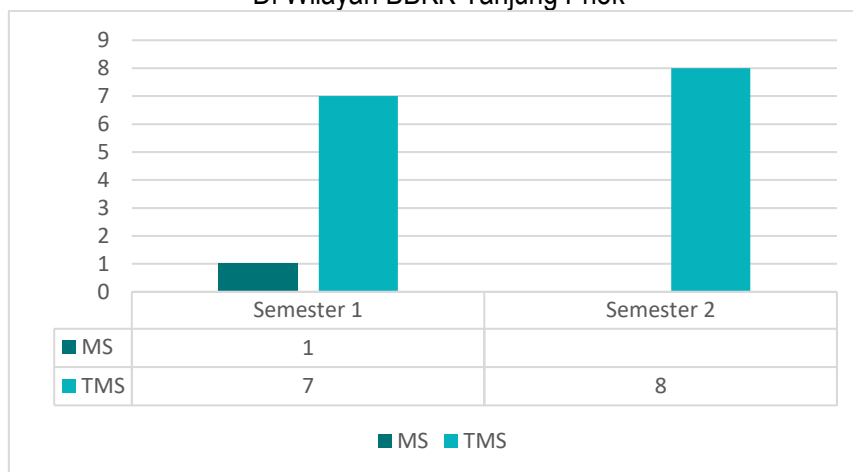
Pencemaran udara yang diukur adalah kadar debu (*particulate matter*) di luar gedung bangunan (*outdoor*) dengan titik sampel pada jalan-jalan umum perimeter pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan grafik 4.28 diketahui bahwa pada semester I dan II tingkat pencemaran udara rata-rata tinggi, di Pelabuhan Tanjung Priok di 2 (dua) titik lokasi yaitu pada semester I di Jalan Raya Nusantara dengan kadar debu 0,489 mg/m³ dan semester II di Jalan Raya Nusantara dengan kadar debu 0,555 mg/m³, selanjutnya di wilayah kerja semester I di Jalan Pendaratan Udang Pelabuhan Muara Angke dengan kadar debu 0,189 mg/m³ dan semester II di Jalan Jayapura Pelabuhan Marunda dengan kadar debu 0,432 mg/m³. Bila diperhatikan, tingginya kadar debu pada semester I Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Raya Nusantara dan Wilker di jalan Pendaratan Udang dipengaruhi oleh keadaan musim kemarau sehingga menyebabkan peningkatan jumlah debu, sedangkan tinggi kadar debu pada semester II Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Raya Nusantara dan Wilker di Jalan Jayapura dapat dipengaruhi oleh kurangnya pohon dan tumbuhan yang tahan terhadap polusi disepanjang jalan raya.

Terhadap kondisi yang ada diberikan rekomendasi kepada pengelola pelabuhan berupa saran edukasi untuk menyediakan dan memfasilitasi alat penyiram air otomatis untuk taman dan jalanan dan menambah pohon tanaman yang tahan terhadap polusi.

b. Pengawasan Pencemaran Air Limbah

Air limbah merupakan air bekas atau air sisa buangan yang bersumber dari rumah tangga/domestik/pemukiman dan komersial seperti industri/perusahaan. Air limbah dapat menjadi beban pencemaran yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Pelabuhan sebagai tempat sarana tempat umum sangat banyak limbah yang dihasilkan oleh aktivitas di pelabuhan, untuk itu air limbah perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan agar kualitasnya memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Grafik 4.29
Distribusi Hasil Pengawasan Pencemaran Air Limbah Industri
Di Wilayah BBKK Tanjung Priok

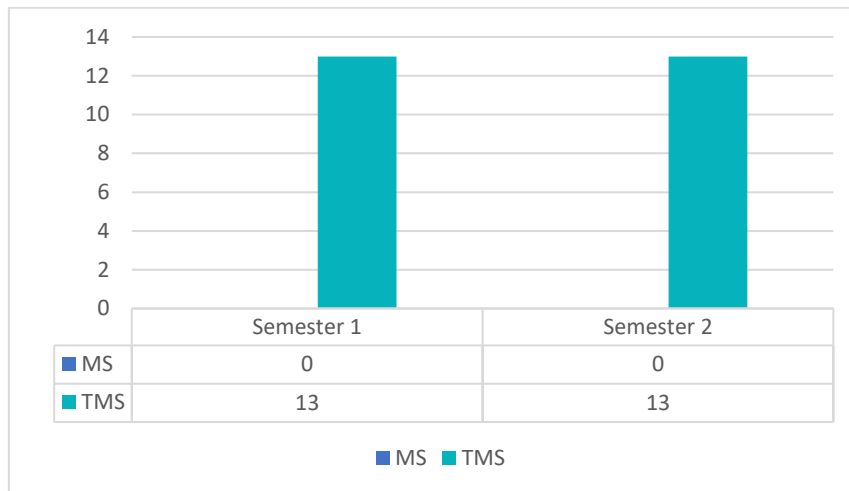


Dari grafik 4.29 dapat diinformasikan bahwa pengawasan terhadap pencemaran air limbah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan II. Titik pengambilan sampel air limbah industri dilakukan di 8 (delapan) titik yaitu ; outlet Batavia Marina Sunda Kelapa, outlet PT. HSD Marunda, outlet Pasar higienis Muara Angke, outlet Dermaga Utara Kalibaru, outlet IPAL Muara Baru, oulet DKB 1, inlet PT JICT dan outlet PT JICT pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap sampel air limbah semester I yang terdapat pada 8 (delapan) titik pengambilan sampel diketahui terdapat 7 (tujuh) titik sampel yang tidak memenuhi syarat dan 1(satu) titik sampel yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk semester II rata-rata 8 (delapan) titik tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran limbah industri adalah tinggi, dan terhadap kondisi pencemaran yang ada diberikan rekomendasi yang

dapat meng-edukasi pihak pengelola (perusahaan) untuk melakukan tindak lanjut pengolahan limbah dengan baik sebelum dibuang ke dalam lingkungan.

Grafik 4. 21 Distribusi Hasil Pengawasan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Badan Air



Dari grafik 4.21 dapat diinformasikan bahwa pengawasan terhadap pencemaran air limbah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan II. Titik pengambilan sampel air badan air dilakukan di 13 (tiga belas) titik yaitu ; Badan air Pelra Pos 1, dermaga gudang di Sunda Kelapa, sungai jalan Ambon, dermaga Jayanti Marunda, dermaga Kali Adem, dermaga T Muara Angke, Dermaga Timur, Dermaga Barat Kali Baru, Dermaga Timur dan Dermaga Barat Muara Baru, Pelabuhan 1, 2 dan 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan grafik 4.21 diatas, dapat diketahui bahwa pada semseter I dan II rata-rata kualitas air badan air di wilayah BBKK Tanjung Priok adalah tidak memenuhi syarat dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup artinya seluruh air badan air yang ada di wilayah BBKK Tanjung Priok memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Terkait dengan kondisi yang ada, telah diberikan saran rekomendasi kepada pihak terkait. Kegiatan pengawasan pencemaran udara, air limbah dan air badan air telah menyerap anggaran sebesar Rp. 68.610.000,- (100%).

3. Pengelolaan Limbah Medis di BBKK Tanjung Priok

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pengelolaan limbah medis yang efektif. Kegiatan pengelolaan limbah medis ini bertujuan untuk mencegah

penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BBKK Tanjung Priok telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.100.000 dalam DIPA untuk membiayai jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah medis infeksius serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jenis limbah medis yang dikelola meliputi limbah padat, tajam, cair yang bersifat infeksius, serta limbah B3 non medis.

BBKK Tanjung Priok telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki lisensi dan sertifikat resmi dalam pengolahan dan pemusnahan limbah medis. Pengangkutan limbah medis dilakukan secara berkala, yakni sebanyak 4 kali pada tahun 2024, yaitu bulan Februari, Juni, Juli, dan November. Selama periode tersebut, total limbah medis yang dihasilkan dan dikelola mencapai 300 kg. Proses pengelolaan limbah medis ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengawasan Penyediaan Sarana Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

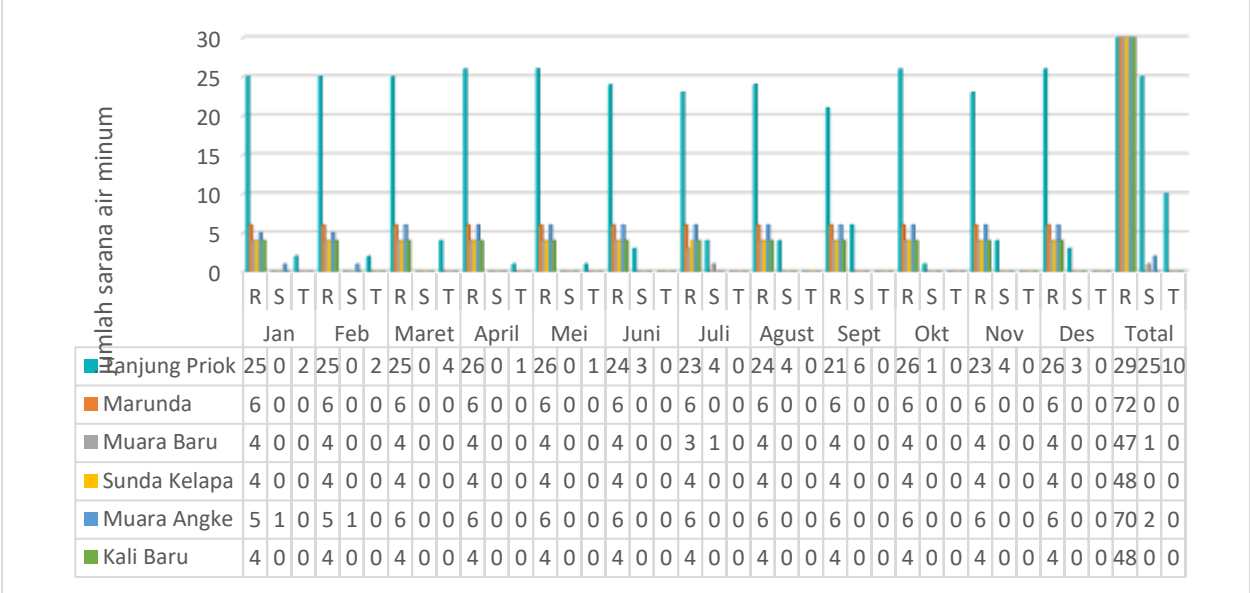
Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Minum di Wilayah pelabuhan adalah kegiatan dalam rangka menjalankan salah satu tupoksi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yaitu menjamin kualitas air di pelabuhan sesuai standart yang di persyaratkan, sehingga air minum di wilayah pelabuhan Tanjung Priok tidak menjadi faktor risiko penularan berbagai penyakit. Kegiatan pengawasan meliputi verifikasi laporan pengawasan internal, observasi fisik melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), pengambilan dan pengujian kualitas air minum, pengolahan dan analisis data serta laporan, analisis dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitas air minum. International Health Regulation tahun 2005, annex 1B poin d tentang kapasitas inti pelabuhan menyebutkan bahwa pelabuhan harus menjamin lingkungan yang aman termasuk menyediakan fasilitas di pintu masuk Negara, antara lain mencakup air minum. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan atau lingkungan salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan fungsi pengawasan penyediaan air minum secara eksternal.

Kegiatan pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum di pelabuhan, telah mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan berupa tenaga serta anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok sebesar Rp. 160.209.000,- yang terdiri

dari pembelian peralatan pengawasan, bahan penunjang pemeriksaan sampel air minum, pemeriksaan sampel air minum lengkap ke Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) serta transport petugas pengiriman sampel air minum. Kegiatan pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum dilakukan secara rutin setiap bulan dan pada situasi khusus (lebaran, natal dan tahun baru) secara terpadu. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum, pengambilan sampel dan pengujian sampel air secara fisik, kimia dan bakteriologis baik di laboratorium Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika), serta instalasi laboratorium BBKK Tanjung Priok.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya suplai air minum yang sehat, bebas dari kontaminasi, aman dan layak untuk dikonsumsi oleh seluruh pengguna jasa dan masyarakat dipelabuhan, dengan gambaran hasil kegiatan sebagai berikut.

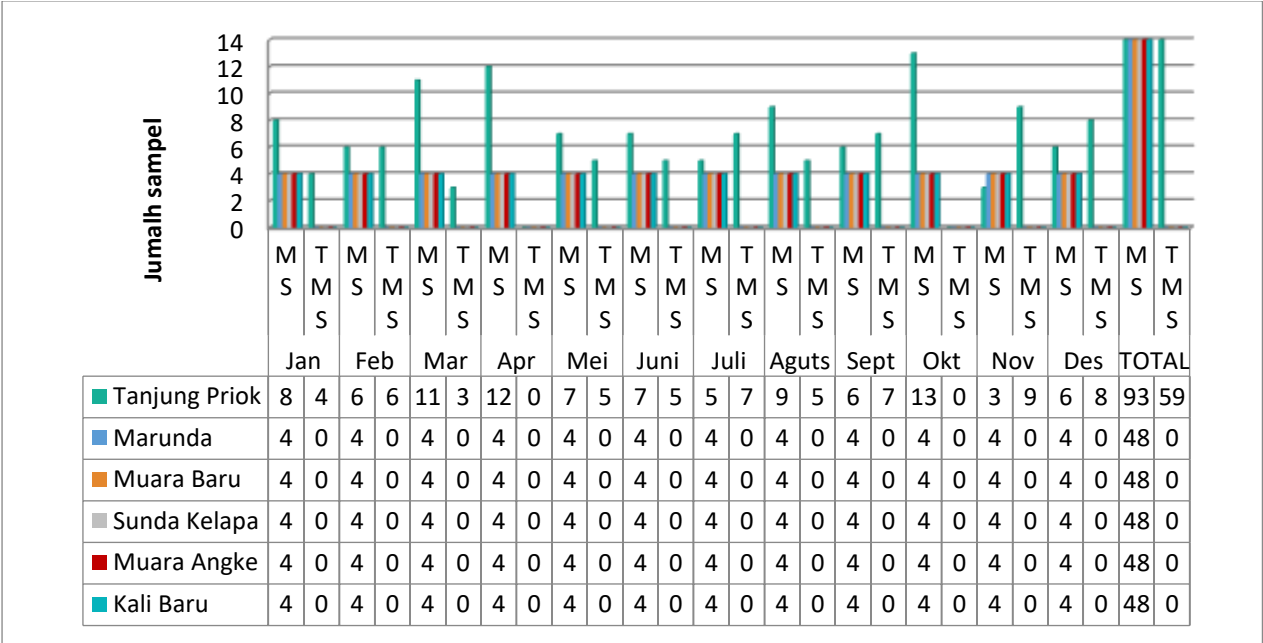
Grafik 4. 22 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Penyediaan Air Minum



Dari grafik 4.22 dapat diinformasikan bahwa kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum di wilayah BBKK Tanjung Priok dilakukan setiap bulan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Total target inspeksi kesehatan lingkungan yang diawasi tahun 2024 adalah sebesar 617 dengan hasil resiko rendah dan sedang sejumlah 579 atau sebesar 93,8%. Terhadap hasil inspeksi yang tidak memenuhi syarat (risiko tinggi) dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap sanitasi lingkungan dan kondisi sarana air minum yang ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan kualitas air minum di pelabuhan juga dilakukan pemeriksaan atau pengujian kualitas air secara fisik, kimia dan bakteriologis. Sampel

air diperiksa dilaboratorium kesehatan lingkungan BBKK Tanjung Priok dan di laboratorium Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan parameter fisik, kimia dan bakteriologis (pemeriksaan E.Coli).

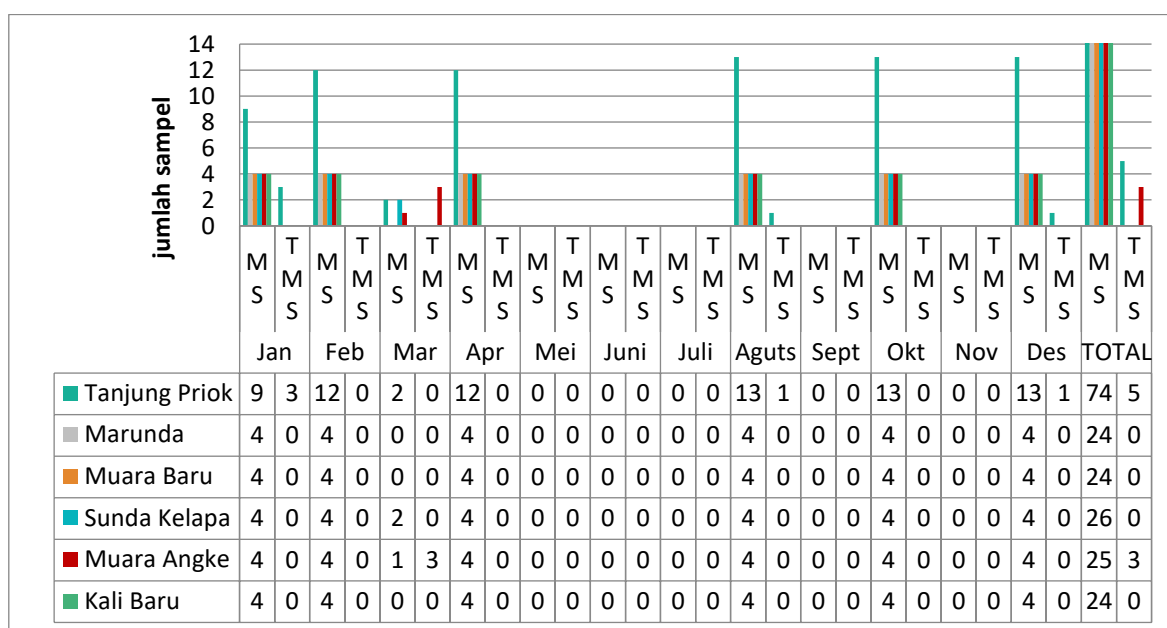
Grafik 4. 23 Distribusi Hasil Pemeriksaan Pengujian Kualitas Fisik Air Minum



Dari grafik 4.23 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa secara fisik adalah 392 sampel, dengan jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 333 sampel (84,9 %) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 59 sampel (15,1 %). Kontribusi tertinggi yang tidak memenuhi persyaratan kualitas fisik air adalah kantor induk Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebesar 38,9% sedangkan ke-5 Wilker lainnya yaitu Marunda, Muara Baru, Sunda Kelapa, Muara Angke dan Kali Baru kualitas fisik air minum adalah memenuhi syarat 100%. Parameter fisik air minum yang diperiksa adalah Total Disolved Solid (TDS) dengan persyaratan baku mutu yang ditetapkan untuk air minum adalah kurang dari 300 (<300) sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan.

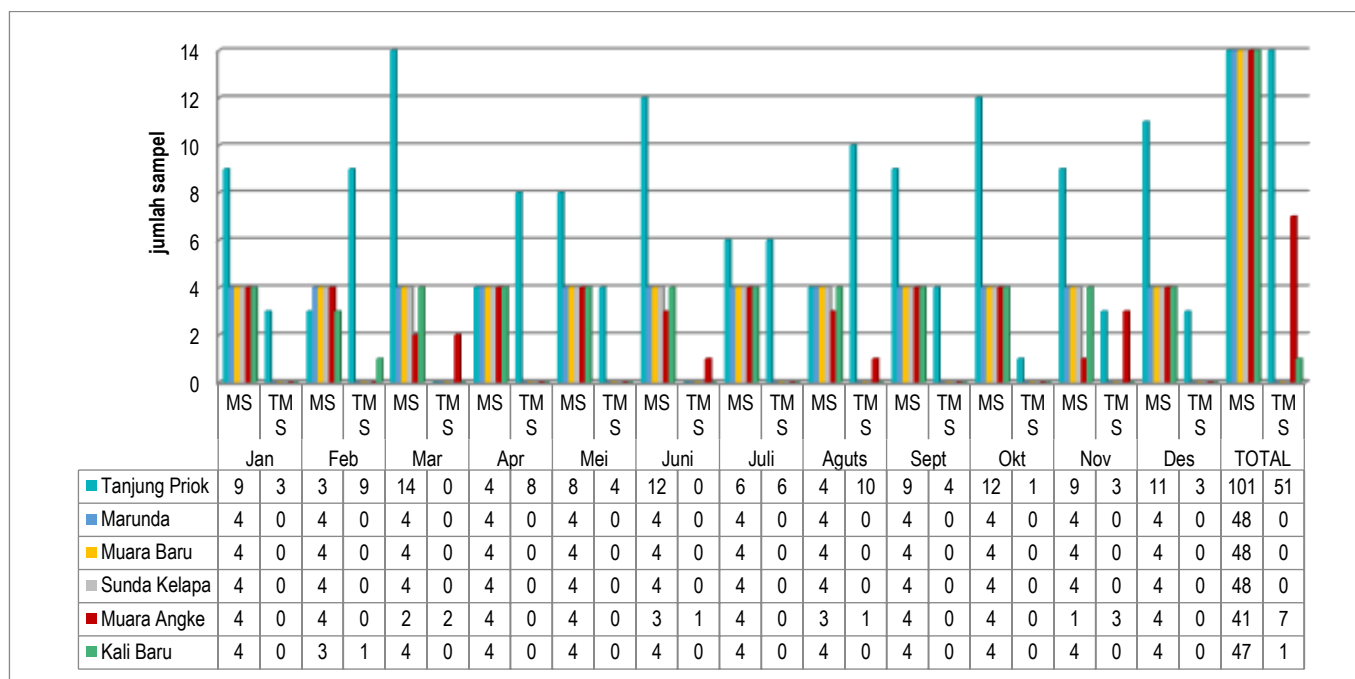
Terkait dengan kualitas fisik air minum yang tidak memenuhi persyaratan telah diberikan rekomendasi kepada penyelenggara/penyedia air minum di pelabuhan untuk dilakukan pengurasan/pembersihan reservoar secara berkala, menutup lubang pengisi air /manhole secara rapat sehingga tidak mudah terbuka dan menjaga kebersihan lingkungan pada semua sarana air minum di pelabuhan.

Grafik 4. 24 Distribusi Hasil Pemeriksaan Kimia Air Minum



Dari grafik 4.24 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa kualitas kimia di Wilayah BBKK Tanjung Priok adalah 205 sampel, dengan jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 197 sampel (96,09%) yang tidak memenuhi syarat 8 sampel (3,91 %). Kontribusi tertinggi untuk kualitas kimia air yang tidak memenuhi syarat adalah di induk sebanyak 5 sampel, kemudian wilker muara angke sebanyak 3 sampel dan terendah adalah Wilker Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda dan Kalibaru adalah 0. Adapun parameter kimia air minum yang diperiksa adalah Fe, Cromium, Nitrat, Nitrit, pH, Cianida (Cn), Mangan (Mn), Sulfat (SO₄), Tembaga (Cu), Ammonia (NH₃) dan Khlorida. Terkait dengan hasil pemeriksaan sampel terkait dengan kualitas kimia air minum yang diperoleh maka kepada penyelenggara/penyedia sarana telah diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan agar bak reservoir selalu tertutup dan lingkungan sekitar reservoir terjaga kebersihannya dan tidak di gunakan untuk kegiatan umum seperti mandi dan mencuci.

Grafik 4. 25 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum



Dari grafik 4.26 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa secara Bakteriologis di Wilayah BBKK Tanjung Priok adalah 392 sampel, dengan jumlah yang memenuhi syarat sejumlah 333 sampel (84,9%) dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 59 sampel (15,1%). Kontribusi tertinggi sampel air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas bakteriologis air adalah di kantor induk Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebesar 33,5% kemudian Wilker Muara Angke 14,5% , Wilker Kali Baru 2,08 % dan terendah adalah Wilker Marunda, Muara Baru dan Sunda Kelapa 0% atau memenuhi syarat 100%.

Parameter Bakteriologis air minum yang diperiksa adalah E.Coli dan Total Coliform dengan persyaratan baku mutu sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023. Terkait dengan hasil pemeriksaan dan kualitas bakteriologis air minum yang diperoleh maka kepada penyelenggara/penyedia sarana telah diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan melalui pengurasan/pembersihan reservoir secara berkala, menutup bak reservoir dengan baik, pemberian atau pembubuhan kaporit kedalam reservoir, pemeriksaan sisa chlor secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan sekitar reservoir serta membuat larangan adanya kegiatan umum seperti mandi dan mencuci disekitar reservoir. Beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan kualitas bakteriologis air tidak memenuhi syarat adalah adanya beberapa lokasi sarana reservoir yang terdapat tumpukan sampah, serta adanya banjir rob karena lokasi

berdekatan dengan kolam pelabuhan disamping adanya kecenderungan pada awal tahun dan akhir tahun berkaitan dengan kondisi musim penghujan dan adanya banjir. Adapun realisasi serapan anggaran kegiatan pengawasan Penyediaan air minum oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp. 160.208.556 (99,9%).

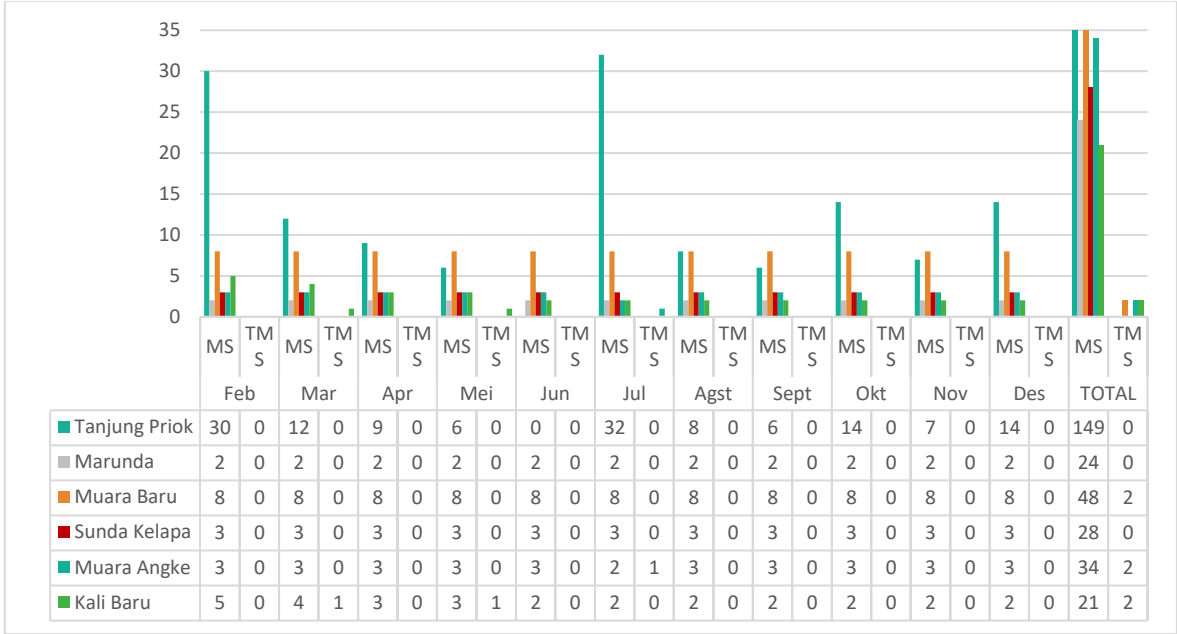
5. Pengamanan Makanan/Minuman, Laik Sehat Jasaboga dan Pengawasan *Supplier* Bahan Makanan Kapal di Wilayah Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024

Kegiatan pengamanan makanan dan minuman di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dilakukan secara rutin setiap bulan. Sesuai dengan *International Health Regulation* 2005, annex 1B poin d tentang kapasitas inti pelabuhan yang menjamin pengamanan terhadap makanan dan tempat pengelolaannya. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menyatakan bahwa pengawasan Tempat pengelolaan Pangan (TPP) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan pengawasan dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) TPP yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan pada saat situasi khusus Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan makanan minuman di SITUS NATARU. Adapun tempat pengelolaan pangan yang diawasi di wilayah pelabuhan Tanjung Priok antara lain adalah rumah makan, sentra kantin dan pangan jajanan, jasa boga/katering dan kegiatan pengawasan supplier bahan makanan ke kapal.

Kegiatan pengawasan pengamanan makanan dan minuman di pelabuhan telah mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebesar Rp.57.837.000,- dengan alokasi penggunaan dana sebesar Rp 33.200.000 terdiri dari pembelian celemek, stiker data rumah makan, pencetakan rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan kantin dan makanan jajanan, jasaboga, rumah makan dan restoran serta depot air minum, sedangkan biaya pengadaan bahan pengawasan makanan/minuman di Pelabuhan sebesar Rp. 9.847.000,-. Biaya transport petugas pengiriman sampel makanan/minuman sebesar Rp. 10.200.000,-. dan biaya transport petugas inspeksi jasaboga sebesar Rp.4.590.000,-. Realisasi serapan anggaran kegiatan pengamanan

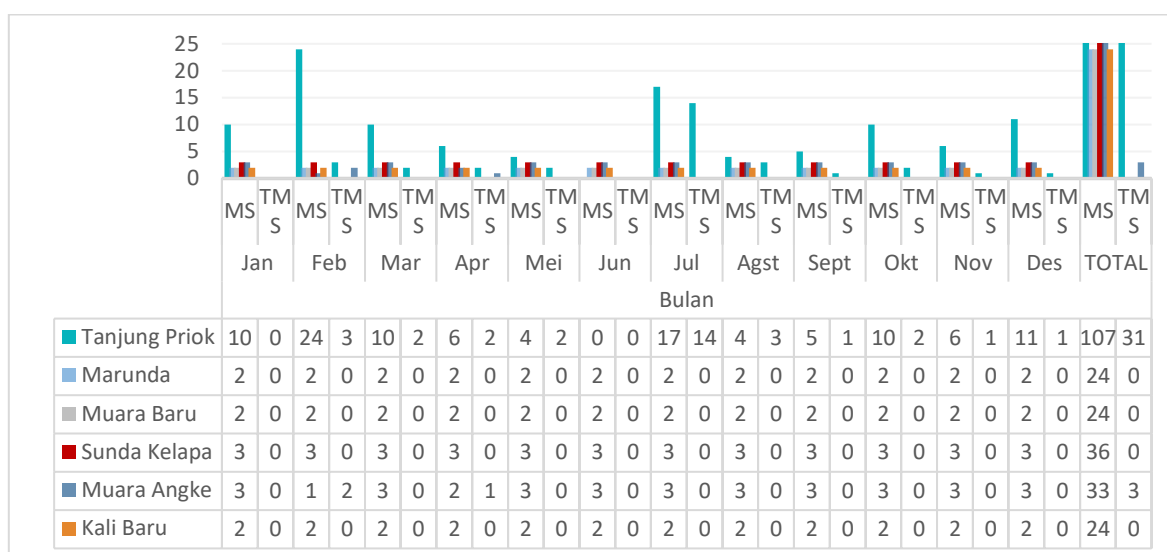
makanan/minuman, laik sehat jasaboga dan pengawasan supplier bahan makanan pada kapal di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 adalah sebesar Rp 57.811.300,- (99,95%).

Grafik 4. 26 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan



Dari grafik 4.26 dapat diinformasikan bahwa jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 adalah sebanyak 371 dengan hasil inspeksi memenuhi syarat sebesar 377 TPP (98,4%). Namun demikian dari beberapa hasil pengamatan masih ditemukan kondisi TPP yang perlu perhatian sehingga saran dan rekomendasi tetap diberikan seperti menjaga sanitasi lingkungan, penyediaan tempat sampah yang tertutup serta sarana cuci tangan, dan pengendalian vektor secara mandiri untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat pelabuhan.

Grafik 4. 27 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Sampel Makanan



Dari grafik 4.27 dapat diinformasikan bahwa pemeriksaan sampel dan pengujian Bakteriologis makanan tahun 2024 di wilayah BBKK Tanjung Priok adalah sebanyak 282 sampel dimana 248 sampel yang memenuhi syarat (88%) dan bila dibandingkan dengan hasil pengujian tahun 2023 jumlah sampel yang memenuhi syarat bakteriologis adalah sebesar 92,16% sehingga terdapat penurunan sebesar 4,16%. Sedangkan untuk hasil pengujian sampel usap alat makan hanya dilakukan di wilayah kantor induk pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 136 sampel dengan hasil ditemukannya total kuman pada 41 sampel (30%) yang tidak memenuhi persyaratan total kuman alat makan.

Pada Tahun 2024 Kantor Induk Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pengawasan terhadap jasa boga dengan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 10 jasa boga dengan hasil memenuhi persyaratan 100%. Demikian juga pengawasan *supplier* bahan makanan ke kapal telah dilakukan sebanyak 180 kapal dengan hasil 100% laik sehat suplai bahan makanan.

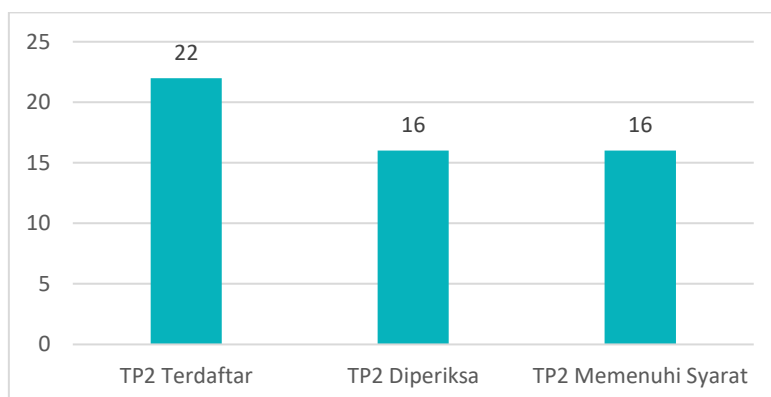
Terkait dengan hasil pemeriksaan uji kualitas mikrobiologis maka kepada pihak pengelola TPP diberikan rekomendasi berupa saran dan edukasi untuk selalu menjaga kebersihan pangan serta peralatan yang digunakan, dan tetap memperhatikan *personal food handler* khususnya dalam proses pengolahan pangan, agar makanan yang dijual atau disajikan terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan pengunjung dipelabuhan, selain itu juga dilakukan upaya pemantauan dan pembinaan kepada pengelola rumah makan dan sentra kantin untuk mencegah dan meminimalisir kualitas pangan yang tidak sehat agar masyarakat pelabuhan terhindar dari bahaya

dan gangguan kesehatan. Adapun realisasi serapan anggaran kegiatan pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp 57.811.300,- (99,95%).

6. Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) di Wilayah BBKK Tanjung Priok

Pengawasan yang dilakukan oleh BBKK Tanjung Priok Sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1350 tahun 2001 tentang pestisida, disebutkan bahwa penggunaan pestisida untuk pemberantasan vektor penyakit dan hama semakin meningkat dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan apabila pengelolaan pestisida tidak memenuhi syarat kesehatan. Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) dipelabuhan ditujukan agar dapat melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan akibat dampak buruk zat kimia tersebut. Kegiatan inspeksi sanitasi diarahkan pada pengawasan terhadap TP2 pestisida di pelabuhan sebanyak 16 lokasi dan terhadap Badan Usaha Swasta (BUS) yang melakukan kegiatan fumigasi kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat izin penyelenggaraan fumigasi. Kegiatan pengawasan TP2 Pestisida telah mengalokasikan anggaran pada DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebesar Rp 3.600.000,- untuk biaya transport petugas ke lokasi. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemberian rekomendasi permohonan dan perpanjangan izin pada BUS dalam rangka penyelenggaraan tindakan hapus tikus dan serangga pada kapal di pelabuhan. Adapun hasil kegiatan pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 4. 28 Distribusi Hasil Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2)



Dari grafik 4.28 dapat diinformasikan bahwa dari 22 lokasi tempat pengelolaan pestisida (TP2) pada BUS yang terdaftar di Wilayah BBKK Tanjung Priok, ada 16 lokasi

yang mengajukan permohonan izin perpanjangan usaha dengan hasil pemeriksaan sanitasi memenuhi syarat 100%. Adapun realisasi serapan anggaran kegiatan pengawasan TP2 oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp. 3.600.000,- (100%).

7. Pengawasan Sanitasi Lingkungan Sarana Bangunan dan Tempat Fasilitas Umum (TFU) di Wilayah BBKK Tanjung Priok

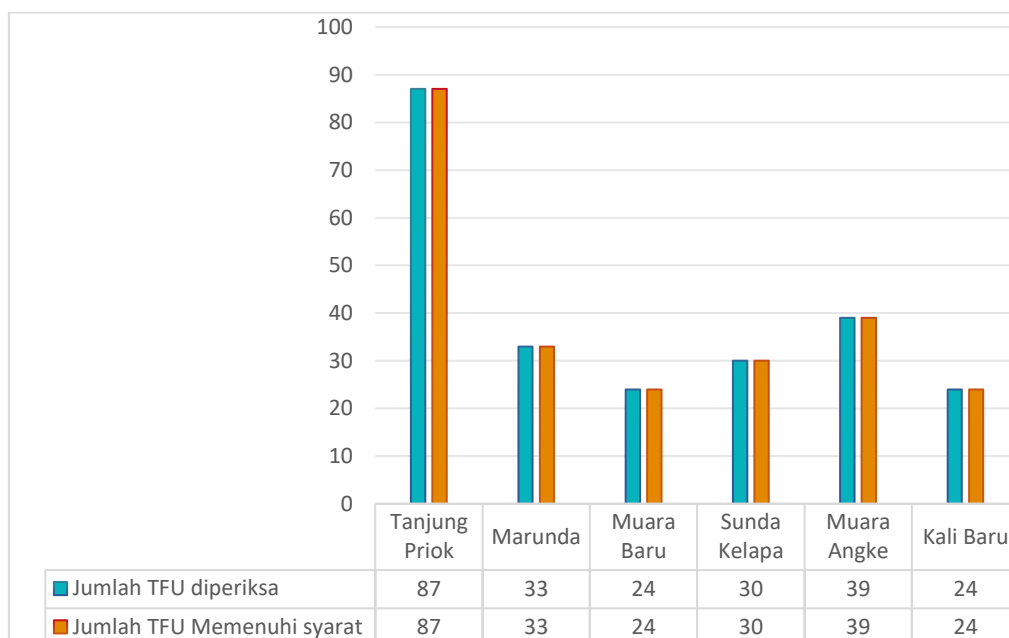
Didalam Permenkes RI No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 6 yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan gedung/bangunan perkantoran/perusahaan dan Tempat-tempat umum yang berada di wilayah pelabuhan dan sekitarnya, dengan tujuan agar faktor risiko kesehatan yang ditemukan dapat dikendalikan. Adapun jenis sarana bangunan dan tempat fasilitas umum di wilayah BBKK Tanjung Priok antara lain; terminal pelabuhan, pasar, masjid, pergudangan, perkantoran/perusahaan yang melayani umum. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal, sehat, aman dan selamat sehingga lingkungan kerja harus didesain sedemikian rupa agar menjadi kondusif, aman dan nyaman bagi pekerja.

Kegiatan Pengawasan kesehatan lingkungan sarana gedung/bangunan dan tempat fasilitas umum di BBKK Tanjung Priok mengalokasikan dana dalam DIPA BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 14.795.000, untuk belanja barang operasional dan biaya transport petugas dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap sanitasi tempat fasilitas umum dan gedung bangunan perkantoran di Pelabuhan Tanjung Priok. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan Sanitasi Tempat Fasilitas Umum di wilayah BBKK Tanjung Priok yaitu sejumlah 82 sarana antara lain Kantor Induk = 28, Wilker Marunda = 11, Muara Baru = 8, Sunda Kelapa = 10, Muara Angke = 13 dan Kali Baru sebanyak 12.

Pengawasan dilakukan 3 kali dalam setahun melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan, pengukuran parameter lingkungan, pemberian rekomendasi kepada pihak

pengelola bangunan. Adapun hasil kegiatan pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 4. 29 Distribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Gedung Bangunan dan Tempat Fasilitas Umum (TFU)



Dari grafik 4.29 Dari grafik tersebut dapat diinformasikan bahwa kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan gedung bangunan perkantoran dan tempat fasilitas umum di wilayah BBKK Tanjung Priok berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan target IKK Tempat-tempat umum tahun 2024 jumlah sarana gedung bangunan perkantoran dan tempat fasilitas umum yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 240 kali. Namun berdasarkan data hasil kegiatan, pencapaian target sarana bangunan tempat-tempat umum yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 246 melebihi target yang ada (102,5%) dengan hasil inspeksi kesehatan lingkungan memenuhi persyaratan sanitasi adalah sebanyak 246 (102,5%). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKK Tempat-tempat umum untuk tahun 2024 sebesar 102,5% melebihi capaian target yang ditetapkan. Akan tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan, masih terdapat komponen penilaian yang perlu ditingkatkan, sehingga kepada seluruh pengelola dan pemilik sarana tetap diberikan saran dan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan sehingga kualitas lingkungan gedung bangunan tempat tempat umum tetap terjaga dan terpelihara dengan baik khususnya terhadap sanitasi kebersihan sarana prasarana dan fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh seluruh pemilik/pengelola tempat-tempat umum.

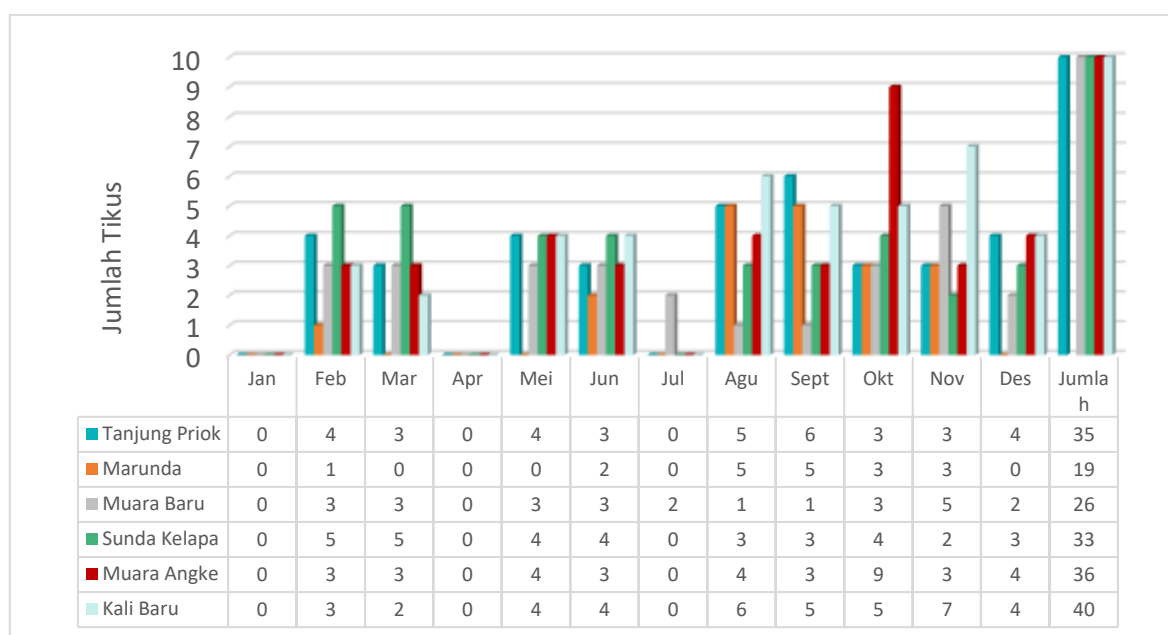
Realisasi anggaran untuk kegiatan Pengawasan Kesehatan Lingkungan Gedung Bangunan dan Tempat Fasilitas Umum di BBKK Tanjung Priok sebesar Rp. 14.795.000 (100%) sebanding dengan realisasi tahun 2023.

8. Layanan Pengendalian Vektor Pes di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok

Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok memiliki fungsi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah pelabuhan. Salah satunya adalah upaya pengendalian vektor Pes. Penyakit Pes adalah penyakit yang ditularkan oleh tikus dan pinjal yang disebabkan oleh agen infeksi *Yersina pestis*. Penyakit ini ditularkan kepada manusia langsung melalui gigitan pinjal yang telah terinfeksi salah satu jenis pinjal adalah *Xenopsylla cheopis*.

Dalam rangka layanan pengendalian vektor Pes di Pelabuhan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp 152.550.000,- untuk kegiatan pemetaan, pembelian bahan dan alat, kegiatan pemasangan perangkat, kegiatan identifikasi tikus dan pinjal dan transport kader di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok serta lima wilayah kerja Pelabuhan lainnya. *output* dari kegiatan ini adalah terkendalnya tingkat kepadatan (*density*) tikus dan pinjal melalui pemasangan perangkat dan identifikasi tikus dan pinjal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan wilayah kerja lainnya, dengan hasil kegiatan sebagai berikut.

Grafik 4. 30 Distribusi Jumlah Tikus Tertangkap pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES



Dari grafik 4.30 dapat diinformasikan bahwa jumlah tikus tertinggi yang tertangkap terdapat di wilayah Pelabuhan Kalibaru yaitu sebanyak 40 ekor, kemudian di Pelabuhan Muara Angke sebanyak 36 ekor, Pelabuhan Tanjung Priok 35 ekor, Pelabuhan Sunda Kelapa 33 ekor, Pelabuhan Muara Baru 26 ekor dan di Marunda 20 ekor. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah tertinggi tikus yang tertangkap ada di bulan Agustus, September, Oktober dan November di Pelabuhan Kalibaru jenis spesies tikus tertangkap adalah *Rattus norvegicus*. Angka success trap diatas masih memenuhi syarat (Nilai Baku Mutu success trap <1 (Permenkes Nomor 02 Tahun 2023).

Grafik 4. 31 Distribusi Jumlah Index Pinjal



Dari grafik 4.31 dapat diinformasikan bahwa indeks pinjal tertinggi ada di pelabuhan Tanjung Priok pada Bulan September sebesar 0,83 dan Bulan Desember sebesar 0,75. Pada Wilayah kerja rata-rata angka indeks pinjal antara 0 sampai 0,5. Berdasarkan hasil penghitungan ratio indeks pinjal di wilayah BBKK Tanjung Priok angka indeks pinjal tersebut masih memenuhi syarat Nilai Baku Mutu Indeks Pinjal Umum <2 dan Indeks Pinjal Khusus <1 (sesuai dengan: Permenkes nomor 2 Tahun 2023). Realisasi serapan anggaran kegiatan pengendalian tikus dan pinjal di pelabuhan dalam rangka layanan pengendalian vektor pes di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 adalah sebesar Rp.152.509.000,- (99,9%).

9. Layanan Pengendalian Vektor DBD Dalam Rangka Pengendalian Vektor Nyamuk di Wilayah Pelabuhan

Pengendalian vektor nyamuk DBD di wilayah BBKK Tanjung Priok adalah merupakan langkah dan upaya pengendalian penyakit dengan maksud tujuan mencegah dan mengendalikan populasi nyamuk khususnya vektor penyakit DBD yang dapat ditularkan kepada masyarakat dipelabuhan. Adapun kegiatan pengendalian nyamuk DBD meliputi survey, *larvasidasi* dan *fogging* dengan luas wilayah layanan survei vektor DBD sebesar 144 hektar. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan survei Vektor DBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 51.840.000,- pada DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024. *Output* dari kegiatan layanan survei vektor DBD meliputi survei dan pengendalian tingkat kepadatan jentik nyamuk di pelabuhan dengan menggunakan metode visual dan pemasangan ovitrap, pelaksanaan *fogging* dilakukan bila index jentik tinggi dan antisipasi pada situasi khusus. Berikut hasil kegiatan layanan pengendalian vektor DBD dipelabuhan Wilayah BBKK Tanjung Priok . Untuk survey jentik nyamuk DBD dilakukan pada tempat-tempat seperti bangunan dan *container* atau bak-bak penampungan air. Adapun tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui banyaknya bangunan dan *container* tempat penampungan air yang berisi jentik nyamuk vektor DBD di area pelabuhan. Berikut hasil kegiatan survey jentik nyamuk DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024.

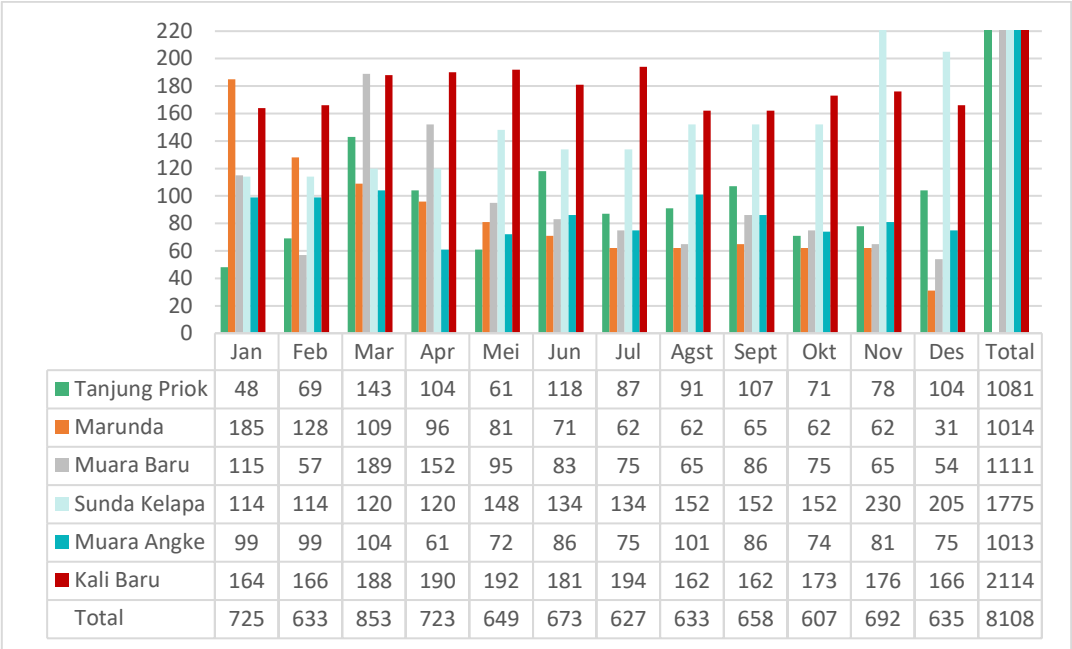
Grafik 4. 32 Distribusi Jumlah Bangunan Diperiksa Pada Kegiatan Survei Vektor DBD



Dari grafik 4.32 dapat diinformasikan bahwa total bangunan yang dilakukan survei jentik di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebanyak 1.573 bangunan, dengan

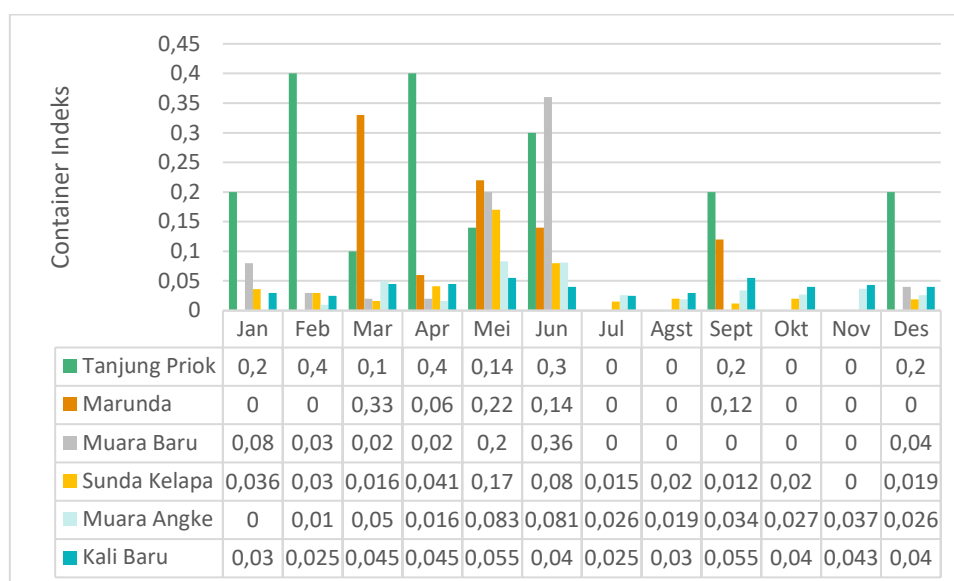
jumlah bangunan yang diawasi terbanyak adalah di wilker Kalibaru sebanyak 480 bangunan, Hal ini disebabkan karena pemeriksaan dilakukan pada area perimeter dan buffer yang berdekatan dengan pemukiman warga. sedangkan di wilayah Kantor Induk Tanjung Priok dan wilker lainnya untuk pengamatan jentik hanya dilakukan di area perimeter saja.

Grafik 4. 33 Distribusi Jumlah Container di Periksa Pada Kegiatan Layanan Survei Vektor DBD



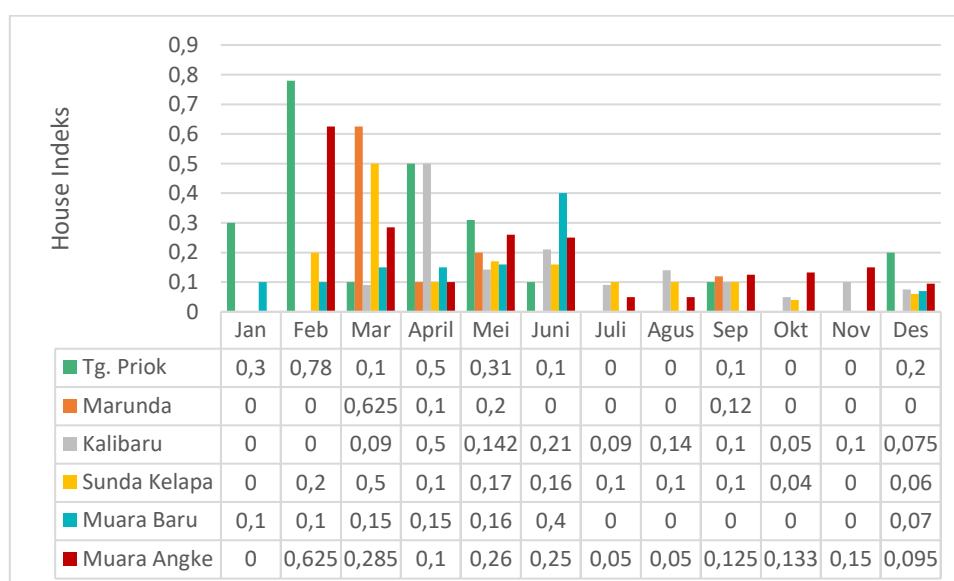
Dari grafik 4.33 dapat diinformasikan bahwa total *container* tempat penampungan air yang diperiksa jentiknya dalam tahun 2024 adalah 8.108 *container* dengan jumlah tertinggi yang diperiksa adalah Kalibaru dengan jumlah 2.114 *container*, sedangkan jumlah terendah *container* yang diperiksa adalah di ada wilayah kerja Marunda sebanyak 1.014 *container*.

Grafik 4. 34 Distribusi Container Indeks Jentik Vektor Penyakit Demam Berdarah (DBD)



Dari grafik 4.34 dapat diinformasikan bahwa rata-rata *Container Index* (CI) yang tertinggi pada tahun 2024 adalah di Kantor Induk Pelabuhan Tanjung Priok.

Grafik 4. 35 Distribusi House Index (HI) Jentik Vektor Penyakit DBD



Dari grafik 4.35 dapat diinformasikan bahwa rata-rata angka *House Index* (HI) tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kantor Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan pengendalian vektor yang dilakukan adalah kombinasi dari beberapa metode secara terpadu serta mendorong peran serta masyarakat pelabuhan untuk tidak selalu melakukan pengendalian menggunakan bahan kimiawi yang jika dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan resistensi vektor. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus dengan

tujuan memutuskan daur hidup nyamuk Aedes. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan adalah :

- Pengendalian jentik dengan Larvasidasi yang dilakukan setiap bulan yakni pada saat hasil survei tingkat kepadatan jentik tinggi dan ditempat penampungan air yang susah atau jarang sekali dilakukan pengurasan.
- Pengendalian nyamuk dewasa dengan Pengasapan/*Fogging* berdasarkan hasil survei jentik dengan indikator CI dan HI yang tinggi.
- Diseminasi Informasi terhadap para pengelola bangunan dan *stake holder* di lingkungan pelabuhan.

Realisasi serapan anggaran Layanan Pengendalian Vektor DBD di oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 18.936.000,- (99%).

10.Layanan Pengendalian Vektor Diare Di Wilayah Pelabuhan Dalam Rangka Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit Di Pelabuhan Tanjung Priok

Tempat dan Fasilitas Umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum. Sebagai tempat berjumpanya berbagai jenis masyarakat, tempat-tempat umum memiliki potensi terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan lainnya, sehingga sanitasi tempat-tempat umum harus melengkapi persyaratan kesehatan yang berarti dapat memelihara, menjaga, dan meningkatkan derajat kesehatan. Tempat umum wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan. Salah satunya yaitu tempat pengelolaan pangan (TPP).

Lalat dan kecoak merupakan salah satu vektor penting dalam penyebaran penyakit dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sering dijumpai dalam keseharian kita. Lalat dan kecoak dapat berperan pada ekosistem dalam proses pembusukan, sebagai predator, parasit pada serangga, dan sebagai polinator. Merupakan salah satu vektor penyakit pada sistem pencernaan yang mempunyai tempat perindukan di tempat-tempat yang kotor. Keberadaan lalat dan kecoak di suatu tempat mengindikasikan bahwa tempat tersebut tidak bersih / tidak higienis.

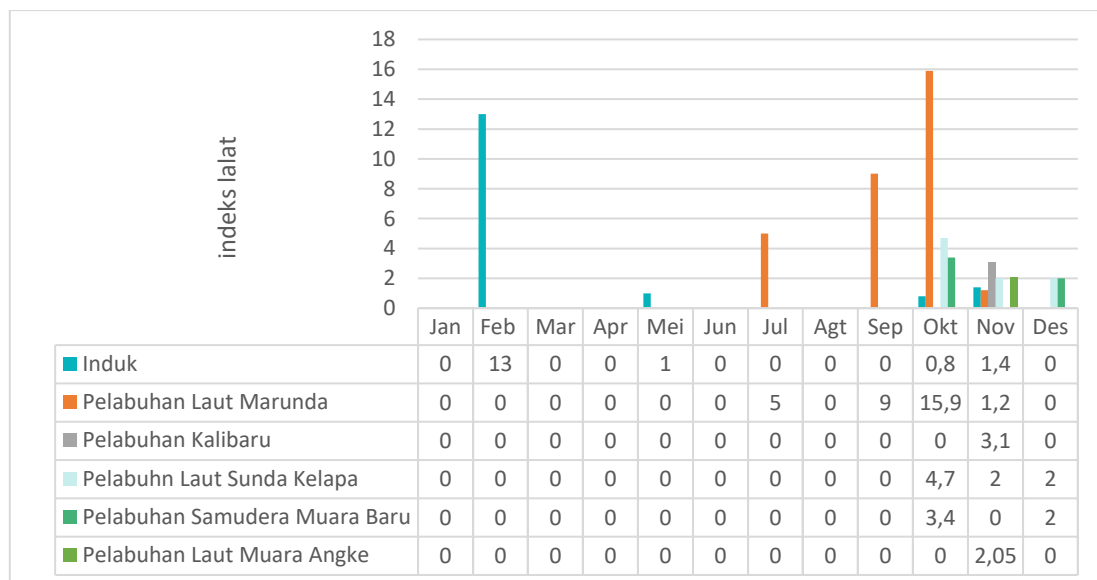
Lalat dan kecoak mempunyai peranan yang cukup penting dalam penularan penyakit, agent penyebab diare seperti salmonella, entamoeba histolitica, *typhoid/thypus*, disentri, cholera dan virus hepatitis A.

Tempat pengelolaan pangan merupakan tempat yang paling aman dan nyaman bagi lalat dan kecoak untuk berkembangbiak, dimana setiap kegiatan yang dilakukan

pada tempat ini akan selalu menghasilkan limbah dan sampah. Untuk itu perlu upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik demi terwujudnya Pelabuhan bersih dan sehat.

Kegiatan layanan pengendalian vektor penyakit diare di BBKK Tanjung Priok telah mengalokasikan anggaran pada DIPA Balai Besar Kekearifan Kesehatan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 48.821.000 terdiri atas kegiatan kegiatan survei faktor risiko penyakit diare, pengendalian faktor risiko penyakit diare, dan pengadaan peralatan bahan pengendalian lalat dan kecoak. *Output* dari kegiatan layanan pengendalian vektor penyakit diare adalah diketahuinya indeks populasi vektor lalat dan kecoak melalui kegiatan survei lalat menggunakan *fly trap* dan perangkap kecoak pakai habis untuk kecoak. Jika hasil survei didapatkan indeks kepadatan tinggi maka dilakukan tindakan pengendalian berupa penyemprotan (*spraying*). *tindakan pengendalian* menggunakan bahan kimia insektisida. Berikut hasil kegiatan pengendalian vektor diare (lalat dan kecoa) di Wilayah Balai Besar Kekearifan Kesehatan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024.

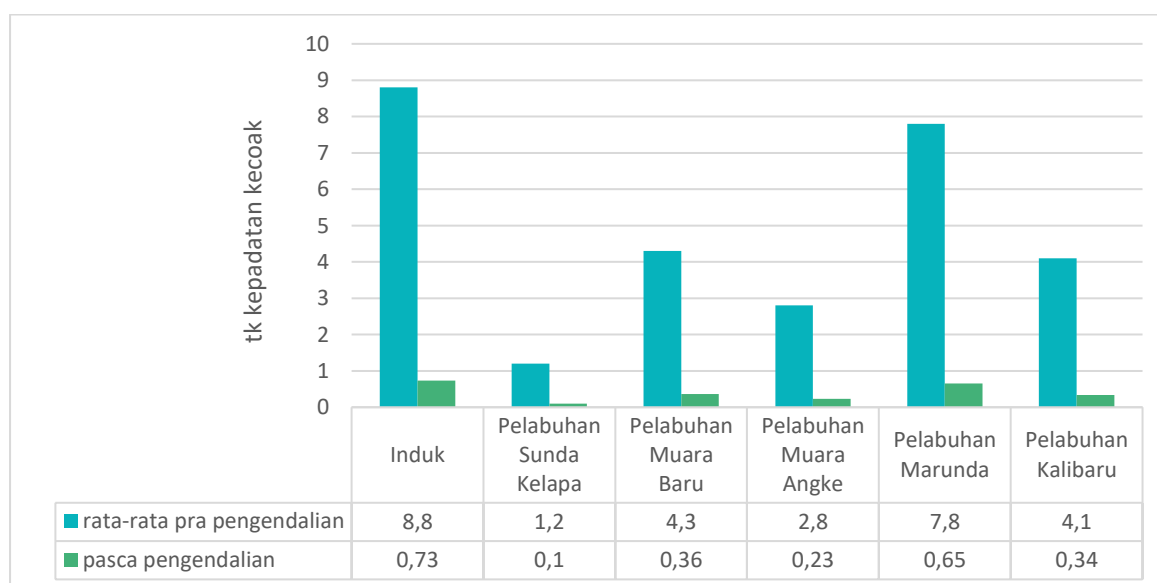
Grafik 4. 36 Distribusi Indeks Populasi Lalat Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Lalat



Berdasarkan grafik 4.36 diketahui bahwa indeks populasi lalat di wilayah BBKK Tanjung Priok mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil survei kepadatan lalat yang dilakukan yaitu tingkat kepadatan lalat tertinggi terdapat di wilayah kerja Pelabuhan Laut Marunda sebesar 15.9 pada bulan Oktober, kemudian kantor induk Pelabuhan Tanjung Priok dengan indeks kepadatan = 13 yaitu pada bulan Februari, kemudian di

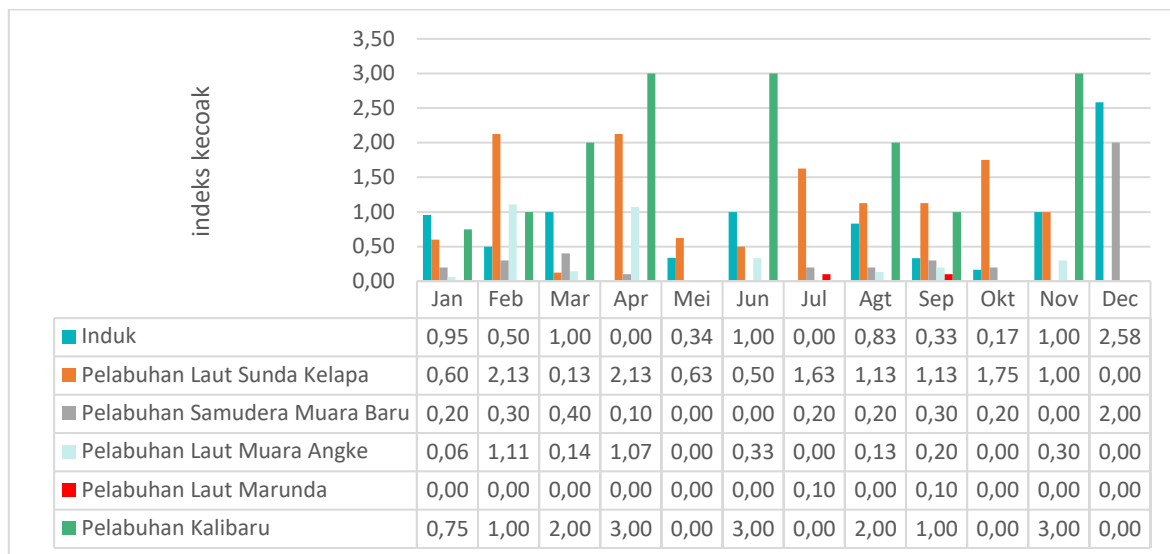
Wilker Pelabuhan Laut Sunda Kelapa pada bulan Oktober sebesar 4,7. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya penumpukan sampah organik pada TPS yang disediakan di pelabuhan, ketidaktepatan waktu pengangkutan sampah dari jadwal yang telah ditentukan serta perilaku masyarakat dipelabuhan baik pengunjung/penumpang, dan para pemilik kantin/warung yang kadang-kadang tidak menyediakan tempat sampah yang memadai. Terkait dengan kepadatan populasi lalat yang masih tinggi, rekomendasi telah disampaikan kepada pihak pengelola pelabuhan, agar sampah dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan mengatur jadwal pengangkutan yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, dalam rangka pengendalian tingkat kepadatan lalat yang tinggi, serta melakukan penyemprotan (*spraying*) menggunakan bahan kimia insektisida sebagai alternatif terakhir untuk menekan populasi lalat yang tinggi.

Grafik 4. 37 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Lalat Pasca Tindakan Pengendalian



Berdasarkan grafik 4.37, dapat diinformasikan bahwa rata-rata angka tingkat kepadatan lalat di wilayah BBKK Tanjung Priok melebihi standar baku mutu sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian untuk menurunkan tingkat kepadatan lalat. Terkait dengan hasil pengukuran angka kepadatan lalat yang tinggi dilakukan spraying/penyemprotan sehingga tingkat kepadatan lalat pasca pengendalian menurun dan telah memenuhi baku mutu (< 2) yaitu dibawah 2 (dua), dengan tingkat kepadatan lalat tertinggi sebesar 0.73 di wilayah kanti Induk Pelabuhan Tanjung Priok.

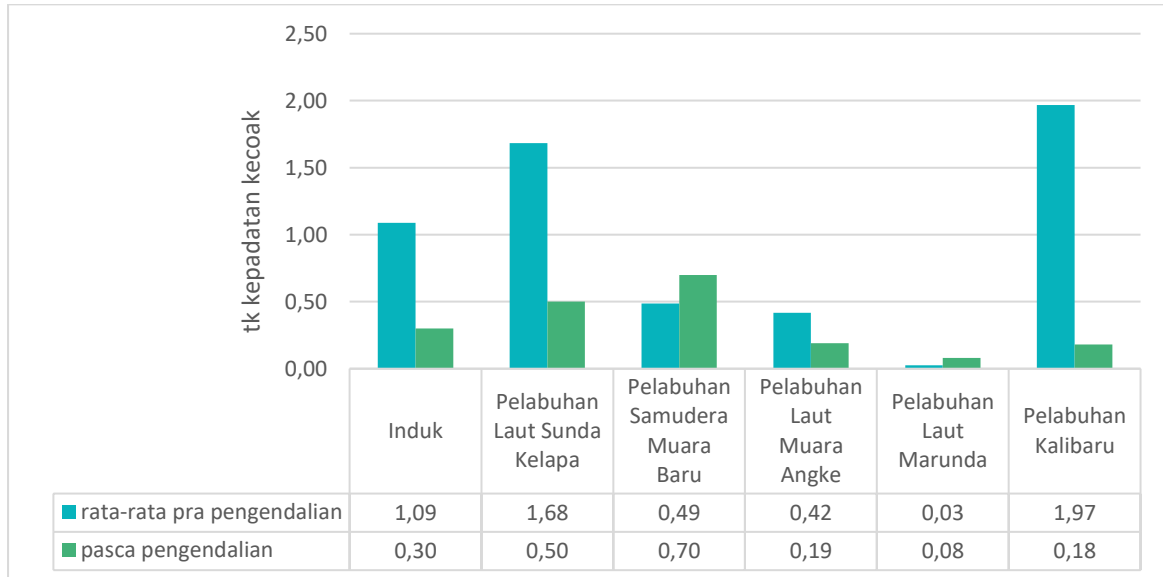
Grafik 4. 38 Distribusi Indeks Populasi Kecoak Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Kecoak



Berdasarkan grafik 4.38 dapat diinformasikan indeks populasi kecoak tahun 2024 dengan indeks tertinggi terdapat di Wilayah kerja Pelabuhan Kali Baru pada bulan April, Juni dan November sebesar 3,00. Kemudian angka kepadatan tertinggi selanjutnya terdapat di induk pada bulan Desember sebesar 2,58, dan di wilker Pelabuhan Sunda Kelapa pada bulan Februari dan April sebesar 2,13. Sedangkan di Wilayah kerja Pelabuhan Laut Muara Baru, Pelabuhan Laut Muara Angke dan Marunda indeks rata-rata setiap bulannya adalah dibawah 2 (<2) artinya masih dalam standar baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan Permenkes No.2 Tahun 2023. Beberapa faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah kurangnya sanitasi lingkungan di pelabuhan, dimana terjadi penumpukan sampah organik sisa-sisa makanan yang berasal dari aktivitas penduduk. Terkait dengan indeks populasi kecoak yang tinggi, kepada pihak pengelola pelabuhan telah diberikan rekomendasi untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di semua tempat-tempat umum dan bangunan yang memiliki kegiatan dan aktivitas di pelabuhan. Selain itu, disarankan agar sampah yang ada dikelola dengan baik dengan menjadwalkan frekuensi pengangkutan sampah setiap hari kurang dari 24 jam dari semua TPS yang ada dipelabuhan. Edukasi dan penyuluhan juga diberikan kepada para pengelola/pemilik rumah makan/warung/kantin untuk meningkatkan sanitasi lingkungan tempat pengelolaan makanan dalam rangka mengendalikan perkembangbiakan vektor kecoak pada tempat pengelolaan pangan di pelabuhan. Sebagai alternatif terakhir

dalam upaya pengendalian populasi tingkat kepadatan kecoak yang tinggi dilakukan penyemprotan (*disinseksi*) dengan menggunakan insektisida.

Grafik 4. 39 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Kecoak Pasca Tindakan Pengendalian



Berdasarkan grafik 4.39 di atas dapat diinformasikan bahwa angka kepadatan kecoak rata-rata di wilayah BBKK Tanjung Priok tidak melebihi standar baku mutu tetapi di beberapa tempat pengelolaan pangan diperlukan tindakan pengendalian untuk menurunkan tingkat kepadatan kecoak tersebut. Terkait dengan hasil pengukuran angka kepadatan kecoak yang tinggi dilakukan spraying/ penyemprotan sehingga tingkat kepadatan kecoak pasca pengendalian menjadi rendah dan berada di bawah standar baku mutu yang ditetapkan (<2) sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Adapun Realiasi serapan anggaran kegiatan layanan survei vektor diare tahun 2024 adalah sebesar Rp. 48.821.000,-(99.98%) meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 0.99%.

11. Pelatihan Teknis Tenaga Sanitarian dan Entomolog

Kegiatan Pelatihan dan Workshop di Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan untuk Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka di kelas. Kegiatan pelatihan dan workshop telah mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 447.389.000,- yang terdiri dari :

- 1) Pelatihan Program Orientasi Kader PVBPP di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Bagi kader pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit Tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 25 Januari 2024 di Lantai 4 Gedung BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini menggunakan anggaran Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Pelatihan Sanitarian dalam rangka Tanggap Darurat Bencana / Kejadian Luar Biasa tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang yang berlangsung selama 3 hari terhitung tanggal 28 Februari – 02 Maret 2024 di Meeting Room Rasamala Lantai 3 Sany Rosa Hotel Bandung, Jalan Dr. Setiabudi Jl. Hegarmanah No.2A, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141. Kegiatan pelatihan ini menggunakan anggaran Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebesar 184.000.000,-
- 3) Pelatihan Deteksi Dini dalam rangka Surveilans Vektor & Binatang Pembawa Penyakit Tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang yang dilaksanakan selama 3 hari terhitung tanggal 21 – 24 Februari 2024 di Meeting Room Glorious, Lantai Lobby Fabu Hotel Bandung, Jalan. Kebon Jati No.32, Kebon Jeruk, Kecamatan. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40181. Kegiatan ini menggunakan anggaran Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 128.000.000,-
- 4) Workshop Pemeliharaan alat pengawasan kesehatan Tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang dilaksanakan selama 1 hari tanggal 22 April 2024 di Ballroom 3 Lt 5 Gedung STP IPB Taman Kencana Bogor. Jl. Taman Kencana No.3, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128. Kegiatan ini menggunakan anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024 sebesar Rp. 85.000.000,-

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan teknis bagi petugas Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan teknis pengendalian resiko lingkungan di Kantor Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2024. Dengan serapan anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 447.000.000,- (99,9%).

B. PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian visi dan misi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yaitu mewujudkan pintu masuk negara dan wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko, Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BBKK Tanjung Priok tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

1. Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
2. Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Resiko di pintu masuk negara.

Pencapaian Kinerja pada masing- masing indikator dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Faktor Risiko Penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebesar (TTU, TPP, Inspeksi Sanitasi Penyehatan Air Bersih, Pemeriksaan Air, Rekapitulasi Hasil Survei Vektor)	1717	1993	116 %
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan. Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPP, Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, Tindakan Pengendalian Vektor)	100 %	100%	100 %
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara (Jumlah)			
		- Indeks pinjal ≤ 1	100%	100%	100 %
		- Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100%	100%	100 %
		- Kepadatan Kecoa <2	100%	100%	100 %
		- Kepadatan lalat < 2	100%	100%	100 %
		- Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%	100%	100 %
		- Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100%	100%	100 %
		- lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	84	84	100 %
		- lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	133	133	100%
			32	32	100 %

C. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan BBKK Tanjung Priok dengan alokasi pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 1.402.004.000,-

dengan Total Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.399.873.599,- (99,84%) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 99,48 % seperti terlihat pada tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Tabel Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan

Anggaran	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan	1.402.004.000	1.399.873.599	99,84%

D. Target Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Penerimaan PNBP oleh Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan berupa jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan sertifikat izin penyelenggara alat angkut (kapal/pesawat), Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan sanitasi rumah makan/restoran dalam rangka penerbitan sertifikat laik higine sanitasi rumah makan atau restoran di lingkungan pelabuhan, Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan sanitasi jasaboga dalam rangka penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga di lingkungan Pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas darat negara (PLBDN), dan jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan kualitas air dalam rangka penerbitan sertifikat kualitas air di pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas darat negara (PLBDN), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 14 Tabel Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

No	Jenis PNBP	Target		Realisasi	
		Jumlah Dokumen	Rupiah (Rp)	Jumlah Dokumen	Rupiah
1	Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan sertifikat izin penyelenggara alat angkut (kapal/pesawat)	4	4.000.000	7	7.000.000
2	Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan sanitasi rumah makan/restoran dalam rangka penerbitan sertifikat laik higine sanitasi rumah makan atau restoran di lingkungan pelabuhan	-	-	-	-

3	Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan sanitasi jasaboga dalam rangka penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga di lingkungan Pelabuhan/bandar udara/ pos lintas batas darat negara (PLBDN)				
	Kelas A	-	-	-	-
	Kelas B	-	-	2	150.000
	Kelas C	-	-	-	-
4	Jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pengawasan/pemeriksaan kualitas air dalam rangka penerbitan sertifikat kualitas air di pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas darat negara (PLBDN)	-	-	5	250.000
JUMLAH		4	4.000.000	8	7.400.000,-

Berdasarkan tabel 4.14 Total penerimaan PNBPN Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan pada Tahun 2024 sebesar Rp 7.400.000,- atau sebesar (185 %) melebihi target PNBPN yang telah ditentukan.

4.1.4 PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS

A. Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Kegiatan yang menunjang pada Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah adalah sebagai berikut :

a) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru

1) Input :

- Pagu anggaran sebesar Rp 20.520.000,-
- Dilaksanakan di Ruang Rapat Onrust Lantai 4 BBKK Tanjung Priok

2) Ouput :

- Realisasi anggaran Rp 20.520.000,- atau 100%
- Pada 30 Januari 2024 Evaluasi Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru 2023 (48 Peserta)
- 19 Maret 2024 pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan situasi khusus idul fitri tahun 2024 (48 Peserta)

- 21 Mei 2024 pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan pelayanan situasi khusus idul fitri tahun 2024 (48 Peserta).
- Pada 18 Desember 2024 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru 2025 (48 Peserta).
- Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru dengan lintas program dan lintas sektor
- Koordinasi evaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru dengan lintas program dan lintas sektor dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan

b) Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan VCT Mobile dan Deteksi Dini Terduga TB

1) Input :

- Pagu anggaran sebesar Rp. 12.600.000,-
- Belanja bahan sebesar Rp. 7.500.000,- dan Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 5.100.000,-
- Dilaksanakan di Ruang Rapat Onrust Lantai 4 KKP Kelas I Tanjung Priok

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 12.600.000,- 100 % serapan
- Koordinasi kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 dan Evaluasi pada tanggal 26 Oktober 2023
- BBKK Tanjung Priok dapat melaksanakan layanan deteksi dini terduga TB dilaksanakan sebanyak 14 kali
- Dari 703 orang yang discreening TB terdapat empat puluh enam (46) orang terduga TB dan dua (2) orang yang positif TB
- KKP Kelas I Tanjung Priok dapat melaksanakan mobile VCT sebanyak 50 kali dengan 710 orang yang discreening HIV/AIDS
- Dari 710 orang yang discreening HIV/AIDS ada 2 orang yang reaktif HIV/AIDS dan dirujuk ke Puskesmas Kec.Pademangan.
- Terjalannya komunikasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait program pengendalian TBC dan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan Tanjung Priok

c) Koordinasi Penggunaan Website SINKARKES dalam rangka Penerbitan Buku ICV di Klinik dan Rumah Sakit

1) Input:

- Anggaran Rp. 15.750.000,-
- Peserta pertemuan sebanyak 70 orang yang terdiri dari Penanggungjawab/Manajemen Rumah Sakit/Klinik serta staf BBKK Tanjung Priok
- Pertemuan dilaksanakan ruang rapat Onrust Lantai 4, BBKK Tanjung Priok.

2) Output:

- Realisasi anggaran Rp. 15.750.000,- atau 100% serapan
- Dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 02 Februari 2024 dan 25 s.d 27 September 2024
- Meningkatnya pengetahuan tentang prosedur vaksinasi Internasional bagi RS dan Klinik
- Implementasi pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan pelaku perjalanan internasional bagi pelaku perjalanan
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi sinkronisasi dalam penerbitan buku ICV di RS dan Klinik

d) Penguatan Jejaring Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional

1) Input:

- Anggaran Rp. 55.115.000,-
- Dilaksanakan sebanyak satu kali
- Peserta pertemuan sebanyak 73 orang yang terdiri dari 48 orang perwakilan klinik dan RS, 1 orang staf teknis DIT. Surkarkes, dan 23 orang pegawai BBKK Tanjung Priok
- Pertemuan dilaksanakan di hotel dalam kota (DKI Jakarta)

2) Output:

- Realisasi anggaran Rp. 55.115.000,- atau 100% serapan
- Dilaksanakan sebanyak 1 kali
- Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring klinik dan RS pelaksana pelayanan vaksinasi internasional

e) Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Input:

- Anggaran Rp. 1.310.000,-

2) Output:

- Realisasi anggaran Rp. 1.310.000,- atau 100% serapan

- Terdiri dari pelaksanaan kegiatan Lakip selama tiga hari sebanyak satu orang Bulan April 2024 dengan jumlah Rp.1.140.000,- dan kegiatan transport lokal halal bihalal selama satu hari sebanyak satu orang dengan jumlah Rp. 170.000,-
- Pertemuan SAKIP dilaksanakan dilaksanakan di Kementerian Kesehatan Percetakan Negara dan halal bihalal di Kementerian Kesehatan.

f) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Desember tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 38.120.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 37.977.362,- (99%), berikut rincian kegiatan:

- 1) Koordinasi dan advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus dalam rangka Desk, Penelitian dan Reviu RKA/KL pagu Dirjen P2P TA 2025 sebanyak 2 orang di Gedung Record Center tanggal 19 Juli 2024, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.780.000,-
- 2) Koordinasi dan advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus dalam rangka menghadiri undangan pemberian hasil evaluasi ombidsman RI tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik tahun 2023, yang diadakan di ruang rapat lantai III Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan tanggal 4 Juli 2024 sebanyak 2 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.340.000,-
- 3) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik Klinik di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2024 di Horison Ultima Suites & Residences Jalan H.R Rasuna Said Tower 3, Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan sebanyak 1 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.380.000,-
- 4) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan orientasi pengambilan keputusan berbasis data bagi Kepala BBKK di hotel Harper Malioboro Yogyakarta tanggal 4.s.d 6 Juni sebanyak 1 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.348.064,-

- 5) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas) Sitem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Harris Hotel Batam Centre Batam pada tanggal 11-14 Juni 2024 dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus sebanyak 1 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.678.220,-
- 6) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka biaya penyelenggaraan Pertemuan Nasional (Pernas) Sitem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Harris Hotel Batam Centre Batam pada tanggal 11-14 Juni 2024 dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus sebanyak 1 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.560.000,-
- 7) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan reviu RKA/KL, pagu anggaran 2025 sebanyak 2 orang di gedung record center, tanggal 21 s.d. 22 juli 2024, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.520.000,-
- 8) Koordinasi dan advokasi faktor kesehatan risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka mengikuti Computer Assisted Competencies Test (CAT) di Gedung Badan Kepegawaian Negara Jakarta tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak 1 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.170.000,-
- 9) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus terkait konsultasi dalam rangka akan diadakannya webinar nasional ke balai besar Pelatikan Kesehatan Ciloto tanggal 5 September 2024 sebanyak 3 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.766.978,-
- 10) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus terkait penyusunan jenias dan tarif atas jenis PNBP jasa layanan kekarantina kesehatan di ruang rapat ketua tim kerja keuangan dan BMN sesditjen P2P Jakarta Selatan tanggal 6 September sebanyak 3 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.510.000,-

- 11) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan reviu RKA/KL pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 sebanyak 3 orang di Gedung D record Center, Jakarta Pusat 2 Oktober 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.140.000,-
- 12) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus pertandingan bulu tangkis dalam rangka memperingati HUT ke – 101 Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat tanggal 23 – 25 September 2024 sebanyak 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.600.000,-
- 13) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan reviu RKA/KL pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 sebanyak 1 orang di hotel horison, bekasi, tanggal 7-8 Oktober 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.415.800,-
- 14) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan reviu RKA/KL pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 sebanyak 2 orang di hotel horison, bekasi, tanggal 7-10 Oktober 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.838.300,-
- 15) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko kes org, kegawatdaruratan dan Situasi khusus terkait konsultasi ke Balai BBOK Ciloto dalam rangka keg. Pelatihan /peningkatan kompetensi yg dpt dilakukan di BBOK Ciloto pada tanggal 21 Oktober 2024 sebanyak 3 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.790.000,-
- 16) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko kes org, kegawatdaruratan dan Situasi khusus kegiatan berkonsultasi mengenai peta proses bisnis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2024 sebanyak 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 340.000,-
- 17) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko kes org, kegawatdaruratan dan Situasi khusus kegiatan pertemuan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus kepada para agen perubahan /champion di lingkungan unit kerja Kemenkes di

- Kimaya Slipi Jakarta Hotel by Harris, Jalan Letjen S.Parman Nomor Kavling 59, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta pada tanggal 25 s.d 27 September 2024 sebanyak 2 (dua) orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.800.000,-
- 18) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko kes org, kegawatdaruratan dan Situasi khusus kegiatan festival inovasi kesehatan tahun 2024 dalam rangka hkn ke 60 bertempat di hail a dn hail b jakarta convention center, jakarta pusat, tanggal 8 - 9 November 2024 sebanyak 6 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.020.000,-

B. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

a) Verifikasi dan Pengawasan Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV

1) Input :

- Pagu anggaran sebesar Rp. 85.368.000,-
- Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Imunisasi dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional

2) Output:

- Realisasi anggaran Rp. 85.331.356,- atau 99,96% serapan, Sisa anggaran Rp. 36.644,-
- Dari total 62 Rumah Sakit/Klinik Pratama yang mengajukan permohonan izin pelayanan vaksinasi telah dilaksanakan Verifikasi seluruhnya dan telah diberikan izin sebanyak 61 Rumah Sakit/Klinik Pratama sedangkan yang tidak diberikan izin sebanyak 1 Rumah Sakit/Klinik dikarenakan hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perdirjen nomor SR.03.04/II/2745/2018.
- Verifikasi dalam rangka penerbitan buku ICV dirumah sakit/ klinik pratama di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan 32 kali verifikasi
- Verifikasi dalam rangka penerbitan buku ICV dirumah sakit/ klinik pratama di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan 30 kali verifikasi
- Pengawasan dalam rangka penerbitan buku ICV dirumah sakit/ klinik pratama di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan 3 kali dan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan 1 kali
- Rumah Sakit/Klinik Wilayah DKI Jakarta yang diberikan izin pelayanan vaksinasi sebanyak 63 Rumah Sakit/ Klinik dan 4 Rumah Sakit/Klinik ditolak tidak

diberikan izin karena tidak sesuai dengan Perdirjen nomor SR.03.04/II/2745/2018

b) Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember tahun 2024

1) Input :

- Anggaran Rp. 38.120.000,-

2) Output:

- Realisasi anggaran Rp. 37.977.362,- atau 99,6 % serapan, sisa Rp. 142.638,-
 - Penanganan kesehatan pada penumpang di Terminal Nusantara Pura II Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 51 kali layanan.
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus kegiatan sosialisasi peraturan terkait pelayanan penumpang berkebutuhan khusus dalam rangka koordinasi dan pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus yang dilaksanakan di Hotel Novotel Tangerang Tangcity Superblock pada tanggal 19 Maret 2024 sebanyak 1 orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 485.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (1445 H) Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 di Bigland Sentul Hotel & Convention Bogor 22-23 Maret 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.586.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus kegiatan dalam rangka pengambilan reagen R2 dan R3 HIV/AIDS di Gudang Sudinkes Jakarta Utara, Sunter sebanyak 1 orang tanggal 18 Maret 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 170.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus kegiatan Media Luncheon Kesiapan Angkutan Laut Lebaran Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 di Lumire Hotel & Convention Center Jakarta pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 170.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Kegiatan Evaluasi selesainya Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran (1445H) Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 di Harris Hotel

Sentul City Bogor pada tanggal 29 April 2024 sebanyak 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.300.000,-

- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka kegiatan Pertemuan Desk Penyusunan Petunjuk Perencanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2025 tanggal 19-21 Juni 2024 di The 101 Suryakencana Bogor, jalan Suryakencana nomor 179-181 Kota Bogor sebanyak 2 (orang) orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.186.243,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan revidi RKA/KL pagu anggaran 2025 di hotel Horison, Bekasi sebanyak 2 orang tanggal 24 s.d. 27 Juli 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.195.727,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam pertemuan penyesuaian peta proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebanyak 3 orang tanggal 26 Agustus 2024 di Ruang Rapat Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta realisasi anggaran sebesar Rp 2.146.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka vaksinasi Meningitis bagi Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di gedung BPK RI Pusat jalan Gatot Subroto Kavling 31 Bendungan Hilir Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2024 sebanyak 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 340.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka vaksinasi meningitis meningokokus bagi pimpinan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di kantor badan pengatur hilir minyak dan gas bumi migas jalan kapten tendean kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2024 sebanyak 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 340.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka desk, penelitian dan revidi RKA/KL pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 sebanyak 1 orang di gedung record center, Jakarta Pusat, tanggal 4 Oktober 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 170.000,-

- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pertemuan penyusunan Logical Framework tanggal 28 - 30 Oktober 2024 sebanyak 1 orang di Ruang Rapat Balai Besar Kekearifan Kesehatan Soekarno Hatta dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.101.500,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka relokasi vaksin yellow fever ke BKK Kelas I Bandung pada tanggal 15 November 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.007.000,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025 di Hotel Harris Sentul City Bogor tanggal 09 Desember 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.150.200,-
- Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka Pembayaran transport pemeliharaan dan kalibrasi alkes di PT Samator Indo Gas, Cakung Jakarta Timur tgl 19,20 Desember 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 340.000,-

C. Pelayanan Publik Lainnya

a) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS

1) Input :

- Pagu anggaran sebesar Rp 36.792.000
- Terdiri dari belanja bahan Rp. 27.272.000,- dan transport petugas fasyankes Rp. 9.520.000
- Target sasaran 700 orang yang dapat discreening HIV/AIDS

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 36.766.000,- atau 99% serapan, sisa anggaran Rp. 26.000
- Mobile VCT dilaksanakan di Wilayah kerja BBKK Tanjung Priok
- Sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS
- Petugas BBKK Tanjung Priok melaksanakan mobile VCT sebanyak 28 kali dengan 873 orang yang discreening HIV/AIDS
- Dari 873 orang yang discreening HIV/AIDS terdapat satu (1) orang yang reaktif HIV/AIDS dan dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Cilincing

b) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB

1) Input :

- Pagu anggaran sebesar Rp 76.370.000
- Terdiri dari belanja bahan Rp. 71.610.000,- dan transport lokal petugas fasyankes Rp. 4.760.000,-
- Target sasaran 700 orang yang dapat discreening TB

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 74.349.000,- atau 99% serapan, sisa anggaran Rp. 21.000
- Deteksi Dini Terduga TB dilaksanakan di Wilayah kerja BBKK Tanjung Priok sebanyak 10 kali dan di Wilayah BBKK Tanjung Priok sebanyak 4 kali.
- Sosialisasi tentang risiko dan gejala Penyakit TB
- Petugas Puskesmas kecamatan setempat melaksanakan layanan survei factor risiko penyakit TB sebanyak 14 kali dengan 703 orang yang discreening TB
- Dari 703 orang berdasarkan hasil discreening TB terdapat 26 orang diduga kasus TB, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditemukan satu orang reaktif TB dan dilakukan rujukan untuk ditangani pihak Puskesmas Setempat.

D. Layanan Pemeriksaan orang, barang, alat angkut

a) Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS

1) Input :

- Anggaran Rp. 25.500.000,-

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 25.500.000,- atau serapan sebesar 100 % serapan
- Terdiri dari transport petugas BBKK Tanjung priok sebanyak 50 kali kegiatan
- Setiap kegiatan dikerjakan oleh 3 petugas BBKK Tanjung Priok

b) Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit TB

1) Input :

- Anggaran Rp. 7.140.000,-

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 7.140.000,- atau serapan sebesar 100 % serapan
- Terdiri dari transport petugas sebanyak 14 kali kegiatan
- Setiap kegiatan dikerjakan oleh 3 petugas BBKK Tanjung Priok

- Dari 703 orang berdasarkan hasil discreening HIV/AIDS terdapat 26 orang diduga kasus TB, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditemukan satu orang reaktif TB dan dilakukan rujukan untuk ditangani pihak Puskesmas Setempat.

E. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk

a) Pengadaan Bahan/Alat Bahan Media dan Non Medis untuk Pelayanan dan Advokasi Kesehatan

1) Input :

- Anggaran Rp. 215.722.000,-

2) Output :

- Realisasi anggaran Rp. 215.292.377,- atau serapan sebesar 99.76 %
- Terdiri dari bahan habis pakai dan belanja modal
- Bahan Penunjang Kegiatan Teknis untuk Program Pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar

F. Pelatihan Kesehatan BTCLS, ACLS dan Wound Care

Pelatihan *BTCLS* dan *International Vaccination Service For ICV (P3VI) and Travel Health Course*, Penjaminan Mutu Laboratorium dan Update Analisa Sperma, *On The Job Training* Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Medis, *On The Job Training* Pelayanan Medis di Kapal, *On The Job Training Basic Life Support* Bagi Petugas Medis dan Non Medis:

Total anggaran Rp. 443.474.000, realisasi Rp. 443.244.000 atau 99,72%

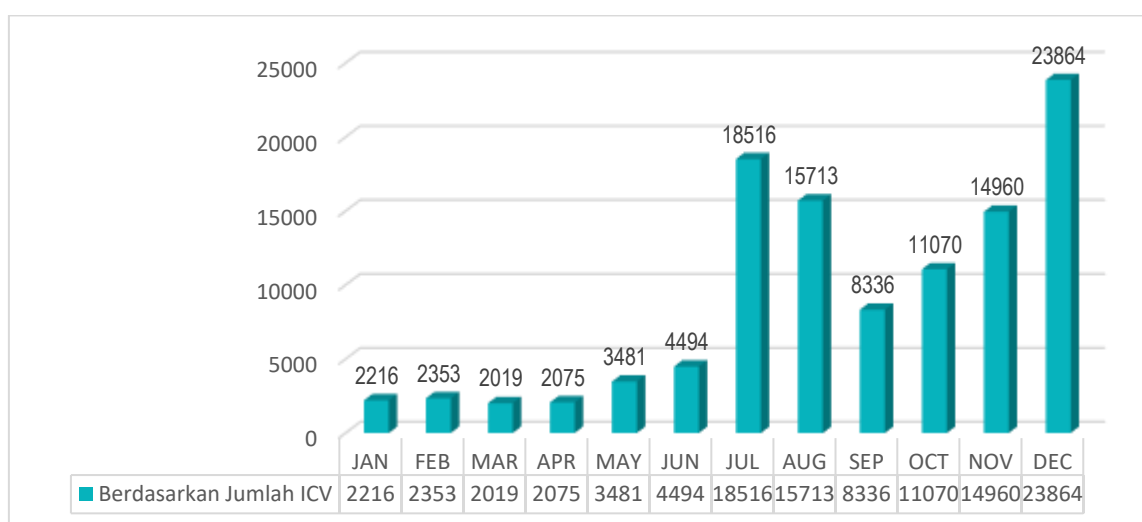
- Pelatihan *BTCLS* sebanyak 3 orang pada tanggal 9-11 Mei 2024 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 9.730.000
- Pelatihan *International Vaccination Service For ICV (P3VI) and Travel Health Course* sebanyak 9 orang, pada tanggal 1-4 Mei 2024 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 69.804.000
- Pelatihan Penjaminan Mutu Laboratorium dan Update Analisa Sperma pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 500.000
- Penyelenggaraan pelatihan/seminar/workshop lainnya dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 0,- (tidak terserap)

- e) *On The Job Training* Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Medis pada tanggal 29 Februari s.d. 1 Maret 2024 yang diikuti oleh 50 peserta dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 160.000.000,- atau 100%
- f) *On The Job Training* Pelayanan Medis di Kapal 27 Maret 2024 yang diikuti oleh 50 peserta dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 42.600.000,- atau 100%
- g) *On The Job Training Basic Life Support* Bagi Petugas Medis dan Non Medis di 7 s.d. 8 Maret 2024 yang diikuti oleh 50 peserta dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 160.000.000,- atau 100%

G. Kegiatan Penunjang

1. Penerbitan ICV

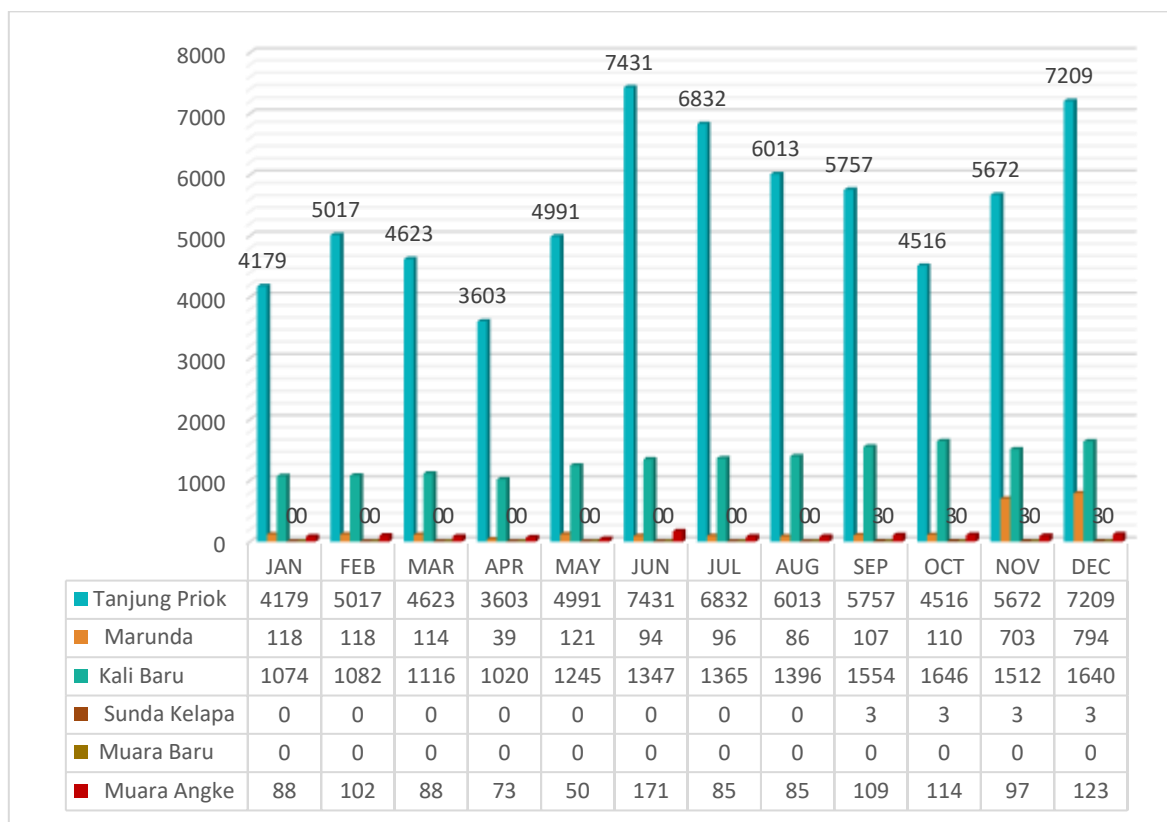
Grafik 4. 40 Distribusi Penerbitan ICV (International Certificate of Vaccination)



Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 109097 ICV yang diterbitkan, jumlah penerbitan ICV terbanyak pada Bulan Desember sebanyak 23864 buku, dan jumlah penerbitan ICV paling sedikit pada Bulan Januari sebanyak 2216 buku. Data tersebut didapat dari kantor Induk. Pada tahun 2024 tidak ada wilker yang melakukan penerbitan ICV.

2. Jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal

Grafik 4. 41 Distribusi pemeriksaan ICV Awak Kapal



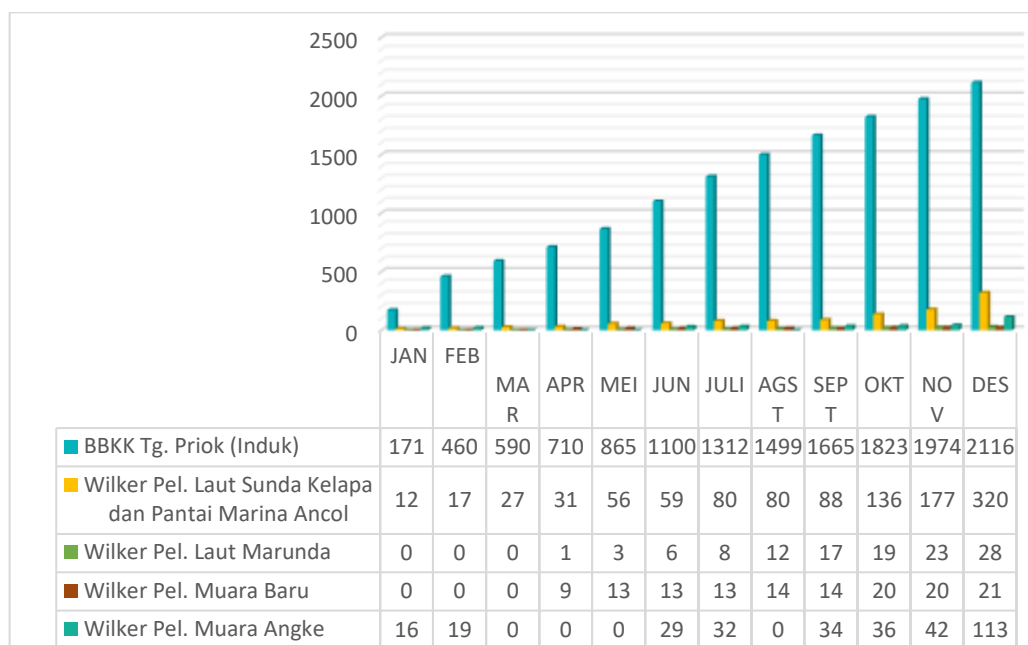
Berdasarkan diagram penerbitan ICV Awak Kapal Tahun 2024 didapatkan hasil bahwa:

- Jumlah pemeriksaan ICV Awak kapal pada Tahun 2024 terbanyak berada di Wilayah Induk BBKK Tanjung Priok sebanyak 7431 ICV, sementara jumlah pemeriksaan ICV Awak kapal pada Tahun 2024 terkecil berada di Muara Baru sejumlah 0 ICV.
- Penerbitan ICV awak kapal Tahun 2024 terbesar terdapat di bulan Desember sejumlah 9769 ICV, sementara penerbitan ICV terkecil pada tahun 2024 terdapat di bulan April sejumlah 4735 ICV.

3. Jumlah Kunjungan Poliklinik (selain penumpang)

Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik selain penumpang BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

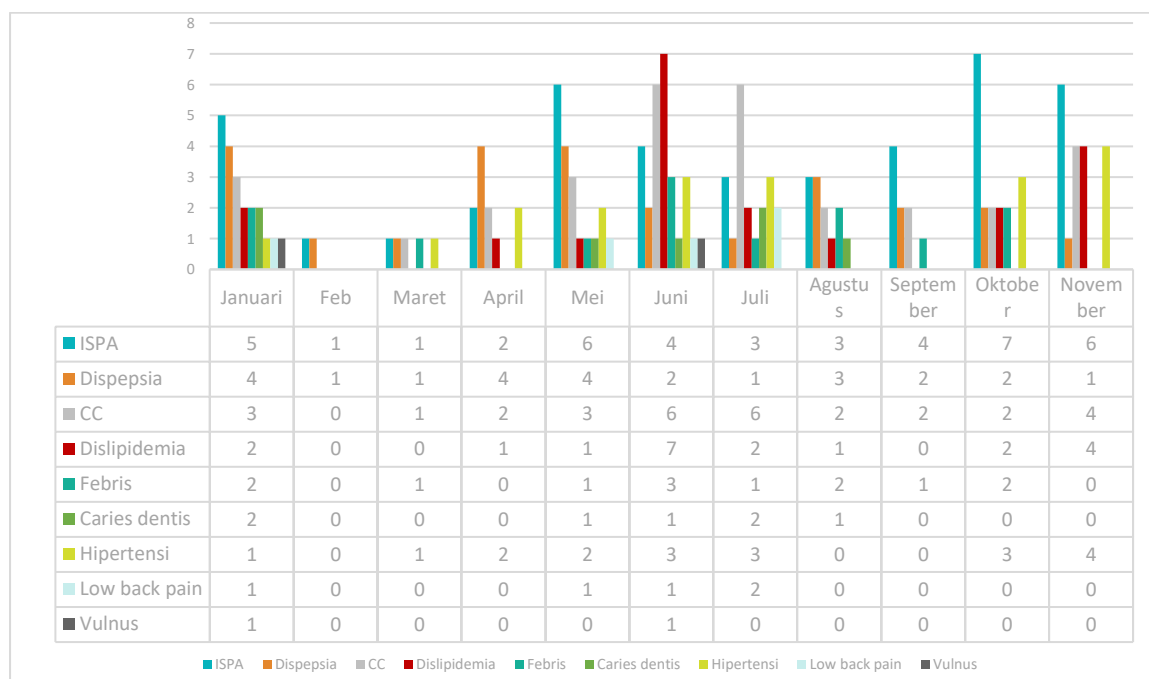
Grafik 4. 42 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik Selain Penumpang



Berdasarkan diagram jumlah kunjungan poliklinik BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

- Jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terbanyak berada di Wilayah Induk BBKK Tanjung Priok sebanyak 14285 orang, sementara jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terkecil berada di Wilayah Pelabuhan laut Marunda sejumlah 117 orang.

Grafik 4. 43 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kasus Penyakit

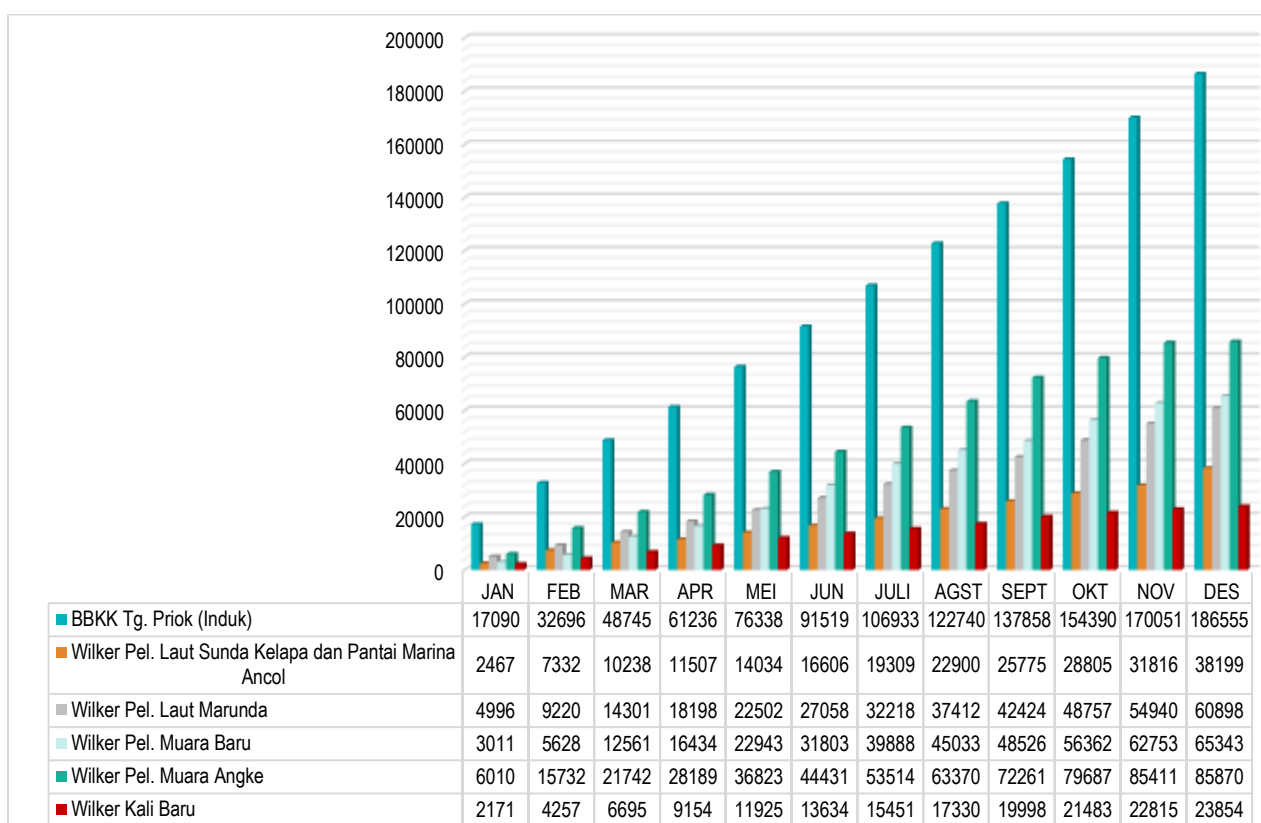


Berdasarkan diagram Jumlah Kunjungan Poliklinik berdasarkan kasus penyakit dapat disimpulkan bahwa:

- Jumlah kunjungan poliklinik kasus penyakit terbanyak di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 adalah ISPA dengan jumlah 42 kasus, sementara jumlah kunjungan poliklinik kasus penyakit paling sedikit di BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 adalah Vulnus laceratum dengan jumlah 2 kasus
- Jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terbanyak berada pada bulan Juni sebanyak 28 kunjungan. Sementara jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terkecil berada pada bulan februari sebanyak 2 kasus.

4. Jumlah Pemeriksaan ABK dalam negeri

Grafik 4. 44 Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Dalam Negeri

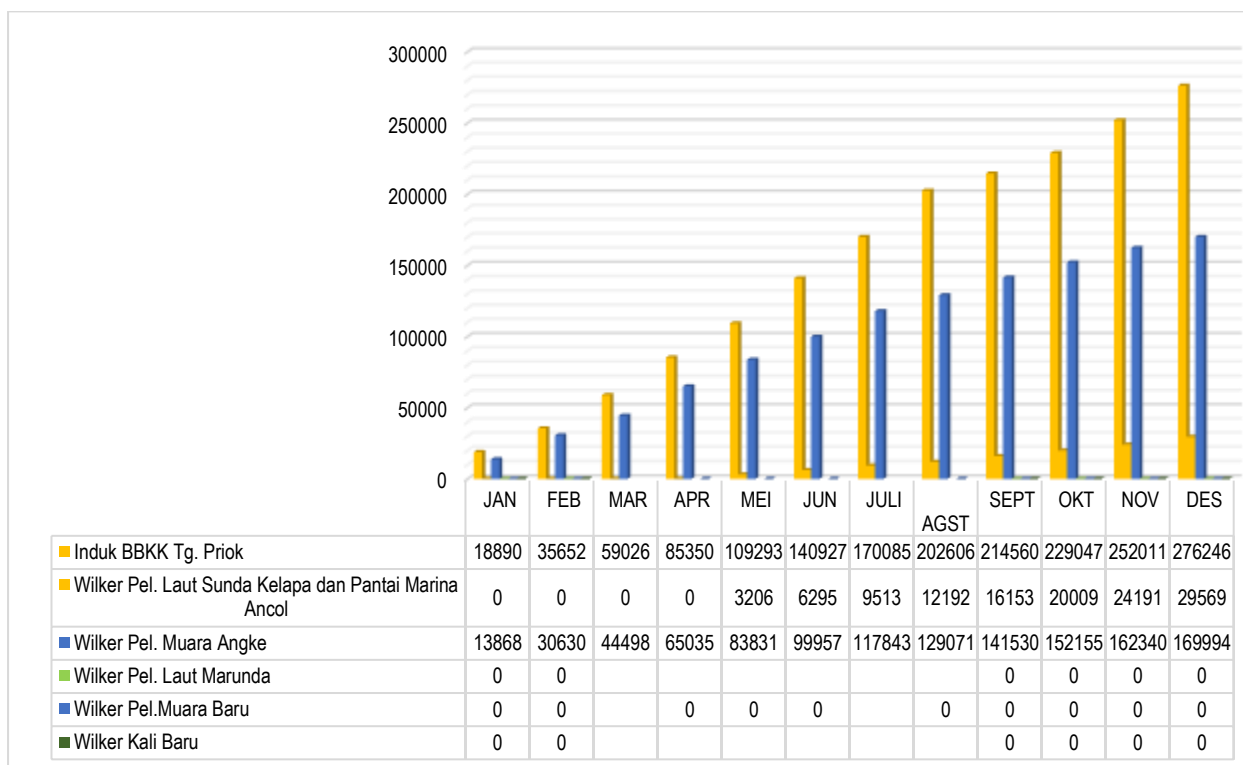


Berdasarkan diagram distribusi jumlah pemeriksaan ABK di Pelabuhan wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

- Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri terbanyak berdasarkan Wilayah kerja pemeriksaan terdapat di Wilayah Induk BBKK Tanjung dengan jumlah 1.206.151 ABK, sementara jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri Tahun 2024 terkecil berada di Wilayah Kerja Kali Baru sejumlah 168.767 ABK.
- Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri Tahun 2024 terbanyak berdasarkan waktu pemeriksaan terdapat di bulan Desember sebanyak 460719 ABK, sementara jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri Tahun 2024 terkecil berdasarkan waktu pemeriksaan terdapat di bulan januari sebanyak 35745 ABK.

5. Jumlah pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri

Grafik 4. 45 Distribusi Pengawasan Penumpang Datang Dalam Dan Luar Negeri

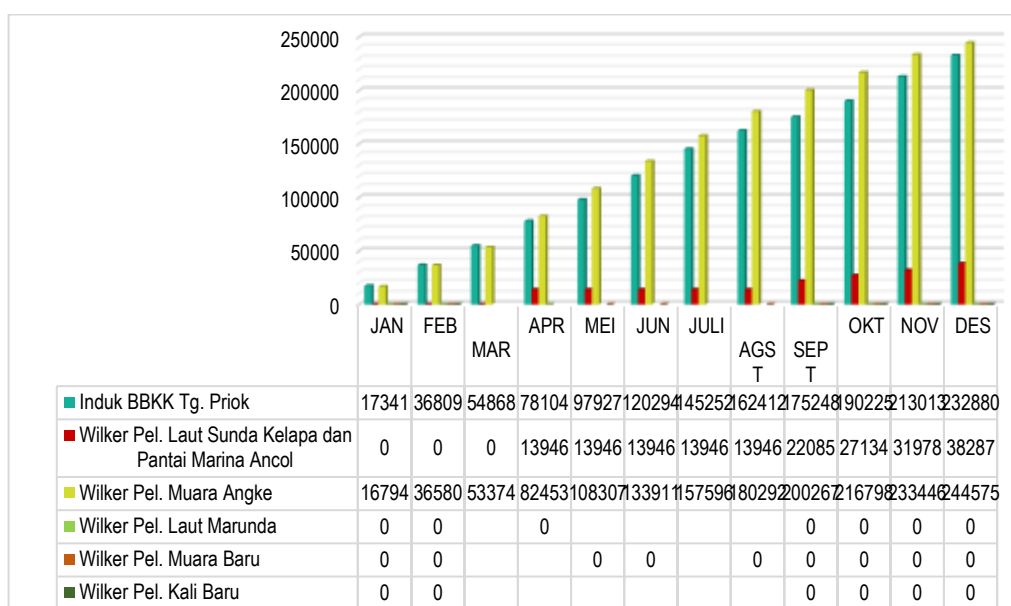


Berdasarkan diagram distribusi Jumlah pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dan wilayah kerja dapat disimpulkan bahwa:

- Jumlah pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan wilayah terbanyak pada pelabuhan tanjung priok induk sejumlah 1774803 orang, sementara jumlah pengawasan penumpang datang datang dalam dan luar negeri Tahun 2024 berdasarkan waktu terkecil berada di Wilayah Kerja Pelabuhan laut marunda, wilayah kerja pelabuhan laut muara baru dan wilayah kerja kali baru sejumlah 0 orang.
- Jumlah pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan waktu pengawasan terbanyak pada bulan desember dengan jumlah 475809 orang, sementara Jumlah pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan waktu pengawasan terkecil pada bulan Januari dengan jumlah 247179 orang.

6. Jumlah Pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri

Grafik 4. 46 Distribusi Pengawasan Penumpang Berangkat Dalam Dan Luar Negeri



Berdasarkan diagram distribusi Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dan wilayah kerja dapat disimpulkan bahwa:

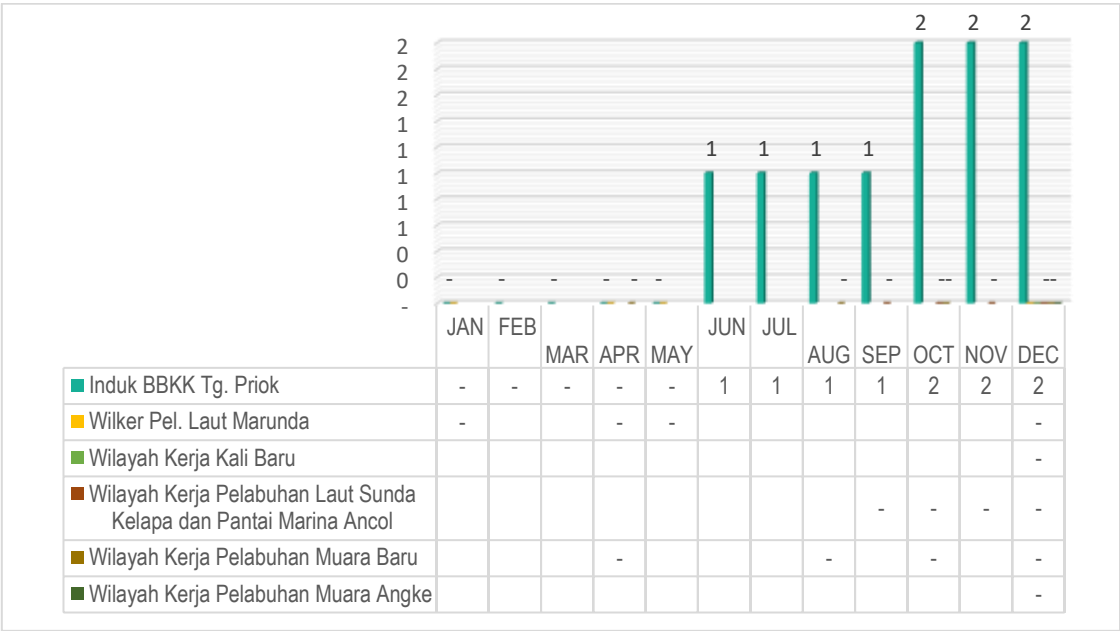
- Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan waktu pengawasan terbanyak berada pada bulan desember sejumlah 515.742 orang, sementara Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan waktu pengawasan terkecil berada pada bulan januari 2024 sejumlah 268.151 orang.
- Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja terbanyak terdapat di pelabuhan tanjung priok induk dengan jumlah 1.239.324 orang, sementara Jumlah pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja terkecil terdapat di wilayah kerja pelabuhan laut marunda, pelabuhan laut muara baru dan kali baru sejumlah 0 orang.

7. Penerbitan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah

Keluar masuknya jenazah di pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penularan penyakit. Sehubungan dengan hal tersebut Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan Dan Situasi Khusus perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa jenazah yang akan keluar atau masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok tidak menjadi sumber penyakit bagi masyarakat lainnya. Bagi jenazah yang sudah diperiksa oleh petugas BBKK dan tidak ada indikasi menjadi sumber penular penyakit maka akan diberikan Surat Ijin

Pengangkutan Jenazah sebagai bukti bahwa jenazah tersebut aman untuk di bawa keluar dari pelabuhan Tanjung Priok.

Grafik 4. 47 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah

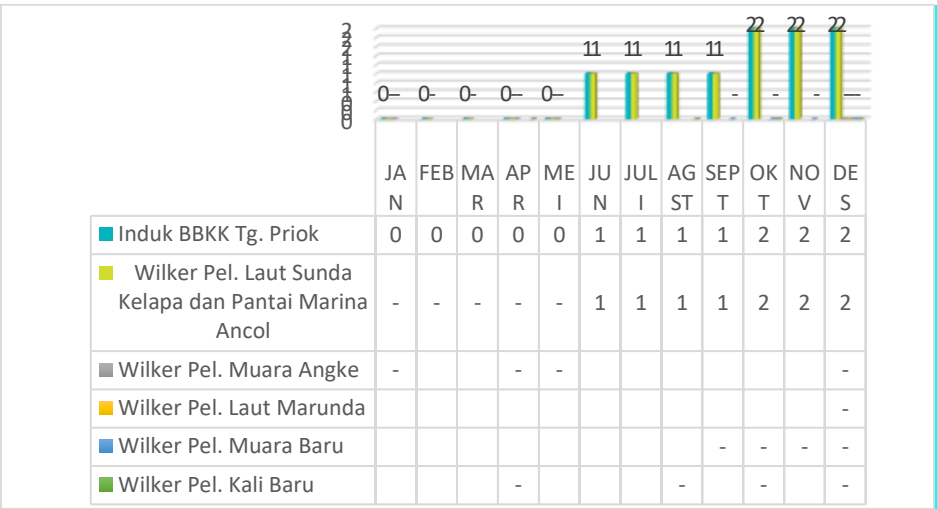


Berdasarkan diagram distribusi Jumlah Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 dan wilayah kerja dapat disimpulkan bahwa:

- Jumlah Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah berdasarkan waktu penerbitan terbanyak berada di bulan Oktober, November dan Desember dengan jumlah masing masing 2 surat.
- Jumlah Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah berdasarkan pada wilayah kerja terbanyak terdapat di pelabuhan induk BBKK Tanjung Priok sejumlah 10 surat.

8. Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit

Grafik 4. 48 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit



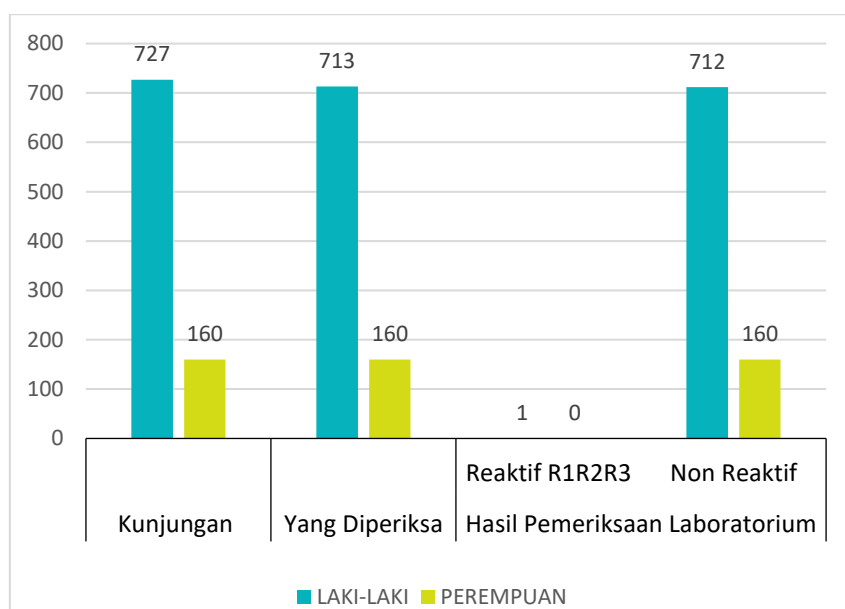
Dari diagram jumlah penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2024 didapat hasil bahwa:

- Jumlah penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja penerbitan terbanyak terdapat di Induk Pelabuhan BBKK Tanjung Priok sebanyak 10 surat, sementara Wilayah Kejra Pelabuhan Muara Angke, Laut Marunda, Muara Baru Dan Kali Baru tidak terdapat penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit.
- Jumlah penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2024 berdasarkan waktu penerbitan terbanyak berada di bulan oktober, november dan desember sejumlah 4 kasus, disusul pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September masing masing 1 penerbitan, sementara pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei tidak terdapat penerbitan Ijin Angkut Orang Sakit.

9. Capaian Skrining HIV/ AIDS

Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS Berdasarkan Penemuan Kasus Positif BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

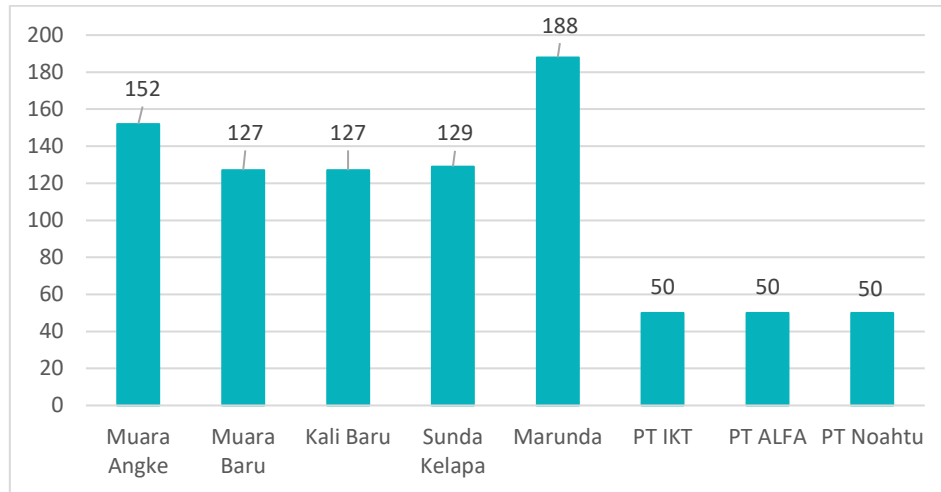
Grafik 4. 49 Distribusi Capaian Skrining HIV/AIDS Berdasarkan Penemuan Kasus Positif



Dari diagram diatas dapat dilihat kunjungan pemeriksaan VCT Mobile untuk penemuan kasus baru HIV menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 727 dan yang bersedia ikut pemeriksaan adalah laki-laki 713 orang dan perempuan 160 orang dengan hasil reaktif R1R2R3 sebanyak 1 orang (laki-laki) dan non reaktif sebanyak 872 orang (L:712, P:160). Hasil R1R2R3 reaktif dilaporkan sebagai HIV

kasus baru karena pasien telah pernah mendapat pengobatan HIV tetapi putus obat dan telah ditindaklanjuti (rujuk kembali ke tempat pengobatan asal).

Grafik 4. 50 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS Berdasarkan Tempat Pelaksanaan

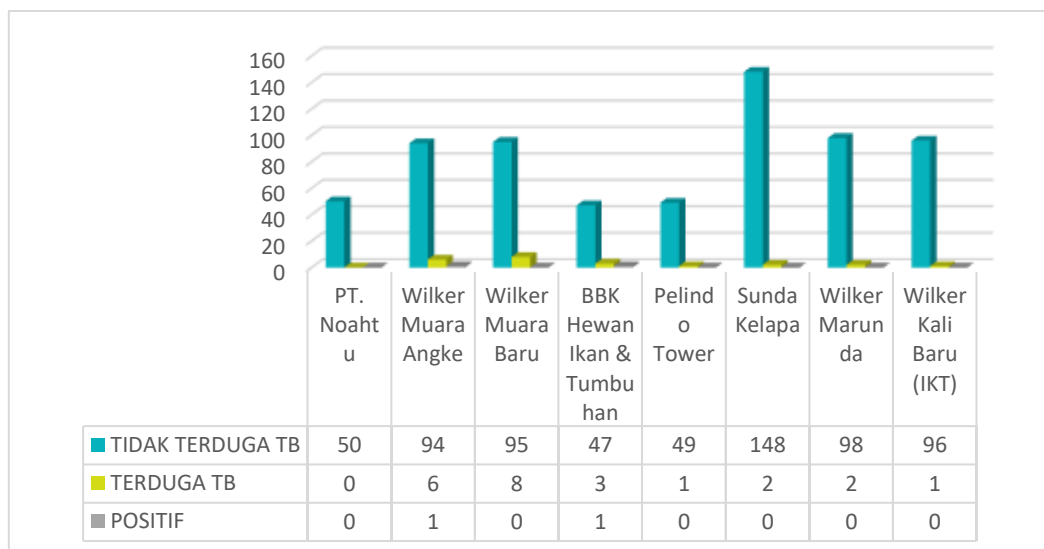


Dari diagram distribusi capaian skrining HIV/ AIDS didapatkan hasil bahwa:

- Skrining HIV/ AIDS berdasarkan jumlah pemeriksaan terbesar terdapat di Wilayah kerja Marunda dengan jumlah 188 orang, dan jumlah pemeriksaan paling sedikit adalah di PT IKT, PT ALFA dan PT Noahtu masing-masing sejumlah 50 orang.

10. Capaian Layanan Skrining Terduga TB

Grafik 4. 51 Distribusi Layanan Skrining Terduga TB

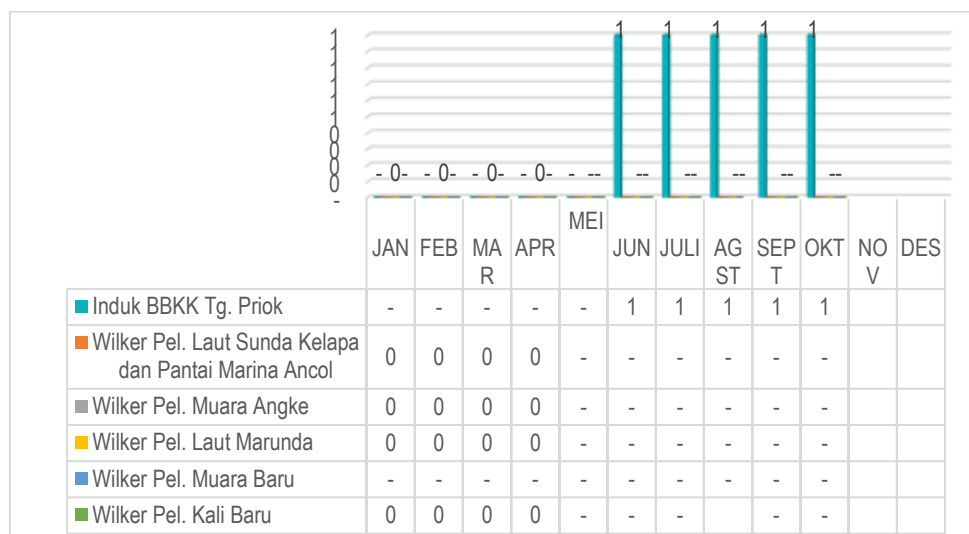


Berdasarkan diagram layanan skrining terduga TB, dari 703 orang yang dilakukan skrining TB berdasarkan anamnesa didapati hasil:

- Tidak terduga TB 678 orang terbanyak dari wilayah kerja sunda kelapa sebanyak 148 orang.
- Terduga TB sebanyak 23 orang terbanyak dari wilayah kerja muara baru sebanyak 8 orang.
- Positif TB berdasarkan pemeriksaan lanjutan berupa Test Cepat Molekuler (TCM) oleh Petugas puskesmas kecamatan setempat sebanyak 2 orang.

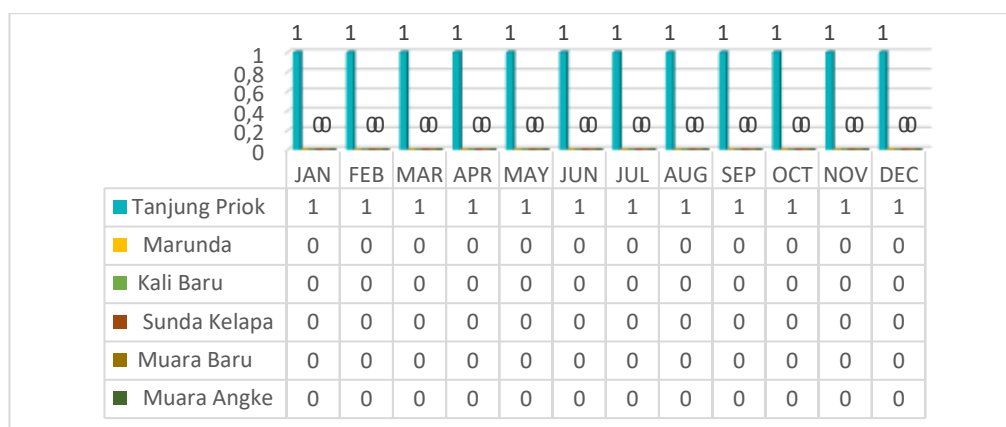
11. Pertolongan Gawat Darurat

Grafik 4. 52 Distribusi Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat



12. Pelayanan Rujukan

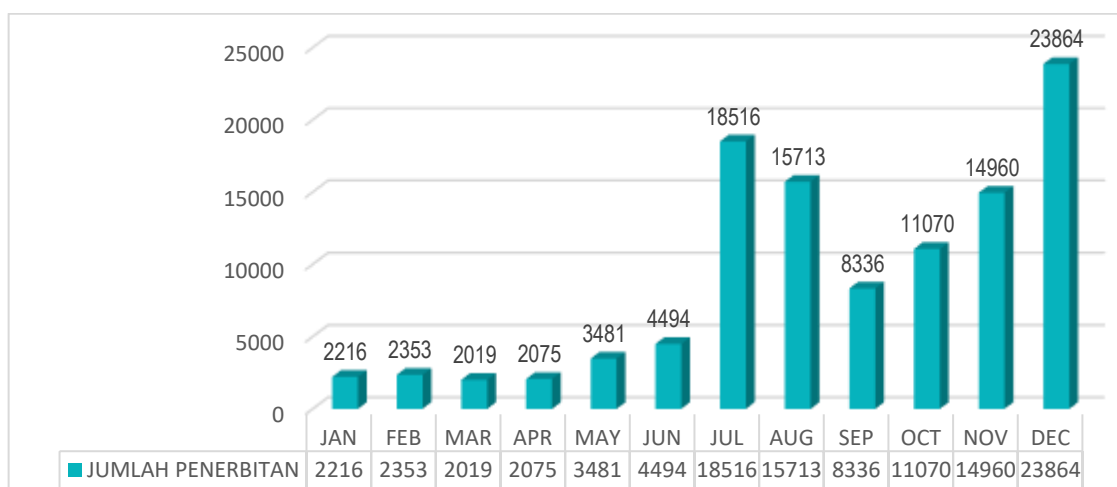
Grafik 4. 53 Distribusi Pelayanan Rujukan



Berdasarkan diagram pelayanan rujukan BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 berdasarkan penerbitan surat rujukan terbanyak terdapat di Pelabuhan induk BBKK Tanjung Priok dengan jumlah 12 surat.

13. Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV)

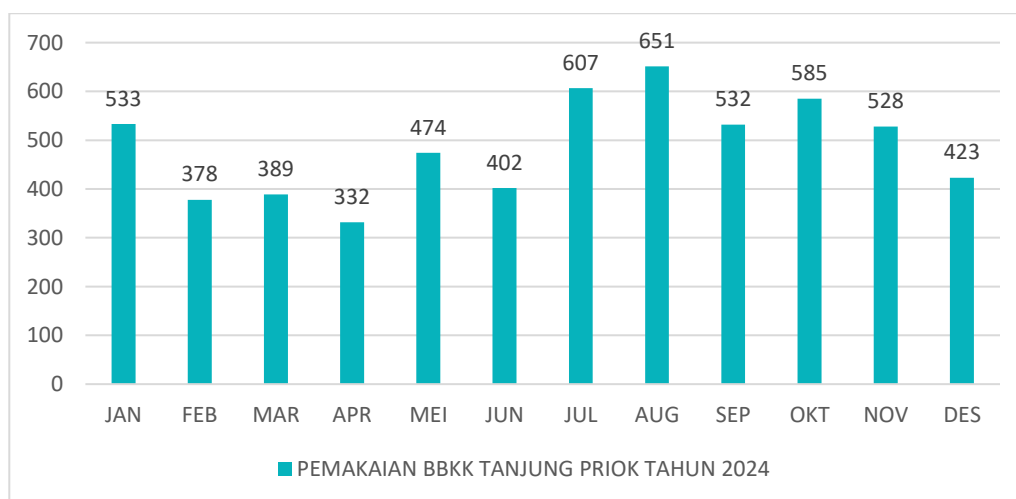
Grafik 4. 54 Distribusi Penerbitan ICV



Berdasarkan diagram penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapatkan hasil penerbitan ICV terbanyak berdasarkan bulan penerbitan berada di bulan desember dengan jumlah 23.864 sertifikat, sementara penerbitan ICV terkecil berdasarkan bulan penerbitan terdapat bedara di bulan januari dengan jumlah 2.216 sertifikat.

14. Pemakaian Vaksin Yellow Fever

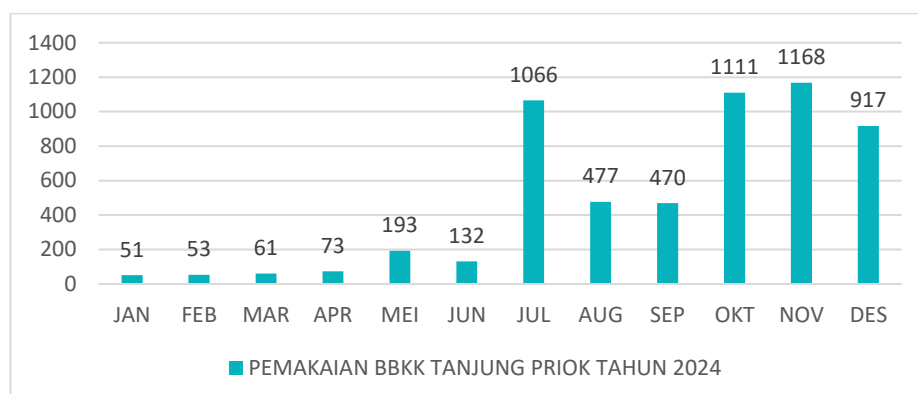
Grafik 4. 55 Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever



Berdasarkan diagram Pemakaian Vaksin Yellow Fever BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Yellow Fever terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan Agustus dengan jumlah 651, sementara Pemakaian Vaksin Yellow Fever terkecil berdasarkan bulan berada di bulan April dengan jumlah 332.

15. Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus*

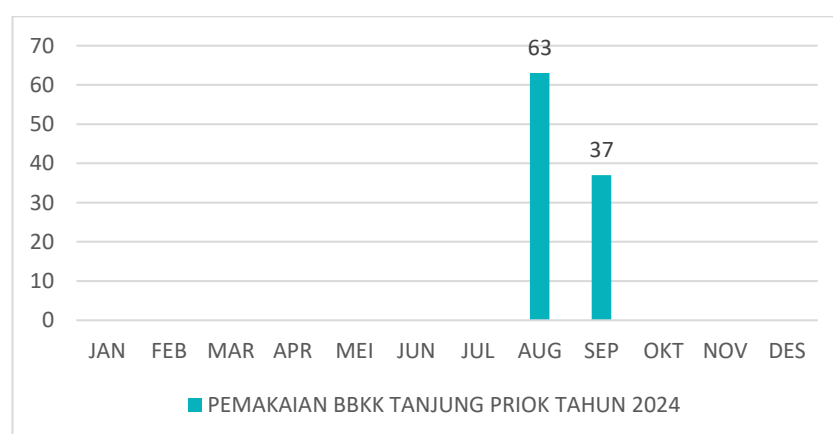
Grafik 4. 56 Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus*



Berdasarkan diagram Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan November dengan jumlah 1.168, sementara pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* terkecil berdasarkan bulan berada di bulan Januari dengan jumlah 51.

16. Pemakaian Vaksin Influenza

Grafik 4. 57 Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza

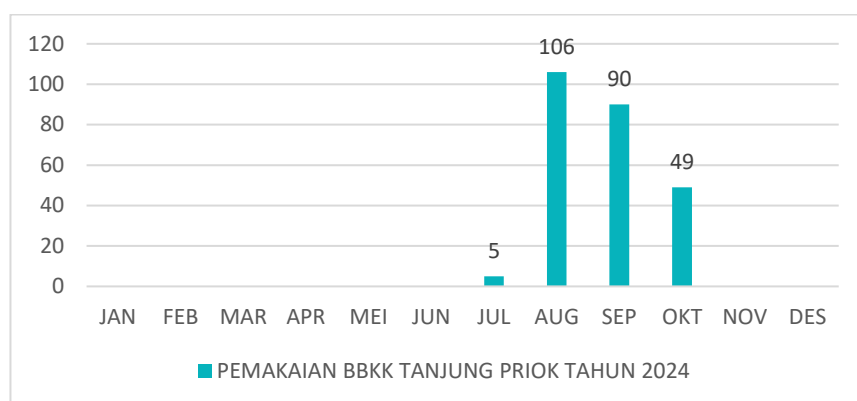


Berdasarkan diagram Pemakaian Vaksin Influenza BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Influenza terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan Agustus dengan jumlah 63, sementara Pemakaian Vaksin Influenza terkecil berdasarkan bulan berada di bulan September dengan jumlah 37.

17. Pemakaian Vaksin Thypoid

Distribusi Pemakaian Vaksin Thypoid
BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

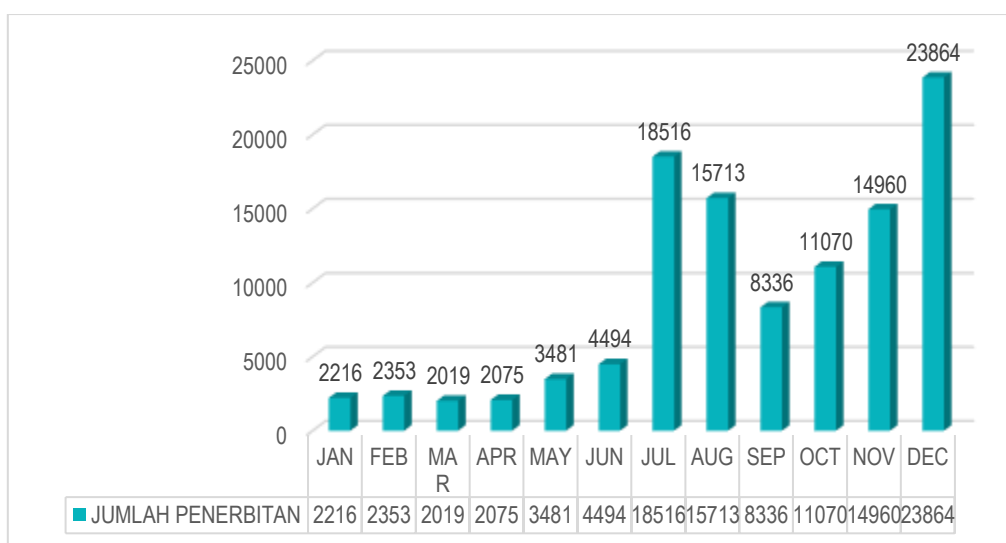
Grafik 4. 58 Distribusi Pemakaian Vaksin Thypoid



Berdasarkan diagram Pemakaian Vaksin Thypoid BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Thypoid terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan Agustus dengan jumlah 106, sementara Pemakaian Vaksin Thypoid terkecil berdasarkan bulan berada di bulan Juli dengan jumlah 5.

18. Penerbitan SKPK/ KIR

Grafik 4. 59 Distirbusi Penerbitan SKPK/KIR



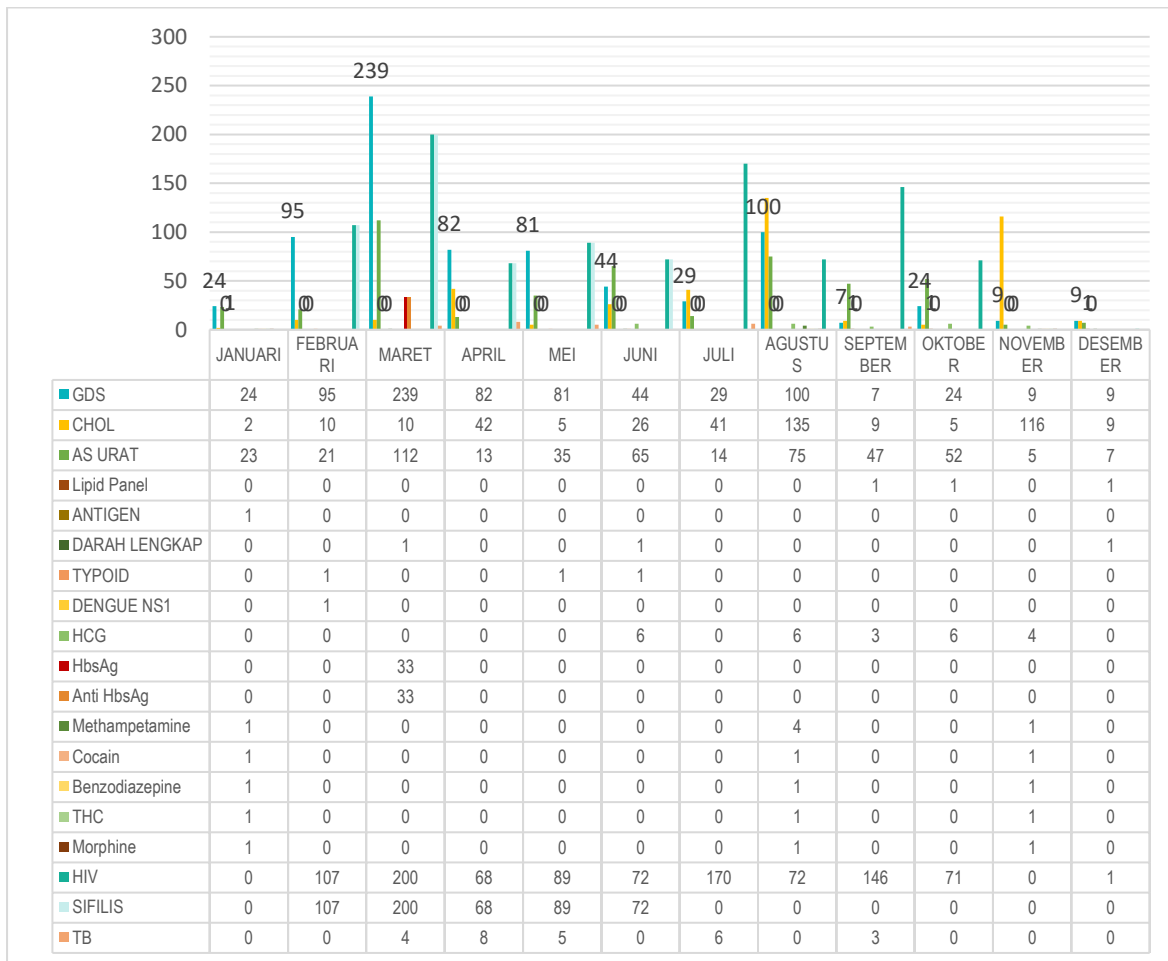
Berdasarkan diagram distribusi penerbitan SKPK/ KIR Tahun 2024 berdasarkan waktu penerbitan didapatkan hasil penerbitan SKPK/KIR terbanyak pada bulan desember dengan jumlah 23.864 sertifikat, sementara penerbitan SKPK/KIR terkecil pada bulan Maret dengan jumlah 2019 sertifikat.

19.Pemeriksaan Laboratorium

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Pemeriksaan Laboratorium Klinik

BULAN	GDS	CHOL	AS URAT	Lipid Panel	ANTIGEN	DARAH LENGKAP	TYPROID	DENGUE NS1	HCG	HbsAg	Anti HbsAg	Metha mpeta mine	Cocain	Benzodiaz epine	THC	Morphine	HIV	SIFILIS	TB	JLH
JANUARI	24	2	23		1							1	1	1	1	1				55
FEBRUARI	95	10	21				1	1									107	107		342
MARET	239	10	112			1				33	33						200	200	4	832
APRIL	82	42	13														68	68	8	281
MEI	81	5	35				1										89	89	5	305
JUNI	44	26	65			1	1		6								72	72		287
JULI	29	41	14														170		6	260
AGUSTUS	100	135	75						6			4	1	1	1	1	72			396
SEPTEMBER	7	9	47	1					3								146		3	216
OKTOBER	24	5	52	1					6								71			159
NOVEMBER	9	116	5						4			1	1	1	1	1				139
DESEMBER	9	9	7	1		1											1			28
JUMLAH	743	410	469	3	1	3	3	1	25	33	33	6	3	3	3	3	996	536	26	3300

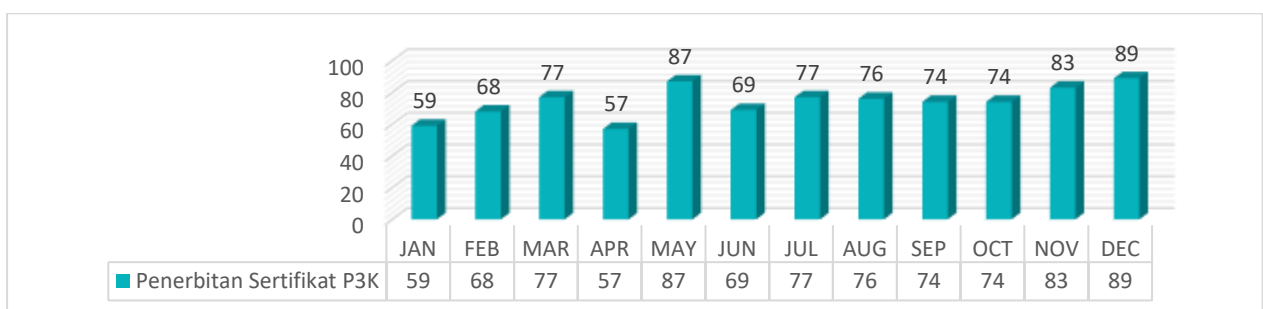
Grafik 4. 60 Pemeriksaan Skrining HIV



Dari Diagram diatas bahwa dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 berdasarkan pemeriksaan adalah pemeriksaan skrining HIV sejumlah 996 orang, pemeriksaan Gula darah sewaktu sejumlah 743 orang, Asam urat sejumlah 469 orang sementara pemeriksaan paling sedikit adalah pemeriksaan Dengue NS1 dan Antigen Covid 19 sejumlah1 orang. Berdasarkan jumlah pemeriksaan diketahui bahwa pemeriksaan terbanyak terdapat di Bulan Maret sebanyak 832 orang, dan yang paling sedikit sebanyak 28 orang.

20.Penerbitan Sertifikat P3K

Grafik 4. 61 Distribusi Penerbitan Sertifikat P3K



Berdasarkan diagram penerbitan sertifikat P3K BBKK Tanjung Priok Tahun 2024 didapati hasil jumlah peberbitan terbanyak pada bulan desember sebanyak 89 sertifikat, sementara penerbitan sertifikat P3K terkecil pada bulan April dengan jumlah 57 sertifikat.

4.1.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung penuh pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menerbitkan regulasi pelaksana melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Permenkes ini menjadi dasar pembentukan tim kerja serta pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salah satu UPT strategis Kementerian Kesehatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan Zona Integritas adalah Balai Besar Kekearifan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok. Sebagai institusi yang bertugas mengawasi lalu lintas orang, hewan, tumbuhan, dan barang di pintu masuk negara, BBKK Tanjung Priok berada di garis depan pelayanan publik yang harus berlangsung cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Dalam menghadapi tantangan kompleks serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi, BBKK Tanjung Priok dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanannya melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, BBKK Tanjung Priok telah menetapkan Tim Kerja Zona Integritas dan Pelayanan Publik Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Kepala BBKK Tanjung Priok Nomor: [nomor SK]. Tim ini dibentuk untuk mengawal pelaksanaan pembangunan ZI dan pelayanan publik secara terstruktur dan berkelanjutan.

Secara khusus, berdasarkan Diktum Kedelapan SK Kepala BBKK Tanjung Priok Tahun 2024, Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas (Tim Kerja 5) memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan layanan publik yang informatif, responsif, dan berintegritas. Ruang lingkup tugas tim ini meliputi:

1. Penyediaan bahan media informasi publik;
2. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan;
6. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BBKK Tanjung Priok berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta capaian yang telah diraih oleh Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas selama tahun berjalan.

B. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertujuan untuk memperkuat upaya lintas sektor dan internal dalam rangka pencegahan serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Kegiatan ini difokuskan pada upaya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan melalui penyusunan strategi, sinkronisasi kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan baik di tingkat masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup beberapa aktivitas penting. Hambatan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan program kesehatan di wilayah masing-masing. Kedua, diselenggarakan workshop lintas sektor yang melibatkan instansi terkait guna membangun pemahaman bersama dan kolaborasi dalam penanganan isu-isu kesehatan masyarakat yang kompleks dan multisektoral. Ketiga, dilakukan penyusunan dokumen evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan dan

pengendalian penyakit yang telah berlangsung, serta rencana tindak lanjut berbasis data dan hasil evaluasi tersebut.

Sebagai output dari kegiatan ini, telah terselenggara pertemuan koordinasi dengan hasil berupa dokumen rekomendasi strategis, laporan hasil evaluasi kegiatan pencegahan penyakit. Output ini menjadi dasar penting dalam perbaikan dan penguatan program-program kesehatan di masa mendatang.

Outcome yang diharapkan dan mulai terlihat dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pencegahan penyakit secara menyeluruh, terutama melalui perbaikan koordinasi lintas sektor. Selain itu, sinergi antarinstansi semakin kuat, yang ditunjukkan dengan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan kesehatan publik. Hasil lainnya adalah tersusunnya rencana kerja terpadu untuk tahun berikutnya yang lebih responsif terhadap tantangan di lapangan.

Dari sisi anggaran, kegiatan ini dialokasikan pagu sebesar Rp8.230.000 dengan realisasi mencapai Rp8.063.761, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp166.239. Realisasi ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas dan capaian yang telah ditargetkan.

2. Koordinasi dan advokasi layanan publik kekarantinaan kesehatan

Pada tahun anggaran 2024, kegiatan Koordinasi dan Advokasi Layanan Publik Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem kekarantinaan kesehatan di wilayah pintu masuk negara, seperti pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berbagai pemangku kepentingan terhadap prosedur kekarantinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan advokasi. Advokasi ini dilakukan melalui pertemuan strategis guna membahas prosedur teknis, alur koordinasi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Output dari kegiatan ini antara lain berupa dokumen advokasi dan kebijakan yang telah disampaikan kepada para mitra kerja, laporan lengkap pelaksanaan sosialisasi yang disertai dokumentasi kegiatan.

Hasil atau outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman para stakeholder terhadap pentingnya penerapan kekarantinaan secara ketat dan sesuai prosedur. Hal ini juga mendorong terciptanya koordinasi aktif antara

instansi pusat dan daerah dalam merespons ancaman kesehatan lintas negara. Secara tidak langsung, kegiatan ini berkontribusi dalam menurunkan potensi masuknya penyakit menular dari luar wilayah Indonesia melalui jalur transportasi internasional.

Dari sisi anggaran, kegiatan ini dialokasikan pagu sebesar Rp62.043.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp61.551.062. Sisa anggaran sebesar Rp491.938 menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas dan keluaran kegiatan yang telah direncanakan

3. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Manajemen Digital Kekarantinaan

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan dan respon terhadap dinamika global, kegiatan *Peningkatan Kapasitas Pelayanan Manajemen Digital Kekarantinaan* dilaksanakan untuk memperkuat sistem layanan kekarantinaan melalui pendekatan digitalisasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data kekarantinaan, sekaligus mempercepat pelayanan publik yang terkait dengan proses karantina di pintu-pintu masuk negara.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, dilakukan pemetaan kebutuhan kapasitas SDM dan sistem terkait manajemen digital kekarantinaan di berbagai wilayah kerja BBKK. Kedua, dilaksanakan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas bagi petugas karantina dalam pengoperasian sistem manajemen digital, termasuk pelatihan penggunaan perangkat lunak baru, sistem pelaporan elektronik, dan dashboard pemantauan berbasis data real-time.

Output dari kegiatan ini antara lain adalah:

- Tersusunnya laporan hasil pemetaan dan analisis kebutuhan peningkatan sistem digital kekarantinaan.
- Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas SDM di 5 wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.
- Sistem manajemen digital kekarantinaan yang telah diperbarui dan diuji integrasinya.

Sementara itu, outcome dari kegiatan ini mencakup:

- Peningkatan kapasitas teknis petugas dalam pengelolaan sistem kekarantinaan berbasis digital.
- Terwujudnya sistem layanan kekarantinaan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi pembiayaan, kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp80.808.000, dengan realisasi sebesar Rp79.650.000, menyisakan Rp1.158.000. Realisasi ini mencerminkan pengelolaan kegiatan yang efektif dan efisien dengan capaian target yang optimal.

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengawasan internal dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus utama kegiatan ini adalah memfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan instansi.

Pelaksanaan kegiatan mencakup penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaporan pengaduan berbasis elektronik, sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terkait saluran pengaduan yang tersedia, serta tindak lanjut awal atas laporan/pengaduan yang masuk. Selain itu, dilakukan pemantauan efektivitas saluran whistleblowing dan pelatihan petugas pengelola pengaduan.

Output:

- Tersedianya sistem/saluran pelaporan pengaduan yang aktif.
- Laporan rekapitulasi pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti.
- Notulensi kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Outcome:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
- Terbangunnya budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi.
- Terlindunginya hak-hak pelapor (whistleblower) dari tindakan represif.

Pagu Anggaran: Rp3.950.000

Realisasi Anggaran: Rp3.950.000

Sisa Anggaran: Rp0

5. Penanganan Konflik Kepentingan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi obyektivitas pengambilan keputusan oleh aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik kepentingan, serta pelaksanaan sosialisasi internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai.

Selain itu, dilakukan pengisian dan evaluasi formulir deklarasi konflik kepentingan bagi pejabat struktural dan pelaksana di posisi rawan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik sejak dini.

Output:

- Dokumen pedoman/SOP penanganan konflik kepentingan.
- Daftar isian deklarasi konflik kepentingan.
- Laporan kegiatan sosialisasi dan dokumentasi pendukung.

Outcome:

- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman pegawai terhadap pentingnya netralitas dalam bertugas.
- Berkurangnya potensi pelanggaran etika akibat konflik kepentingan.
- Terwujudnya lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.

Pagu Anggaran: Rp2.725.000

Realisasi Anggaran: Rp2.725.000

Sisa Anggaran: Rp0

6. Website dan Buletin

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media cetak. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyediakan saluran komunikasi resmi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, baik secara digital melalui website maupun dalam bentuk cetak melalui buletin berkala. Website yang dikembangkan berfungsi sebagai pusat informasi publik terkait program, kegiatan, kebijakan, serta capaian instansi, yang di-update secara berkala agar tetap relevan dan informatif. Selain itu, buletin diterbitkan secara berkala minimal empat kali dalam setahun dan didistribusikan ke berbagai instansi mitra serta titik-titik layanan publik, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa tahapan penting, yakni: pengembangan dan pemeliharaan sistem website yang responsif dan ramah pengguna, perancangan konten dan desain buletin, proses pencetakan, hingga distribusi kepada masyarakat dan stakeholder. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap tanggapan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Sebagai hasil dari kegiatan ini, telah tersedia website resmi instansi yang aktif dan terkelola dengan baik, serta terbit minimal empat edisi buletin yang telah didistribusikan ke sasaran yang ditentukan. Laporan distribusi dan tanggapan masyarakat terhadap media informasi yang disediakan juga telah disusun sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Adapun outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik melalui media komunikasi yang disediakan. Dengan adanya saluran informasi resmi ini, tercipta pula komunikasi dua arah antara instansi dan masyarakat, serta tersedianya dokumentasi kinerja dan kegiatan instansi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp90.030.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp85.505.360, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.524.640.

7. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Umum)

Kegiatan ini merupakan fondasi utama dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menyeluruh dan sistematis di lingkungan instansi. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat tata kelola informasi publik melalui pembenahan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring terhadap pemenuhan hak publik atas informasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan proses evaluasi terhadap standar layanan informasi publik yang telah berjalan di unit-unit pelaksana, serta pembaruan daftar informasi publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan terkini.

Kegiatan ini juga mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan layanan informasi secara transparan, cepat, dan tepat sasaran. Untuk memperkuat substansi pelatihan dan diskusi, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Tim Kerja Hukum dan Komunikasi Masyarakat (Hukormas) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Narasumber ini memberikan penjelasan teknis dan regulatif terkait kewajiban instansi dalam pelayanan informasi publik, serta memberikan pembekalan mengenai praktik baik yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain pelatihan, dilaksanakan pula forum diskusi yang menghadirkan PPID dari berbagai unit kerja serta perwakilan stakeholder eksternal untuk berbagi praktik baik dan menyamakan persepsi mengenai standar layanan informasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan. Kegiatan ini menjadi sarana penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi yang inklusif dan akuntabel. **Output** yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup dokumen resmi pemutakhiran daftar informasi publik, laporan pelaksanaan pelatihan PPID beserta dokumentasi kegiatan monitoring keterbukaan informasi, serta notulensi dari forum diskusi yang telah dilaksanakan. Seluruh dokumen tersebut menjadi bukti administratif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja layanan informasi publik yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, serta terciptanya budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.155.000, yang telah direalisasikan sepenuhnya sebesar Rp4.155.000, sehingga tidak terdapat sisa anggaran (Rp0).

8. Pelaksanaan Pameran Bidang Kesehatan dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional 2024

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024, instansi menyelenggarakan kegiatan Pameran Kesehatan sebagai salah satu bentuk edukasi publik dan promosi program prioritas di sektor kesehatan. Pameran ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran utama adalah masyarakat umum dari berbagai lapisan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperkenalkan layanan kesehatan unggulan yang tersedia baik dari pemerintah maupun mitra swasta. Selain itu, pameran berfungsi sebagai ruang interaksi dan kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas peduli kesehatan guna memperluas jejaring kerja sama dalam penyelenggaraan program kesehatan berkelanjutan.

Pameran dilaksanakan di JCC senayan yang mudah diakses oleh publik dan berlangsung dalam suasana terbuka serta interaktif. Rangkaian kegiatan dalam

pameran meliputi penyediaan stan informasi, materi edukatif berupa poster, video, dan brosur, serta penyelenggaraan sesi tanya jawab dengan narasumber ahli dari instansi dan mitra kerja. Pameran juga menayangkan video informatif tentang Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

Output kegiatan meliputi:

- Terselenggaranya kegiatan pameran kesehatan dengan partisipasi lintas sektor (instansi pemerintah, swasta, dan komunitas).
- Tersedianya materi visual dan edukatif kesehatan seperti poster, video, dan brosur yang dibagikan kepada pengunjung.
- Terdokumentasinya kegiatan melalui daftar hadir, foto/video pelaksanaan, serta laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia.
- Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara layanan kesehatan.
- Terciptanya kemitraan strategis baru antara pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan program-program kesehatan di masa mendatang.

Kegiatan ini dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000, dengan realisasi sebesar Rp24.812.500, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp187.500.

9. Reviu Data Klasifikasi

Pada tahun anggaran 2024, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan reviu data klasifikasi jabatan dan jabatan fungsional sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Permenkes tersebut menetapkan pengelompokan UPT bidang kekarantinaan kesehatan berdasarkan tingkat risiko dan beban kerja di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara (PLBN). Sebagai tindak lanjut regulasi ini, diperlukan pembaruan terhadap klasifikasi jabatan agar selaras dengan klasifikasi UPT serta kebutuhan layanan kekarantinaan kesehatan yang semakin kompleks.

Kegiatan reviu ini dilakukan untuk:

- Menyesuaikan struktur jabatan yang ada dengan tipe dan klasifikasi BBKK Tanjung Priok sebagai UPT bertipe A (klasifikasi tertinggi).

- Mengidentifikasi jabatan fungsional dan struktural yang perlu diperbarui atau dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok kekarantinaan kesehatan.
- Memastikan bahwa seluruh jabatan yang ada relevan terhadap indikator operasional UPT berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2023, termasuk aspek jumlah lalu lintas pelaku perjalanan, risiko penyakit potensial wabah, serta kebutuhan pengawasan lintas sektor.

Output:

- Dokumen hasil revidi data klasifikasi jabatan, baik fungsional maupun struktural.
- Daftar jabatan baru atau yang mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi sesuai penyesuaian klasifikasi UPT.
- Rekomendasi penguatan jabatan fungsional seperti Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Entomolog, dan jabatan teknis lainnya.

Outcome:

- Struktur jabatan yang lebih akurat dan fungsional sesuai dengan klasifikasi BBKK Tanjung Priok sebagai UPT tipe A.
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi kekarantinaan kesehatan, termasuk deteksi, respons, dan pengendalian penyakit potensial wabah.
- Penguatan kapasitas organisasi dalam mengantisipasi lalu lintas internasional yang tinggi dan risiko kesehatan masyarakat lintas batas negara.

Realisasi Anggaran:

- Anggaran Awal: Rp850.000
- Realisasi: Rp850.000
- Sisa Anggaran: Rp0

Pelaksanaan revidi ini menjadi bagian penting dalam roadmap transformasi kelembagaan BBKK Tanjung Priok untuk menjadi UPT yang adaptif, tanggap risiko, dan selaras dengan tata kelola berbasis regulasi mutakhir. Penyesuaian klasifikasi jabatan ini diharapkan mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan kesehatan global dan regional.

10. Penyusunan dan Revidi Analisis Beban Kerja, Peta, dan Informasi

Sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok pada tahun

2024 telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan reviu Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan, dan Informasi Jabatan. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata unit kerja.

Sejalan dengan upaya reformasi birokrasi serta transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, penyusunan ABK dan peta jabatan dilakukan untuk:

- Mengukur beban kerja riil yang dihadapi oleh setiap timkerja, berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif;
- Mengevaluasi kesesuaian jumlah dan distribusi pegawai, untuk menghindari ketimpangan beban kerja dan tumpang tindih peran;
- Menyesuaikan struktur jabatan dengan kebutuhan organisasi, khususnya dalam menghadapi dinamika lalu lintas internasional dan risiko kekarantinaan kesehatan yang kompleks;
- Mendokumentasikan informasi jabatan secara sistematis untuk mendukung pengembangan karier ASN dan pemetaan kompetensi.

Output:

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) terkini untuk setiap unit struktural dan fungsional di BBKK Tanjung Priok.
- Peta Jabatan organisasi hasil pemutakhiran sesuai kebutuhan fungsi kekarantinaan.
- Dokumen Informasi Jabatan yang lengkap, mencakup uraian tugas, tanggung jawab, indikator kinerja, serta kompetensi yang dibutuhkan.

Outcome:

- Optimalisasi distribusi tugas dan tanggung jawab pegawai, sehingga masing-masing unit bekerja sesuai kapasitas dan fungsinya secara efektif.
- Efisiensi penggunaan SDM dengan menyesuaikan jumlah personel berdasarkan analisis kebutuhan kerja aktual.
- Dasar pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan kebutuhan pegawai, rotasi/mutasi, pengembangan kompetensi, dan penataan organisasi.
- Mendukung transformasi kelembagaan menuju organisasi modern yang adaptif terhadap beban dan risiko operasional.

Realisasi Anggaran:

- Anggaran Awal: Rp850.000

- Realisasi: Rp850.000
- Sisa Anggaran: Rp0

Kegiatan ini menjadi landasan penting dalam penguatan kapabilitas kelembagaan BBKK Tanjung Priok, terutama dalam menghadapi tantangan kekarantinaan kesehatan dan peningkatan volume mobilitas lintas batas. Seluruh proses dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan lintas unit kerja untuk memastikan hasil analisis bersifat representatif dan dapat diimplementasikan secara nyata.

11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT

Pada tahun 2024, Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok telah melaksanakan kegiatan strategis berupa penyusunan dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasinya. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola organisasi dan penguatan mutu layanan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BBKK Tanjung Priok berhasil menyusun dan merevisi sebanyak 163 SOP, yang mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari prosedur pemeriksaan dokumen kesehatan internasional, pengawasan sanitasi alat angkut, pengambilan sampel laboratorium, hingga tata cara respon terhadap kejadian luar biasa (KLB) di pintu masuk negara. Penyusunan SOP ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan unit teknis, fungsional tertentu, serta pemangku kepentingan internal agar dokumen yang dihasilkan bersifat aplikatif, akurat, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Setiap SOP juga dilengkapi dengan manual implementasi yang berfungsi sebagai panduan teknis operasional di tingkat pelaksana, sehingga memudahkan proses sosialisasi dan monitoring pelaksanaan SOP di masing-masing unit kerja.

Output:

- 163 dokumen SOP UPT yang tersusun lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik.
- Manual implementasi SOP yang dapat dijadikan rujukan kerja teknis harian bagi pegawai.

Outcome:

- Peningkatan kualitas layanan kekarantinaan di semua lini pelayanan melalui prosedur kerja yang lebih konsisten dan terdokumentasi.
- Peningkatan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk di area pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara.
- Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja unit pelaksana melalui standar baku yang jelas dan dapat diaudit.

Realisasi Anggaran:

Anggaran Awal: Rp69.867.000

Realisasi: Rp69.309.075

Sisa Anggaran: Rp557.925

12. Penyusunan Profil

Pada tahun 2024, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen profil kelembagaan sebagai bagian dari upaya penguatan identitas organisasi serta transparansi informasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan memperbarui profil resmi BBKK Tanjung Priok yang mencerminkan tugas, fungsi, struktur organisasi, capaian kinerja, serta kontribusi institusi dalam menjaga kesehatan di wilayah pintu masuk negara.

Penyusunan profil dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data faktual yang diperoleh dari unit-unit kerja terkait. Dokumen ini disusun dalam format naratif yang komunikatif, dilengkapi dengan elemen visual seperti grafik, infografis, dan foto dokumentasi kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk sebagai bahan sosialisasi, promosi institusi, dan laporan akuntabilitas publik.

Output:

- Dokumen Profil BBKK Tanjung Priok yang lengkap dan terstruktur, mencakup:
- Sejarah dan dasar hukum pembentukan BBKK
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Program dan kegiatan strategis
- Data kinerja dan statistik layanan
- Capaian utama dan inovasi kelembagaan
- Informasi pelayanan publik dan layanan pengaduan

Outcome:

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi melalui dokumentasi profil yang informatif dan mudah diakses.

- Penguatan citra kelembagaan sebagai institusi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika kekarantinaan kesehatan nasional dan global.
- Ketersediaan dokumen referensi resmi

Realisasi Anggaran:

Anggaran Awal: Rp1.700.000

Realisasi: Rp1.700.000

Sisa Anggaran: Rp0

13.OJT Menuju Inovasi Pelayanan Prima dalam Percepatan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kegiatan On the Job Training (OJT) ini merupakan bagian dari program strategis pembinaan dan penguatan internal yang dilaksanakan oleh Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali (re-referencing) kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja. Melalui proses refleksi ini, setiap peserta diajak untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, mengevaluasi pola kerja yang selama ini diterapkan, dan merumuskan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan OJT dilakukan secara terstruktur melalui metode praktik langsung di lapangan, diskusi kelompok terarah, studi kasus pelayanan publik, serta bimbingan teknis oleh fasilitator profesional yang berpengalaman dalam penguatan pelayanan prima dan reformasi birokrasi. Peserta terdiri dari perwakilan unit teknis dan manajerial yang berperan aktif dalam interaksi layanan publik.

Output:

- Laporan pelaksanaan OJT beserta dokumentasi kegiatan dan materi pelatihan.
- Daftar peserta beserta hasil evaluasi akhir pelatihan.
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) inovasi pelayanan dari masing-masing unit kerja.

Outcome:

- Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

- Penguatan budaya kerja berintegritas dan hasil, sejalan dengan nilai-nilai Zona Integritas menuju WBBM.
- Tersusunnya peta inovasi pelayanan baru yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk mendukung transformasi layanan kekarantinaan yang adaptif dan profesional.

Realisasi Anggaran:

Anggaran Awal: Rp103.250.000

Realisasi: Rp103.250.000

Sisa Anggaran: Rp0

14. Pelatihan In-House Training Penggunaan HP dan Seni Fotografi

Dalam rangka memperkuat kapasitas internal kelembagaan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Pelatihan In-House Training Penggunaan HP dan Seni Fotografi yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan secara mandiri, kreatif, dan efektif.

Di era digital saat ini, visualisasi informasi memegang peranan penting dalam komunikasi publik, pelaporan kegiatan, serta penguatan citra kelembagaan. Oleh karena itu, pelatihan ini berfokus pada penguasaan teknik dasar fotografi menggunakan perangkat telepon seluler (handphone), dengan menitikberatkan pada pemahaman komposisi visual, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta optimalisasi fitur kamera ponsel yang tersedia.

Kegiatan dilaksanakan secara internal (in-house) dengan suasana yang interaktif dan aplikatif. Selain teori dasar, peserta melakukan praktik langsung di lapangan untuk menghasilkan dokumentasi visual kegiatan kekarantinaan yang menarik, informatif, dan sesuai standar komunikasi visual instansi.

Pelatihan ini juga sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dalam hal dokumentasi kegiatan, serta mendorong efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki instansi.

Output:

- Dokumentasi kegiatan pelatihan (foto, absensi, dan laporan kegiatan).
- Portofolio hasil karya foto para peserta sebagai bentuk hasil belajar dan praktik.

- Panduan singkat penggunaan kamera HP untuk dokumentasi kegiatan kedinasan, sebagai referensi kerja mandiri di unit masing-masing.

Outcome:

- Peningkatan kualitas dokumentasi visual kegiatan kekarantinaan yang lebih menarik dan komunikatif, baik untuk keperluan laporan, publikasi media sosial, maupun kebutuhan komunikasi publik lainnya.
- Pegawai menjadi lebih kreatif dan terampil dalam menggunakan perangkat teknologi sederhana (HP) untuk mendukung tugas kedinasan.
- Efisiensi pengelolaan anggaran dokumentasi dengan memanfaatkan kemampuan internal, tanpa perlu jasa dokumentasi dari pihak ketiga.

Realisasi Anggaran:

- Anggaran Awal: Rp6.530.000
- Realisasi: Rp6.490.991
- Sisa Anggaran: Rp39.009

4.1.6 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KETATAUSAHAAN/DUKUNGAN MANAJEMEN

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang pegawai berhak mendapatkan gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain gaji pokok, yang diterima oleh pegawai meliputi tunjangan suami/istri PNS, tunjangan anak, tunjangan struktural apabila menjabat sebagai struktural, tunjangan fungsional apabila menjabat sebagai pegawai teknis fungsional, tunjangan beras, tunjangan uang makan, tunjangan umum (gaji ke-13 dan 14), tunjangan kinerja dan belanja uang lembur. Pada tahun 2024, *Input* untuk alokasi pagu untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 20.244.978.000,-.

Outputnya yaitu tercapainya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 19.636.672.653,- (97,00 %).

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran juga dibutuhkan agar penyelenggaraan operasional perkantoran dapat dilaksanakan tanpa kendala-kendala sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efisien dan efektif serta dapat memberikan hasil yang optimal.

Keperluan sehari-hari perkantoran meliputi: air minum untuk pelayanan, Honor PPNP, Lembur hari kerja dan hari libur non PNS (induk/wilker). Kebutuhan sehari-hari perkantoran, PBB rumah dinas, konsumsi, percetakan dokumen ketatausahaan, tinta fotocopy, pembayaran outsourcing tenaga satuan pengamanan, petugas kebersihan, supir, nahkoda kapal, pranata komputer. Sedangkan dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi langganan daya dan jasa meliputi : listrik, telepon dan air, paket internet wilker, paket internet pelayanan, c-pannel, langganan internet kantor induk, dan google storage, biaya langganan akses dan caller ID, pemeliharaan server dan jaringan internet (LAN). Pemeliharaan Kantor (gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin) meliputi : gedung kantor tidak bertingkat dan rumah jabatan, pemeliharaan halaman gedung kantor dan rumah jabatan, pemeliharaan gedung kantor bertingkat, pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan inventaris kantor, printer, PC, AC, Genset, APAR, mesin photocopy, lift, peralatan fungsional, Pemeliharaan Videotron dan Running Text, kalibrasi alat kesehatan dan laboratorium, alat kesehatan dan laboratorium, kalibrasi alat kesling, pemeliharaan alat kesling, pemeliharaan kendaraan roda 4, 6, 2, 3, perpanjang STNK roda 2, 3, 4 dan 6. Pembayaran terkait operasional kantor meliputi : belanja daya tahan tubuh pegawai, kebugaran pegawai, honor pengelola keuangan, pakaian dinas pegawai dan kelengkapannya, honor UAKPA/UAKPB, honor administrasi BMN, honor penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, sewa gedung muara angke, sewa kendaraan operasional.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.581.570.000,-. *Outputnya* yaitu kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran berjalan lancar dan telah terealisasi sebesar Rp 8.457.561.244,- (98,55%).

3. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Kepegawaian dan Umum

Komponen dalam Koordinasi Program Lintas Sektor Kepegawaian dan Umum ada 2 sub komponen yaitu :

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kegiatan ini terdiri dari belanja uang harian, uang representative, uang penginapan dan transport untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian.

2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Kegiatan ini terdiri dari Transport dan Uang Harian 8 jam

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 170.631.000,-. *Outputnya* yaitu telah terlaksananya kegiatan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Kepegawaian dan Umum di BBKK Tanjung Priok dan terealisasi sebesar Rp 154.387.314,- (90,48%).

4. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait perencanaan program

Komponen dalam Koordinasi Program Lintas Sektor terkait perencanaan program ada 2 sub komponen yaitu :

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kegiatan ini terdiri dari belanja uang harian, uang representative, uang penginapan dan transport untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian.

2. Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan

Kegiatan ini terdiri dari Uang Harian, Uang Reperesentatif, biaya penginapan dan Transport Provinsi Jawa Barat Banten dan selain Jawa Barat Banten.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 31.947.000,-. *Outputnya* yaitu telah terlaksananya kegiatan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait perencanaan program di BBKK Tanjung Priok dan terealisasi sebesar Rp 31.934.920,- (99,96%).

5. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Evaluasi program

Komponen dalam Koordinasi Program Lintas Sektor terkait evaluasi program ada 2 sub komponen yaitu :

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kegiatan ini terdiri dari belanja uang harian, uang representative, uang penginapan dan transport untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian.

2. Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan

Kegiatan ini terdiri dari Uang Harian, Uang Reperesentatif, biaya penginapan dan Transport Provinsi Jawa Barat Banten dan selain Jawa Barat Banten.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.215.000,-. *Outputnya* yaitu telah terlaksananya kegiatan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Evaluasi Program di BBKK Tanjung Priok dan terealisasi sebesar Rp 18.113.800,- (81,53%).

6. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Keuangan, BMN dan Anggaran

Komponen dalam Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Keuangan, BMN dan Anggaran ada 3 Sub komponen yaitu :

1. Penyusunan Laporan BMN

Kegiatan ini terdiri dari uang harian, biaya penginapan dan transport.

2. Penghapusan dan pemusnahan BMN

Kegiatan ini terdiri dari iklan / pengumuman penghapusan BMN

3. Penyusutan RKBMN terdiri dari uang harian, biaya penginapan dan transport

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 8.266.000,- *outputnya* yaitu telah terlaksananya kegiatan layanan dukungan manajemen internal yang terealisasi sebesar Rp 8.062.200,- (97,53%).

7. Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen

Komponen dalam Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen ada 4 sub komponen yaitu :

1. Penyusunan E-Renggar

Kegiatan ini terdiri dari uang harian, biaya penginapan luar kota dan transport

2. Rapat Penyusunan Dokumen RKAKL

Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan kegiatan penyusunan RKAKL tahun 2024, yang diselenggarakan di dalam kantor selama 1 hari dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

3. Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran

4. Penyusunan perencanaan program bersumber PNB

Kegiatan ini terdiri dari uang harian, penginapan luar kota dan transport.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 50.862.000,- sedangkan untuk *outputnya* yaitu telah terlaksananya kegiatan penyusunan E-Renggar, rapat penyusunan dokumen RKAKL, penyusunan pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran dan penyusunan perencanaan program bersumber PNB yang terealisasi sebesar Rp 48.046.348,- (94,46%).

8. Layanan Umum dan Perlengkapan

Komponen Layanan Umum dan Perlengkapan ada 3 Sub Komponen yaitu :

1. Langganan Aplikasi Meeting Berbayar

Kegiatan ini merupakan belanja untuk pembayaran zoom meeting untuk satu tahun dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. Berlangganan aplikasi Canva untuk satu tahun dianggarkan sebesar Rp. 700.000,-

2. Pengelolaan Kantor Berhias

Kegiatan ini terdiri dari pembelian bahan penunjang kegiatan berhias dengan anggaran sebesar Rp 23.000.000,- dengan total sebesar Rp 850.000,-

3. Pengelolaan Barang dan Jasa, kegiatan ini terdiri dari survei pengadaan barang dan jasa dengan anggaran untuk uang harian dan transport bagi pejabat pengadaan untuk survey pengadaan barang dan jasa ke suatu tempat, serta survey dalam kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.120.000,-

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 30.670.000,- sedangkan *outputnya* adalah kegiatan ini telah terlaksananya kegiatan pembayaran zoom meeting, bahan penunjang kantor berhias, koordinasi gerakan kantor berhias, honor dan transport survei pejabat pengadaan barang jasa yang terealisasi sebesar Rp 24.043.235,- (78,39%).

9. Layanan Administrasi Kepegawaian

Komponen pengelolaan administrasi kepegawaian ada 4 Sub Komponen yaitu :

1. Layanan Mutasi Pegawai

Kegiatan ini terdiri dari pengantaran berkas kepegawaian ke pusat untuk 1 orang sebanyak 3 kali dengan anggaran Rp 510.000,-

2. Pembinaan Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri dari Pertemuan dengan mengundang Narasumber, terdiri dari belanja konsumsi untuk 50 orang, honor narasumber, serta transport lokal untuk 12 orang. Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.590.000,-

3. Medical Check Up Pegawai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 292.146.000,-

4. Pengelolaan Jabatan Fungsional

Penyelenggaraan UKOM daring Jafung Kesehatan Lingkungan sebesar Rp. 6.054.00,-

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 306.300.000,- sedangkan *outputnya* adalah disampaikannya berkas mutasi pegawai ke pusat dan terlaksananya kegiatan pembinaan kepegawaian dengan realisasi sebesar Rp 305.984.000,- (99,90%).

10. Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan / Bandara/PLBD

Komponen pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan / Bandar / PLBD :

1. Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari belanja perjalanan pimpinan Jawa Barat Banten dan selain Jawa Barat Banten realisasi sebesar Rp. 85.088.238,- (94,52%)

Belanja untuk kegiatan ini terdiri dari pembelian konsumsi 30 box dan transport lokal 10 orang untuk pegawai dari wilayah kerja

2. Penanganan Konflik Kepentingan

Belanja untuk kegiatan ini terdiri dari pembelian konsumsi 35 box dan transport lokal 11 orang untuk pegawai dari wilayah kerja

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 9.040.000,- sedangkan *outputnya* adalah terlaksananya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* dan penanganan konflik kepentingan yang terealisasi sebesar Rp 9.040.000,- (100%).

11.Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp. 6.880.000,- sedangkan *outputnya* sebesar Rp. 6.865.000,- (99,78%).

12.Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Komponen layanan organisasi dan tata kelola internal ada 2 Sub Komponen yaitu :

1. Reviu Data Klasifikasi UPT

Belanja untuk kegiatan ini terdiri dari pembayaran transport lokal untuk 5 orang pegawai.

2. Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta dan Informasi Jabatan

Belanja untuk kegiatan ini terdiri dari pembayaran transport lokal untuk 5 orang untuk pegawai dari wilayah kerja

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 1.700.000,- sedangkan *outputnya* adalah terlaksananya kegiatan Reviu Data Klasifikasi UPT, Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta terealisasi sebesar Rp 1.700.000,- (100%).

13.Pelayanan Humas dan Protokoler

Komponen pelayanan humas dan protokoler ada Sub Komponen yaitu :

1. Diseminasi/promosi informasi kegiatan

Belanja dari kegiatan ini terdiri dari : pembayaran honor bulletin info kesehatan pelabuhan (penanggungjawab, redaktur, editor, desain grafis/fotografis, sekretariat, pembuat artikel), honor website KKP (redaktur, editor, website admin, pembuat artikel), media KIE, pengiriman bulletin, cetak buletin

2. Belanja Profesi

Belanja dari kegiatan dalam rangka HKN antar Kabupaten/kota pergi pulang (PP), kegiatan pengukuhan SBH.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 36.560.000,- sedangkan *outputnya* adalah terlaksananya kegiatan Diseminasi/promosi Informasi Kegiatan, Pameran Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp 34.769.800,- (95, 10%).

14. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Program

Komponen pemantauan evaluasi dan pelaporan program ada 7 Sub Komponen yaitu:

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
Kegiatan pertemuan penyusunan laporan melaksanakan program dilakukan setiap bulan dengan peserta 35 orang dari bidang dan wilker dengan anggaran transport untuk 5 orang dari wilayah kerja Rp 10.100.000,-
2. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali, dengan anggaran untuk transport sebanyak 5 orang Rp 3.400.000,-
3. Penyusunan E-Monev Bappenas/PP 39 Tahun 2006
Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun, anggaran yang digunakan untuk transport sebanyak 5 orang pada setiap pertemuannya dengan total anggaran sebanyak Rp.3.400.000,-
4. Penyusunan Laporan Tahunan Satker
Kegiatan Penyusunan Laporan tahunan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Januari 2024 dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 dengan alokasi anggaran untuk transport sebanyak 5 orang total Rp 1.700.000,-
5. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P
Kegiatan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran
6. Penyusunan LAKIP
Kegiatan Penyusunan LAKIP, dengan anggaran transport sebesar Rp. 1.700.000,-
7. Penyusunan Laporan Indikator RAK
Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali, dengan anggaran untuk transport sebanyak 5 orang Rp 3.400.000,-
8. Evaluasi SAKIP
Kegiatan ini dibagi menjadi 2 yaitu Kegiatan PRA SAKIP dan Evaluasi SAKIP, yang terdiri dari uang harian, penginapan dan transport. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebanyak Rp 12.008.000,-

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 44.328.000,- sedangkan *outputnya* adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program, Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran, Penyusunan E-Monev Bappenas/PP 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP Satker, Penyusunan Laporan Indikator RAK, dan evaluasi SAKIP yang telah terealisasi sebesar Rp 35.761.370,- (80,67%). Pertemuan Evaluasi Program P2P yang tidak terlaksana sebesar Rp. 8.520.000,-.

15.Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P

Kegiatan Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil, Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan dan penyelenggaraan UKOM (daring) jabfung kesehatan lingkup Ditjen P2P telah terealisasi sebesar Rp.19.920.000,- yang tidak terealisasi sebesar Rp 2.740.000,-.

16.Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P

Komponen pengelolaan keuangan ditjen P2P ada 5 Sub Komponen yaitu :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini digunakan untuk belanja uang harian, penginapan dan transport di luar kota untuk penyusunan laporan keuangan sebanyak Rp 9.405.000,-

2. Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBPN pada Pihak Internal dan Eksternal

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 dihadiri oleh pegawai dari bidang dan wilayah kerja, anggaran digunakan untuk belanja konsumsi sebanyak 55 box, honor narasumber sebanyak 1 orang dan transport lokal untuk 13 orang

3. Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk belanja uang penginapan, transport dan uang harian sebanyak Rp 11.380.000,- dilaksanakan di Bekasi selama 4 hari pada tanggal 29 sd 01 November 2024

4. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran uang harian, transport dan penginapan dengan anggaran sebanyak Rp 10.228.000,-

5. Rekonsiliasi Data PNBPN

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun, anggaran yang digunakan untuk transport sebanyak 5 orang pada setiap pertemuannya dengan total anggaran digunakan untuk pembayaran transport sebesar Rp. 3.060.000,-

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikannya anggaran untuk komponen ini sebesar Rp 42.548.000,- sedangkan *outputnya* adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan, sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan PNBP pada pihak internal dan eksternal, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang telah terealisasi sebesar Rp 42.339.519,- (99,51%).

17. Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan terdiri dari sub komponen Penataan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan, Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan, Penyusutan dan pemusnaan Arsip yang telah terealisasi sebesar Rp. 16.645.000,- (100%).

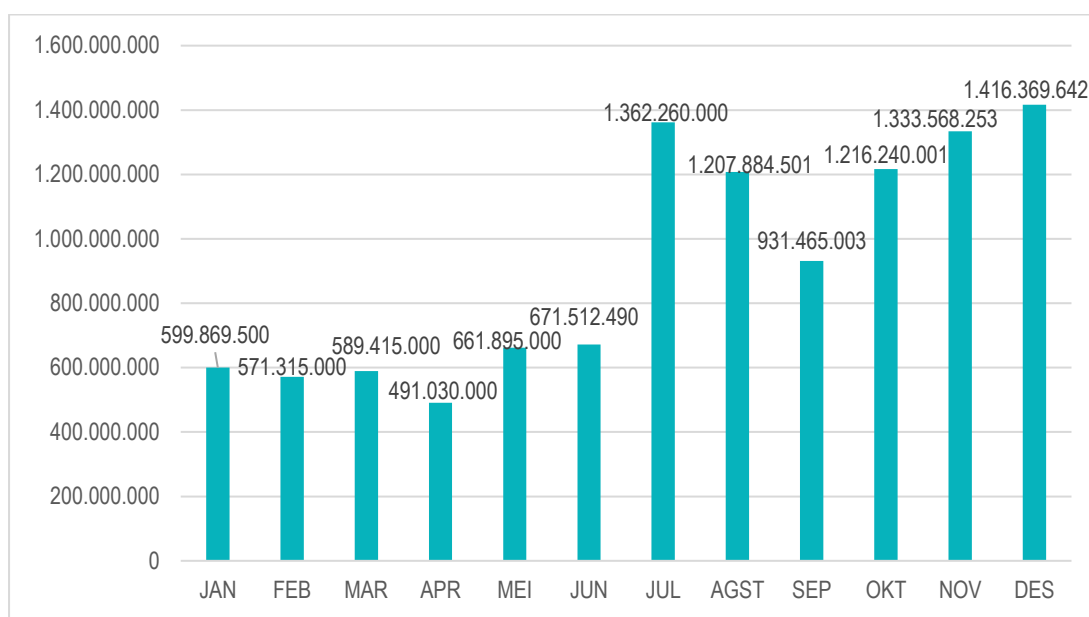
4.2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Sumber dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tiap bulannya di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| a) COP (<i>Certificate of Pratique</i>) | n) Vaksin Yellow Fever |
| b) SSCEC | o) Vaksin Meningitis |
| c) SSCC | |
| d) Buku Kesehatan Kapal | |
| e) PHQC | |
| f) Sertifikat Keterangan OMKABA | |
| g) Sertifikat Obat dan Alat P3K | |
| h) Buku ICV | |
| i) Pemeriksaan dan Pengobatan | |
| j) Surat Izin Pengangkutan Jenazah | |
| k) Surat Izin Pengangkutan Orang Sakit | |
| l) Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga | |
| m) Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut Kapal | |

Target penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok tahun 2024 sebesar Rp 6.466.000.000,- dan telah tercapai sebesar Rp 11.052.824.390,- atau 170,93% dengan rincian tiap bulannya sebagai berikut :

Grafik 4. 62 Penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok Tahun Anggaran 2024



4.3. PENCAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBKK Tanjung Priok memiliki delapan indikator kinerja. Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan BBKK Tanjung Priok telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 16 Hasil Pencapaian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN	0,92	0,96	104,35%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98,50%	100%	101,52%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN	1	1	100,00%
4	Nilai kinerja anggaran	85	95,95	112,88%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,5	99,32	106,22%
6	Kinerja implementasi WBK satker	82,5	89,86	108,92%

7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82,50%	100,00%	121,21%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96	97,46%	101,52%
Rata-Rata				107,07%

4.4. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu reformasi birokrasi merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi Birokrasi di lingkungan BBKK Tanjung Priok pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai dan kode etik pegawai.

Sejak digulirkan akhir tahun 2012 tentang Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di BBKK Tanjung Priok, perlahan namun pasti, perubahan-perubahan kecil terjadi. Seiring dengan terus disosialisasikannya budaya anti korupsi di lingkungan BBKK Tanjung Priok dan juga kebijakan pimpinan untuk menciptakan BBKK Tanjung Priok yang bebas dari korupsi serta komitmen berupa penandatanganan pakta integritas dari segenap unsur yang ada. BBKK Tanjung Priok semakin memperbaiki diri.

Pada tahun 2015, BBKK Tanjung Priok mendapat kehormatan ditunjuk sebagai satker yang melaksanakan pembayaran PNPB secara *online* oleh Kementerian Keuangan, gayung pun bersambut, seiring cita-cita BBKK Tanjung Priok untuk menciptakan wilayah yang bersih tanpa pungli dan gratifikasi, pembayaran PNPB yang *cashless* dapat berjalan dengan baik. Setelah satu

tahun berjalan dan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, BBKK Tanjung Priok mendapatkan penghargaan sebagai pengelola PNPB terbaik.

BBKK Tanjung Priok pada tahun 2016 mendapatkan kesempatan untuk dinilai oleh Kementerian PAN dan RB sebagai satker yang diusulkan untuk WBK, dan ternyata hasilnya BBKK Tanjung Priok mendapatkan predikat WBK.

Pada tahun 2017, BBKK Tanjung Priok memperbaiki layanan publik, memperbaiki pola pelayanan vaksinasi dengan motto Senyum, Sapa dan Salam (3S), mengaktifkan pengaduan masyarakat, *sharing* informasi kepada publik melalui *web site*, dan terus berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak melakukan pungli.

Pada tahun 2019 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dilakukan *Self Assesment* terhadap Satker yang diusulkan sebagai Satker berpredikat WBBM oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI. Walaupun hasil dari penilaian tersebut belum memenuhi persyaratan namun kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya.

Pada tahun 2020 telah dilakukan *Self Assesment* sebagai Satker berpredikat WBBM oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI tetapi hasilnya belum memenuhi syarat sehingga Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok masih berusaha untuk meraih predikat WBBM pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2021 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 91,63.

Pada tahun 2022 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 87,61.

Pada tahun 2023 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 87,28.

Pada tahun 2024 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 97,46.

Pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak serta pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Predikat yang diraih bukan akhir dari perjuangan, namun merupakan awal dari perjalanan untuk menempuh pencapaian berikutnya. Semoga BBKK Tanjung Priok terus

memegang komitmen untuk bisa meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun berikutnya.

4.5. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Sepanjang tahun 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya :

A. Penghargaan Pelabuhan Sehat

1. Penghargaan Pelabuhan Sehat dari Menteri Kesehatan Tahun 2024 untuk Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Penghargaan Pelabuhan Sehat dari Menteri Kesehatan Tahun 2024 untuk Pelabuhan Sunda Kelapa.
3. Penghargaan Pelabuhan Sehat dari Menteri Kesehatan Tahun 2024 untuk Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Gambar 4. 1 Penghargaan Pelabuhan Sehat



B. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Peringkat ke III satuan Kerja dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik semester I Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil dari Kepala KPPN Jakarta VII.
2. Peringkat ke III satuan Kerja dengan Penyampaian LPJ bendahara terbaik semester I Tahun Anggaran 2024 dari Kepala KPPN Jakarta VII
3. Penghargaan Satker Dengan Penyampaian Data Capaian Output Tercepat Periode September 2024

Gambar 4. 2 Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



C. Penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok

1. Best Award atas kerjasama, kolaborasi dan sinergi dalam pencapaian peningkatan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Penghargaan atas Kerjasama dan dukungan dalam penyelenggaraan angkutan laut lebaran Tahun 2024/1445 H.
3. Penghargaan atas Kerjasama dan dukungan dalam penyelenggaraan angkutan laut Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

Gambar 4. 3 Penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok cukup baik, hal ini terlihat dari ikut sertanya pegawai dalam pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BBKK maupun unit eselon 1.
2. Kegiatan Surveilans Epidemiologi meliputi pengamatan penyakit menular melalui alat angkut, pengamatan penyakit menular melalui awak kapal & penumpang, respon sinyal kewaspadaan dini (SKD)/KLB/bencana di Wilayah layanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit telah dilaksanakan.
3. Perhatian lebih untuk Aplikasi Sinkarkes dan Aplikasi SE yang sering mengalami gangguan jaringan terutama aplikasi SE yang saat ini sudah susah untuk di akses oleh petugas pengolah data, sehingga proses surveilans menjadi terganggu.
4. Kegiatan pendukung surveilans epidemiologi telah dilaksanakan
5. Sarana dan prasarana banyak yang sudah tidak memadai karena masa pakai yang sudah lebih dari lima Tahun serta yang belum ada diharapkan menjadi perhatian
6. Kegiatan kekarantinaan meliputi pengawasan dan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan COP, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (*Ship Sanitation Control Sertificate/Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) dan pengawasan lalu lintas komoditi omkaba ekspor-impor dan penerbitan dokumen kesehatan kapal dapat 100% dilaksanakan.
7. Kegiatan pendukung kegiatan pengawasan faktor risiko alat angkut dan barang telah dilaksanakan
8. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan rutin seperti kegiatan kekarantinaan, pelayanan dokumen kesehatan kapal dan pengawasan awak kapal maupun penumpang telah dilaksanakan dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara
9. Semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Tim Kerja Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan untuk tahun 2024 berjalan dengan baik
10. Kegiatan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan Dan Situasi Khusus meliputi : penerbitan buku ICV, penerbitan surat ijin pengangkutan jenazah, penerbitan surat ijin angkut orang sakit, kunjungan poliklinik, pelayanan vaksinasi dan pendistribusian sertifikat vaksinasi internasional (ICV), distribusi pemakaian vaksinasi *YELLOW FEVER*, distribusi pemakaian vaksin *MENINGITIS MENINGOCOCCUS*, distribusi pemakaian vaksin influenza, distribusi

pemakaian vaksin *THYPOID*, penerbitan SKPK/ KIR, pemeriksaan laboratorium dan penerbitan sertifikat P3K

11. Kegiatan pendukung pengembangan kompetensi petugas kesehatan: Pelatihan *BTCLS* dan *International Vaccination Service For ICV (P3VI) and Travel Health Course*, Penjaminan Mutu Laboratorium dan Update Analisa Sperma, *On The Job Training* Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Medis, *On The Job Training* Pelayanan Medis di Kapal, *On The Job Training Basic Life Support* Bagi Petugas Medis dan Non Medis

5.2. SARAN-SARAN

1. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan.
2. Penguatan jaringan internet yang memadai mengingat penerbitan dokumen saat ini adalah dokumen online dari aplikasi Sinkarkes serta proses kegiatan surveilans lainnya berupa aplikasi SE dan aplikasi SABATA memerlukan jaringan internet sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan lebih optimal
3. Pengadaan sarana dan prasarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di Bidang Surveilans Epidemiologi
4. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan kepada perusahaan pelayaran serta instansi lainnya secara rutin melakukan tindakan pencegahan masuk dan berkembangnya penyakit melalui awak kapal dan barang yang ada di kapal serta pelanggaran Kekarantinaan
5. Selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup dan menerapkan pola hidup sehat
6. Optimalisasi sumber daya manusia yang sudah ada di Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan Dan Situasi Khusus agar pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dan kesehatan matra lebih efektif dan efisien
7. Mengupdate jaringan server internet yang lebih baik, sehingga proses input data kedalam aplikasi dapat berjalan lebih optimal dan lancar
8. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan Dan Situasi Khusus yang sudah ada tetap dirawat dan dipelihara dengan baik
9. Pada tahun 2025 pertemuan teknis dan bimbingan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan Dan Situasi Khusus agar tetap diadakan untuk meningkatkan jejaring kerja dan komunikasi antar BBKK dan BKK, lintas sektor dan lintas program
10. Penambah daya tahan tubuh bagi petugas tetap diadakan di Tahun 2025 sebagai sistem imun tubuh bagi petugas.

11. Kegiatan-kegiatan agar dilaksanakan secara maksimal agar anggaran dapat terserap dengan baik dan optimal.

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

**JALAN NUSANTARA NO. 2 PELABUHAN TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA KODE POS 14310
TELPON / WA : 0811-1181-0400
TELPON : (021) 1500900**

